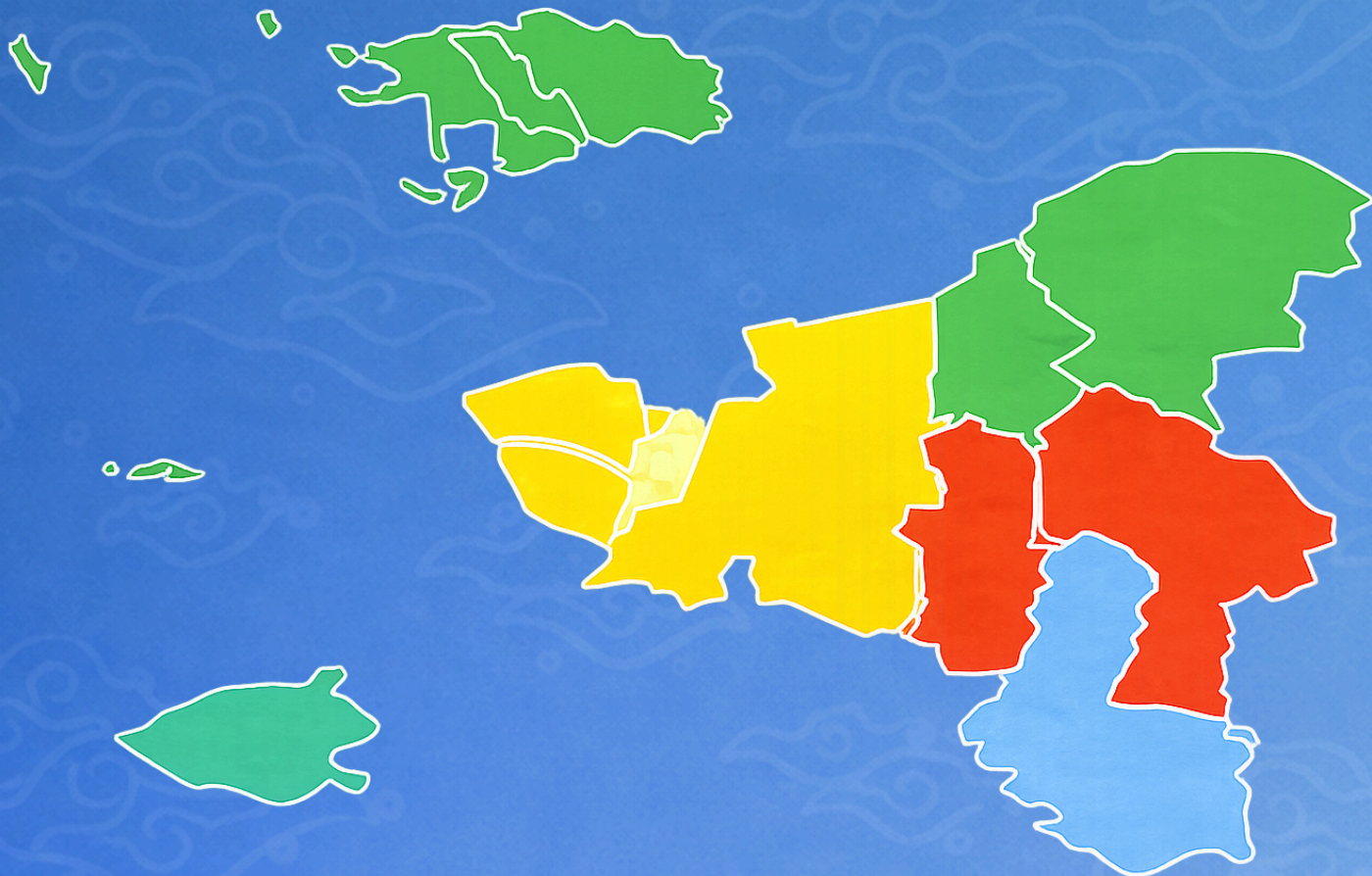


LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI BADAN PENGARAH PAPUA PERIODE BULAN JULI 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Bulan Juli Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, laporan ini dimaksudkan sebagai bahan dokumentasi, evaluasi, serta masukan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan program strategis ke depan.

Selama periode Juli 2026, Badan Pengarah Papua Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi fungsi pengarahan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberpihakan kepada kepentingan masyarakat Papua Barat Daya, khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

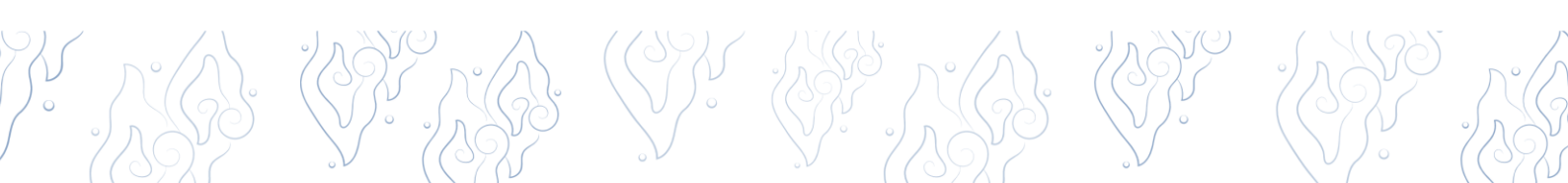
Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya pada periode selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua Barat Daya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat Daya.

Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Dasar Hukum (Landasan).....	4
1.2 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
BAB II KELEMBAGAAN BADAN PENGARAH PAPUA.....	7
2.1 Definisi BPP	7
2.2 Tugas BPP	7
2.3 Fungsi BPP	7
2.4 Struktur BPP	8
BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI.....	9
3.1 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Sehat	9
3.2 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Cerdas	41
3.3 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Produktif.....	80
3.4 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Polhukam/Damai.....	117
3.5 Pelaksanaan SHEK Strategis (Gabungan Misi)	140
BAB IV CAPAIAN, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN	189
4.1 Capaian.....	189
4.2 Permasalahan.....	193
4.3 Tantangan	194
BAB V PENUTUP	196
5.1 Kesimpulan	196
5.2 Rekomendasi	197
5.3 Penutup.....	198



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum (Landasan)

- A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
- D. Kelembagaan Badan Pengarah Papua
 - 1. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.
 - 3. Peraturan Ketua BPP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua.
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan BP3OKP.
 - 5. Keputusan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- E. Arah Kebijakan Pembangunan Papua
 - 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029.
 - 3. Peraturan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Juli 2026 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya, serta sebagai media dokumentasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan.

2. Tujuan

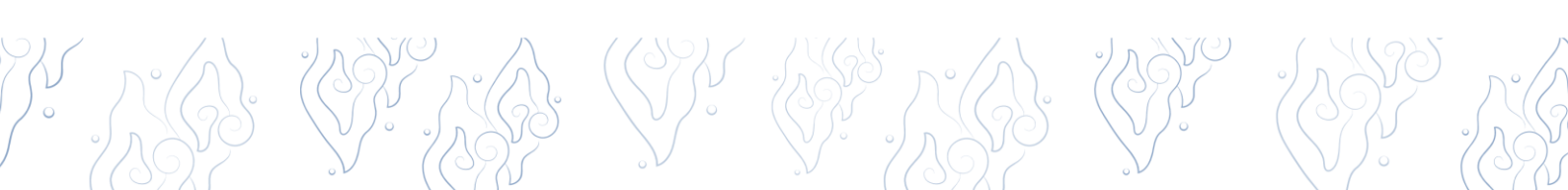
Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Menyajikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode Juli 2026.
2. Menggambarkan capaian, perkembangan, serta hasil kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam kerangka misi RIPP.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK Badan Pengarah Papua.
4. Menyusun rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
5. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Barat Daya, khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

1.3 Ruang Lingkup

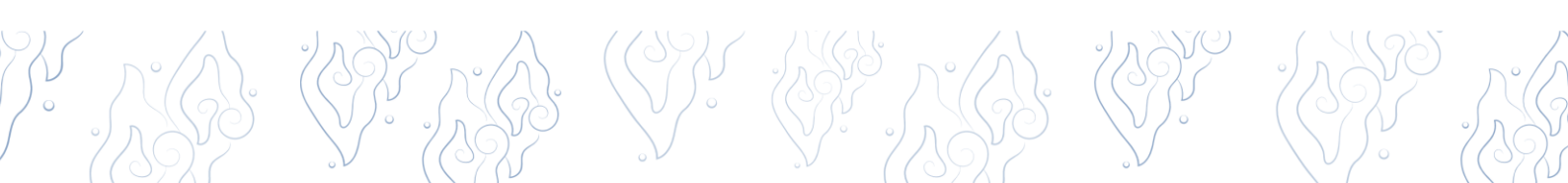
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Juli 2026 ini mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengarah di wilayah Provinsi Papua Barat Daya selama periode 1–30 Juli 2026. Ruang lingkup laporan meliputi:

1. Pelaksanaan pengarahan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap kebijakan dan program percepatan pembangunan serta Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.



2. Pelaksanaan kegiatan strategis dalam kerangka misi RIPPP.
3. Capaian yang diperoleh selama periode pelaporan, termasuk hasil koordinasi dan rekomendasi yang dihasilkan.
4. Identifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah.

Laporan ini disusun sebagai gambaran komprehensif atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode pelaporan, serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada periode berikutnya.



BAB II

KELEMBAGAAN BADAN PENGARAH PAPUA

2.1 Definisi BPP

1. Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1: Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
2. Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2: Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

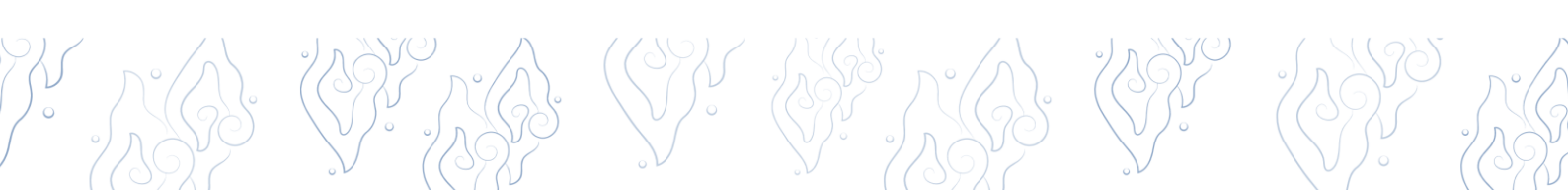
2.2 Tugas BPP

Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua bertugas untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Fungsi BPP

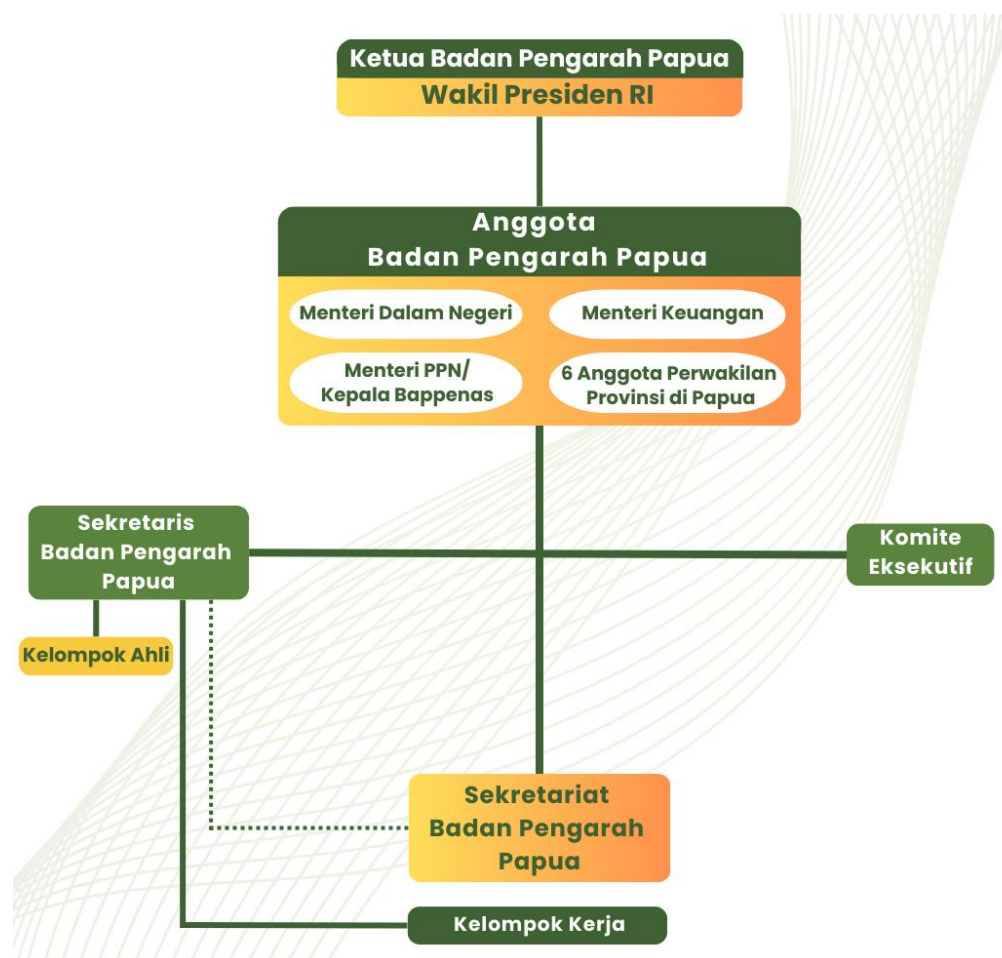
Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
- b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan



- percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
- c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
 - e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

2.4 Struktur BPP



BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Sehat

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	SHEK dengan FKG Universitas Ciputra Surabaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis-Jum'at, 2-3 Juli 2026 FKG Universitas Ciputra Surabaya
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua
Latar Belakang	Keberhasilan Capaian Indikator papua sehat salah satunya di topang dengan peningkatan Jumlah SDMk,diantaranya tenaga dokter. Kebutuhan tenaga dokter tinggi namun daerah tidak memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk memenuhi Standar jumlah secara cepat menuntut agar daerah memiliki Strategi pengadaan dokter atau tenaga kesehatan Lainnya dengan penyesuaian pada kemampuan daerah. Salah satu peluang yang dapat menjadi pilihan adalah memanfaatkan penawaran program beasiswa dari Kampus-kampus dengan Kualitas baik di Indonesia.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Koordinasi potensi pembiayaan pendidikan dokter dan dokter gigi melalui sama beasiswa untuk Indonesia Timur.

Peserta Kegiatan	• Anggota Pokja Papua Sehat BPP PBD (drg. Rosaline Novita Irianna Krimadi, MPH., SpPM.) • Tim Admin Universitas Ciputra • Staf pengajar FKG Universitas Ciputra
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	• Penawaran beasiswa penuh pendidikan dokter dan dokter gigi bagi wilayah Timur • Jumlah kuota tersedia • Perincian pembiayaan • Persyaratan • Proyeksi hasil Capaian
Hasil Kegiatan	• Informasi terkait penawaran beasiswa penuh pendidikan dokter dan dokter gigi bagi wilayah Timur • Peluang mendapatkan kerjasama antara Universitas Ciputra dengan Pemerintah Daerah
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Diharapkan OPD terkait dapat menindaklanjuti hasil koordinasi (peluang beasiswa untuk masyarakat OAP Papua Barat Daya)
Dokumentasi	 Galaxy A17 5G

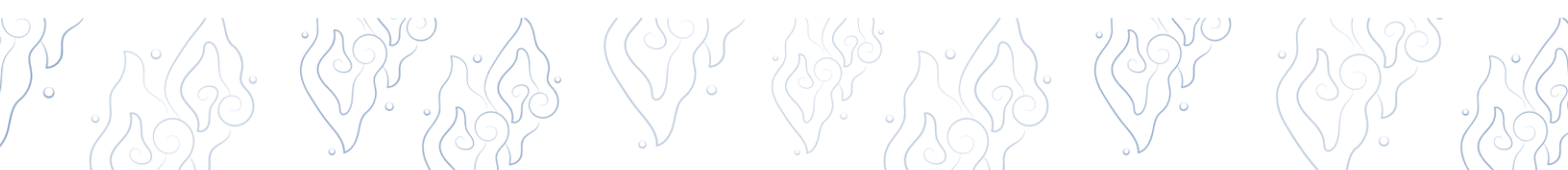
Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Forum SHEK Tindak Lanjut Rencana Investasi Bidang Kesehatan di Kota Sorong dalam Mendukung Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya (Topik Pembahasan Aspek Hukum PKS)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 7 Juli 2026 Ruang Rapat Anggrek Kantor Walikota Sorong
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 3. Terwujudnya komunikasi public yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks rata-rata ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan 2. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 3. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Pembangunan Rumah Sakit Siloam International di Kota Sorong merupakan proyek strategis yang diharapkan memberikan dampak luas bagi pembangunan daerah. Selain meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pembangunan rumah sakit ini juga diharapkan memberikan multiplier effect terhadap perekonomian daerah melalui terbukanya peluang usaha baru, penyerapan tenaga kerja lokal khususnya Orang Asli Papua (OAP), serta peluang memperoleh beasiswa pendidikan di bidang

	sumber daya manusia kesehatan yang berasal dari Universitas Pelita Harapan sebagai mitra RS Siloam. Hingga saat ini, beberapa tahapan kerja sama telah dilaksanakan, baik oleh pihak RS Siloam maupun Pemerintah Kota Sorong, dan telah memasuki tahap penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dalam proses penyusunan PKS tersebut, diperlukan terlebih dahulu kepastian mengenai legalitas para pihak yang akan melaksanakan perjanjian. Untuk memperoleh kepastian dimaksud, ditempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri sebagai pihak yang akan memberikan keputusan terkait status dan kedudukan para pihak. Hal tersebut diperlukan mengingat aset tanah telah resmi diserahkan dari Kabupaten Sorong kepada Kota Sorong sejak tahun 2018, sementara PKS sebelumnya yang disusun pada tahun 2013 masih mencantumkan Kabupaten Sorong sebagai pihak pertama. Kondisi tersebut memerlukan kepastian hukum sebelum dilaksanakannya pembongkaran bangunan lama dan pembangunan rumah sakit baru. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan memandang perlu adanya putusan atau pendapat hukum dari Pengadilan Negeri untuk menentukan langkah hukum terhadap PKS sebelumnya, termasuk apakah cukup dilakukan adendum atau diperlukan penyusunan perjanjian baru. Kepastian tersebut diperlukan untuk memperkuat landasan hukum kerja sama, memberikan kepastian bagi investor, serta mencegah timbulnya permasalahan hukum dalam pelaksanaan pembangunan di kemudian hari.
--	--

Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	1. Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) Badan Pengarah Papua dalam mendukung tindak lanjut rencana investasi bidang kesehatan di Kota Sorong. 2. Memfasilitasi koordinasi lintas sektor terkait rencana permohonan Pendapat Hukum melalui Pengadilan sebagai bagian dari tahapan rencana kerja sama Pemerintah Kota Sorong dengan Siloam Group. 3. Menyamakan persepsi antar perangkat daerah dan instansi terkait mengenai aspek hukum, aset daerah, pertanahan, serta kewenangan masing-masing pihak dalam mendukung rencana kerja sama dimaksud. 4. Mengidentifikasi berbagai kebutuhan, tantangan, dan alternatif penyelesaian sebagai bahan penyusunan rekomendasi Badan Pengarah Papua. 5. Mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya melalui pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK).
Peserta Kegiatan	• Peserta Pelatihan termasuk Anggota Pokja Papua Sehat (drg. Rosaline Novita Irianna Krimadi, MPH., SpPM) • Kemenkes • dst
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Harmonisasi Evaluasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	• Penetapan regulasi sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit.

	• Pelatihan melaksanakan survey terhadap standar akreditasi Rumah Sakit. • Penilaian validitas hasil akreditasi Rumah sakit terhadap regulasi yang ada.
Hasil Kegiatan	1. Dokumentasi Kegiatan 2. Laporan Kegiatan 3. Sertifikat Surveyor Akreditasi
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. Pelaksanaan Akreditasi fasilitas kesehatan sebaiknya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan standar yang sesuai. 2. Pelaksanaan akreditasi yang dilaksanakan hanya diatas “kertas” merupakan salah satu bentuk pengabaian terhadap pelayanan yang berkualitas sehingga perlu dilaksanakan pengawasan yang ketat demi menjaga kepentingan masyarakat. 3. Pelayanan kesehatan sebaiknya memperhatikan standar untuk menjaga mutu pelayanan yang akan berdampak terhadap keselamatan pasien. Menjaga mutu merupakan kewajiban bagi pelaksana layanan kesehatan dan wajib dilaksanakan dengan sungguh-sungguh demi menghindari kejadian yang tidak diinginkan baik pada pasien maupun penyelenggara layanan kesehatan tersebut. Dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit program nasional merupakan hal yang wajib diperhatikan. Beberapa program nasional tersebut diantaranya adalah terkait permasalahan Stunting dan wasting serta pemberantasan penyakit menular seperti TB dan HIV yang merupakan masalah di Papua, sehingga perlu diperhatikan secara lebih ketat.

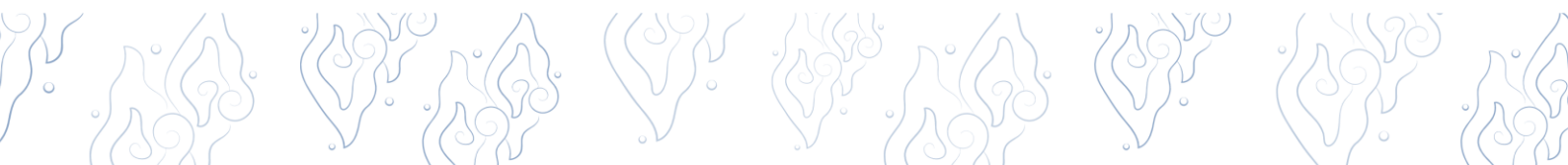


Dokumentasi



Kegiatan 3

Nama Kegiatan	SHEK BPP PBD pada UPTD Puskesmas Sorong Kota
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 9 Juli 2026 Puskesmas Sorong Kota

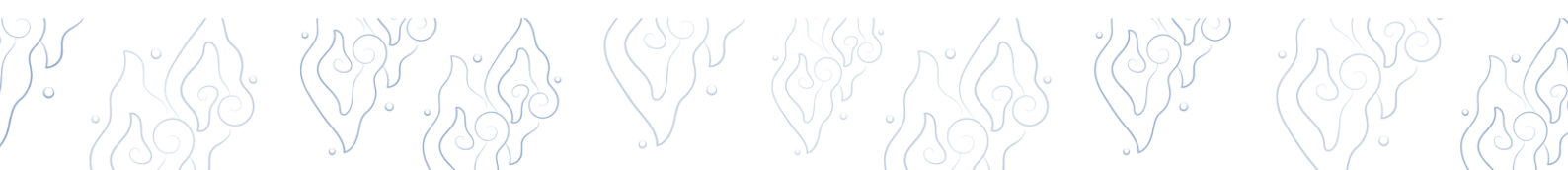


Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 3. Terwujudnya komunikasi public yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks rata-rata Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan 2. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 3. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Inspeksi fasilitas kesehatan di Puskesmas Sorong Kota pada 9 Juli 2026 dilakukan untuk menilai kesiapan menghadapi akreditasi pada September 2026. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya berbagai kendala serius yang dapat menghambat mutu pelayanan kesehatan. Secara fisik, bangunan mengalami kebocoran atap, kerusakan plafon, serta risiko keamanan ruang pelayanan. Dari sisi peralatan, terdapat kerusakan alat medis, minimnya fasilitas penunjang seperti ambulans, kursi roda, dan ruang laktasi. Manajemen SDM juga menghadapi keterbatasan, dengan tenaga dokter masih berstatus honorer dan jadwal pelayanan yang tidak optimal. Selain itu, ditemukan masalah dalam manajemen gizi, seperti penyimpanan makanan tambahan yang tidak sesuai standar serta kasus stunting yang memerlukan intervensi segera. Faktor eksternal berupa gangguan keamanan di lingkungan puskesmas turut menambah beban operasional.

	Akar masalah utama terletak pada ketidaksesuaian konstruksi awal bangunan serta keterbatasan pendanaan, khususnya belum adanya alokasi dana operasional mandiri (BOK) dan distribusi kapitasi JKN yang adil. Kondisi ini menuntut adanya langkah perbaikan infrastruktur, penguatan manajemen, serta advokasi kebijakan agar Puskesmas Sorong Kota dapat memenuhi standar akreditasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan tugas dan fungsi SHEK bidang kesehatan pada Puskesmas Sorong. • Menilai kondisi fisik bangunan dan infrastruktur untuk memastikan keamanan, kenyamanan, serta kesesuaian dengan standar akreditasi. • Mengidentifikasi kelayakan peralatan medis dan penunjang serta kebutuhan pengadaan atau perbaikan agar pelayanan kesehatan berjalan optimal. • Mengevaluasi manajemen sumber daya manusia (SDM), termasuk status kepegawaian dan jadwal pelayanan, guna meningkatkan efektivitas layanan. • Meninjau manajemen gizi dan pelayanan masyarakat, khususnya terkait penyimpanan makanan tambahan, distribusi logistik, serta penanganan kasus stunting. • Mengidentifikasi aspek keamanan lingkungan yang dapat memengaruhi keselamatan tenaga medis dan pasien. • Menganalisis akar masalah terkait konstruksi dan pendanaan untuk menemukan solusi jangka panjang.

	Menyusun rekomendasi tindak lanjut berupa perbaikan infrastruktur, penguatan manajemen, serta advokasi kebijakan agar Puskesmas Sorong Kota siap menghadapi akreditasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Peserta Kegiatan	- BPP Provinsi Papua Barat Daya (Anggota BPP PBD, Pokja Sehat, Pokja Polhukam, Pokja Produktif) - Pihak Puskesmas Sorong Kota (Kepala Puskesmas dan Staff)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Evaluasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	Kondisi Fisik Bangunan dan Infrastruktur - Kebocoran atap di berbagai ruangan (poli gigi, kamar mandi, ruang surveilans). - Kerusakan plafon gipsum dan jamur akibat kelembapan. - Risiko keamanan ruang IMS karena sirkulasi udara buruk. - Aksesibilitas belum memenuhi standar (tidak ada handrail untuk difabel). Peralatan Medis dan Penunjang - Kerusakan monitor LCD intraoral camera di poli gigi. - Alat tensi digital sering error dan jarang dikalibrasi. - Tidak tersedia ambulans, kursi roda, dan fasilitas internet resmi. - Belum ada ruang laktasi.

	Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) • Dokter masih berstatus tenaga honorer. • Jadwal pelayanan terbatas, hanya 2 hari per minggu karena keterbatasan biaya. Manajemen Gizi dan Pelayanan Masyarakat • Penyimpanan makanan tambahan (susu, biskuit) tidak sesuai standar (langsung di lantai). • Ditemukan kasus stunting balita (1 tahun, berat 7 kg). • Distribusi logistik gizi dari Puskesmas Induk tidak sesuai kebutuhan riil. Keamanan Lingkungan • Gangguan eksternal dari orang mabuk yang sering tidur di depan pagar puskesmas. Analisis Akar Masalah • Ketidaksesuaian spesifikasi konstruksi awal (RAB) menyebabkan kebocoran sistemik. • Keterbatasan pendanaan: belum ada biaya operasional mandiri (BOK) dan distribusi kapitasi JKN yang adil.
Hasil Kegiatan	1. Ditemukan masalah struktural serius berupa kebocoran atap, kerusakan plafon, dan risiko keamanan ruang IMS akibat sirkulasi udara buruk. 2. Fasilitas penunjang belum memadai, termasuk kerusakan alat medis (intraoral camera, tensi digital), tidak adanya ambulans, kursi roda, ruang laktasi, serta akses internet resmi. 3. Manajemen SDM terbatas, dengan dokter masih berstatus honorer dan jadwal pelayanan hanya 2 hari per minggu.



	4. Masalah gizi dan pelayanan masyarakat teridentifikasi, seperti penyimpanan makanan tambahan yang tidak sesuai standar, distribusi logistik yang tidak tepat, serta kasus stunting balita. 5. Keamanan lingkungan kurang terjaga, adanya gangguan eksternal dari orang mabuk di area gerbang puskesmas. 6. Akar masalah utama: ketidaksesuaian konstruksi awal bangunan dan keterbatasan pendanaan (belum ada BOK dan distribusi kapitasi JKN yang adil). 7. Rekomendasi tindak lanjut: perbaikan infrastruktur oleh kontraktor, pengadaan fasilitas akreditasi (handrail, kursi roda, ruang laktasi), kalibrasi alat medis, advokasi dana operasional ke pemerintah daerah, serta peningkatan pengamanan lingkungan.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Rekomendasi dan Tindak Lanjut terhadap masalah yang eksisting : • Perbaikan infrastruktur oleh kontraktor awal. • Pemasangan handrail, pengadaan kursi roda, ruang laktasi, dan penataan farmasi. • Kalibrasi rutin alat medis. • Advokasi dana kapitasi dan BOK ke Walikota/Dinas Kesehatan. • Peningkatan pengamanan lingkungan puskesmas. Terhadap proses perencanaan selanjutnya: • Memperhatikan betul mengenai proses perencanaan-penganggaran dan kualitas hasil perencanaan baik itu berupa infrastruktur maupun program

Dokumentasi



Kegiatan 4

Nama Kegiatan	Peran Aktif SHEK BPP PBD pada Kegiatan Pelantikan PDGI Cabang Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Minggu, 12 Juli 2026 Rylich Panorama Hotel, Sorong

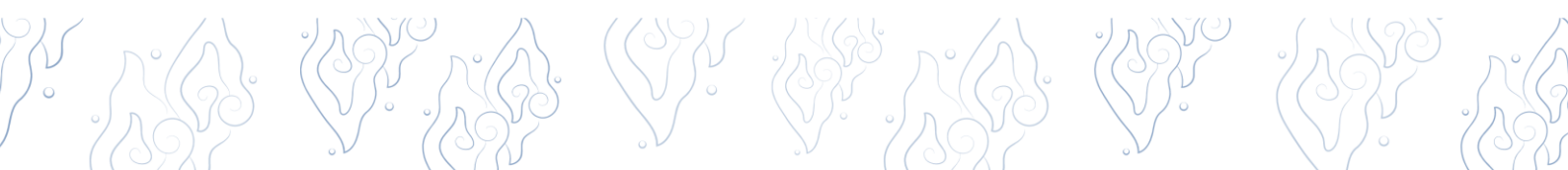
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 3. Terwujudnya komunikasi public yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks rata-rata Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan 2. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 3. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Organisasi profesi merupakan salah satu unsur penting dalam kolaborasi bagi badan pengarah papua serta pemerintah daerah menuju misi papua sehat karena melalui organisasi profesi maka peningkatan kualitas layanan kesehatan dapat diupayakan. Sehingga menghadiri Pelantikan pengurus PDGI Cabang Sorong periode 2025–2030 merupakan momentum penting selain untuk menjalin kerjasama yang lebih erat juga memberi dukungan bagi PDGI Cabng Sorong untuk memperkuat struktur organisasi profesi dokter gigi di Papua Barat Daya. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai seremonial pergantian kepengurusan, tetapi juga menjadi wadah konsolidasi dan peningkatan kompetensi melalui seminar ilmiah. Dengan tema “Bersama PDGI Sorong Mari Tingkatkan Kompetensi dan Memperkuat Organisasi untuk Mewujudkan Senyum Sehat di Tanah Papua”, acara ini menegaskan komitmen PDGI dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat.

	Kegiatan ini juga menyoroti tantangan nyata di lapangan, seperti keterbatasan jumlah dokter gigi, minimnya fasilitas poli gigi di Puskesmas, serta tingginya angka karies gigi dan kanker mulut yang berdampak pada masalah kesehatan strategis, termasuk stunting. Kehadiran tokoh pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat menunjukkan dukungan luas terhadap peran PDGI sebagai jembatan antara praktisi dan pengambil kebijakan. Dengan adanya program afirmasi bagi putra-putri Papua untuk melanjutkan pendidikan spesialis, pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kapasitas tenaga kesehatan gigi di Tanah Papua.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Menghadiri undangan dari organisasi profesi PDGI Cabang Sorong. • Melaksanakan fungsi Koordinasi terhadap pendayagunaan tenaga kesehatan. • Melaksanakan fungsi Sinkronisasi terhadap kinerja organisasi profesi dengan indikator Papua Sehat.
Peserta Kegiatan	Peserta kegiatan pelantikan pengurus PDGI Cabang Sorong periode 2025–2030: • Tokoh Pemerintah dan Organisasi • Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Elisa Kambu, S.Sos. • Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) PDGI, Dr. drg. Eka Erwansyah, M.Kes., Sp.Ort(K). • Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong. • BPP Provinsi Papua Barat Daya (Anggota BPP PBD dan Pokja Sehat) • Institusi Kesehatan dan Profesi • Direktur rumah sakit daerah dan swasta.

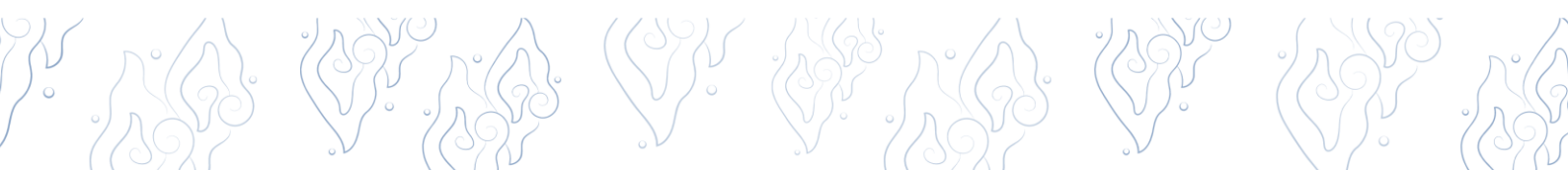
	• Pimpinan klinik. Ketua ikatan profesi kesehatan se-Papua Barat Daya (IDAI, POGI, IDI dll.). • Tokoh Masyarakat: Tokoh agama, adat, dan masyarakat.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	Peran PDGI Cabang Sorong untuk: • Memperkuat struktur organisasi profesi dokter gigi di Papua Barat Daya agar lebih solid dalam menjalankan peran pelayanan kesehatan gigi dan mulut. • Meningkatkan kompetensi anggota PDGI melalui seminar ilmiah dan program pengembangan kapasitas, sehingga mampu menghadapi tantangan kesehatan di daerah. • Menjadi wadah konsolidasi dan kolaborasi antara praktisi kesehatan gigi dengan pemerintah, rumah sakit, klinik, dan organisasi profesi lain. • Mendorong pemerataan tenaga dokter gigi hingga ke daerah terpencil melalui dukungan kebijakan dan program afirmasi pendidikan bagi putra-putri Papua. • Mengangkat isu strategis kesehatan gigi dan mulut seperti karies pada anak, stunting, dan kanker mulut, agar menjadi perhatian dalam kebijakan kesehatan daerah. • Meneguhkan komitmen pelayanan masyarakat dengan menjadikan PDGI sebagai jembatan antara

	tenaga medis di lapangan dan pengambil kebijakan. Kekurangan SDM • Dari 129 Puskesmas di Papua Barat Daya, hanya terdapat 51 dokter gigi yang berdomisili resmi. • Rasio pelayanan 1 dokter gigi untuk 12.500 penduduk, jauh dari standar WHO (1:7.500). • Keterbatasan Fasilitas • Banyak Puskesmas tidak memiliki poli gigi. • Alat dan bahan medis habis pakai sering tidak tersedia. • Dental unit di beberapa Puskesmas rusak (contoh: Saoka, Remu, Tambrau). • Isu Kesehatan Strategis • Tingginya angka karies gigi pada balita dan anak sekolah yang berkontribusi pada stunting. • Kasus kanker mulut sering ditemukan dalam stadium terminal. Program Afirmasi Pendidikan • Sekjen PB PDGI membuka peluang jalur afirmasi (jalan tol) bagi putra-putri asli Papua untuk melanjutkan pendidikan spesialis (PPDGS) dengan rekomendasi Gubernur. • Rekomendasi dan Harapan • Dukungan pemerintah daerah dalam pengadaan sarana-prasarana medis dan distribusi tenaga dokter gigi secara merata. • Kolaborasi lintas stakeholder untuk integrasi program kesehatan (eliminasi malaria, penurunan
--	--

	stunting) yang dimulai dari kesehatan gigi dan mulut. • Peran PDGI sebagai jembatan antara praktisi lapangan dan pengambil kebijakan untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Papua Barat Daya.
Hasil Kegiatan	1. Pelantikan resmi pengurus PDGI Cabang Sorong periode 2025–2030 telah dilaksanakan dengan prosesi serah terima jabatan, pengucapan janji, penyerahan bendera organisasi, dan penyematan pin oleh Gubernur Papua Barat Daya. 2. Momentum konsolidasi organisasi tercipta melalui seminar ilmiah dan sambutan dari berbagai tokoh, yang menegaskan komitmen PDGI dalam meningkatkan kompetensi serta memperkuat peran organisasi di Papua Barat Daya. 3. Identifikasi tantangan kesehatan gigi dan mulut di wilayah Papua Barat Daya, termasuk kekurangan tenaga dokter gigi (rasio 1:12.500 penduduk), keterbatasan fasilitas poli gigi dan alat medis, serta tingginya angka karies gigi dan kanker mulut. 4. Dukungan kebijakan afirmasi pendidikan dibuka oleh PB PDGI untuk putra-putri asli Papua agar dapat melanjutkan pendidikan spesialis melalui jalur khusus dengan rekomendasi Gubernur. 5. Komitmen pemerintah daerah dan stakeholder untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mendukung pengadaan sarana-prasarana, pemerataan distribusi tenaga dokter gigi, serta integrasi program kesehatan (penurunan stunting, eliminasi malaria) yang dimulai dari kesehatan gigi dan mulut.



	6. PDGI ditegaskan sebagai jembatan strategis antara praktisi lapangan dan pengambil kebijakan dalam memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Papua Barat Daya. 7. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya meminta kepada Anggota BPP PBD untuk memfasilitasi pertemuan seluruh KDH se-Papua Barat Daya untuk diskusi terkait PPSB.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. Penguatan SDM: Mendorong distribusi tenaga dokter gigi secara merata hingga ke daerah terpencil, sekaligus memperluas akses pendidikan spesialis melalui program afirmasi bagi putra-putri Papua. 2. Perbaikan Fasilitas: Advokasi kepada pemerintah daerah untuk pengadaan sarana-prasarana medis, termasuk poli gigi, dental unit, serta bahan medis habis pakai di seluruh Puskesmas. 3. Integrasi Program Kesehatan: Menghubungkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan program prioritas daerah seperti eliminasi malaria dan penurunan stunting. 4. Kolaborasi Lintas Stakeholder: Memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, rumah sakit, klinik, dan organisasi profesi untuk membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik. 5. Peran Strategis PDGI: Menjadikan PDGI sebagai jembatan antara praktisi di lapangan dengan pengambil kebijakan, sehingga isu-isu kesehatan gigi dan mulut dapat masuk dalam agenda pembangunan kesehatan Papua Barat Daya.



	6. BPP PBD akan menindaklanjuti permohonan fasilitasi dari Gubernur Papua Barat Daya melalui forum SHEK.
Dokumentasi	 The photographs document the inauguration and scientific seminar of PDGI Cabang Sorong. The top photo shows a group of people on stage, including a man in a blue suit and a woman in a blue uniform, with a large screen in the background displaying the event title. The middle photo shows a group of people standing behind a table, holding certificates or documents, with the same screen in the background. The bottom photo shows a large group of people, mostly in blue uniforms, posing for a group photo on the stage.



Kegiatan 5

Nama Kegiatan	SHEK BPP PBD pada RSUD Sele Be Solu Kota Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 13 Juli 2026 RSUD Sele Be Solu Kota Sorong
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 3. Terwujudnya komunikasi public yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks rata-rata Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan 2. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 3. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Monitoring dan evaluasi (Monev) di RS Sele Be Solu dilakukan sebagai bagian dari implementasi program Papua Sehat dalam kerangka Otonomi Khusus

	(Otsus). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi antara program strategis nasional dengan kebutuhan daerah, sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Rumah sakit ini memiliki posisi strategis sebagai pusat layanan kesehatan di ibu kota Provinsi Papua Barat Daya, dengan tren kunjungan pasien yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, di tengah peningkatan kebutuhan layanan, RS Sele Be Solu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran Otsus dan DAK, ketimpangan insentif tenaga medis, hingga hambatan koordinasi dengan BPJS. Selain itu, masalah operasional seperti pengelolaan limbah, keterbatasan fasilitas, dan produktivitas SDM turut menjadi perhatian. Dengan latar belakang tersebut, kegiatan Monev ini menjadi penting untuk mengidentifikasi hambatan strategis, mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut. Tujuannya adalah agar RS Sele Be Solu dapat meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat kapasitas SDM, dan mendukung percepatan pembangunan kesehatan di Tanah Papua.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program kesehatan agar implementasi misi Papua Sehat di RS Sele Be Solu selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dalam kerangka Otonomi Khusus. • Mengevaluasi kinerja pelayanan medis dan kapasitas rumah sakit, termasuk tren kunjungan

	pasien, profil penyakit, ketersediaan tempat tidur, serta jumlah dan kualitas tenaga medis. • Melaksanakan evaluasi penggunaan anggaran Otsus dan DAK, menilai efektivitas serapan, serta mengidentifikasi hambatan dalam sistem pengadaan dan realisasi anggaran. • Mengidentifikasi masalah strategis dan operasional yang memengaruhi mutu layanan, seperti kesejahteraan tenaga medis, koordinasi dengan BPJS, kebijakan top-down KJSU, serta kendala teknis pengelolaan limbah dan fasilitas. • Melaksanakan sinkronisasi dan menyarankan rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut untuk optimalisasi dana, peningkatan layanan unggulan, solusi energi terbarukan, advokasi kebijakan pusat, serta perbaikan manajerial dan produktivitas SDM.
Peserta Kegiatan	• BPP Provinsi Papua Barat Daya (Anggota BPP PBD, Pokja Sehat, Pokja Cerdas, Pokja Produktif, Pokja Damai) • Manajemen RSUD Sele Be Solu: Direktur (Direksi) dan Jajaran manajerial rumah sakit yang terlibat dalam penyusunan data, laporan anggaran, serta identifikasi masalah operasional.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Evaluasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	Kinerja Pelayanan dan Kapasitas RS

	• Peningkatan kunjungan pasien rawat inap dari 36.000 (2023) menjadi 41.000 (2024), dengan proyeksi 43.000 (2025). • Profil penyakit dominan: hipertensi, dispepsia, gangguan tulang belakang, stroke. • Kapasitas tempat tidur: 154 (2025), direncanakan 180–241 (2026) sesuai standar KRIS. • SDM: 59 tenaga medis (2 subspesialis, 30 spesialis, 24 umum, 3 gigi). Analisis Anggaran dan Realisasi • Dana Otsus fluktuatif (Rp 14,9 miliar di 2023 → Rp 5,1 miliar di 2024 → Rp 10,1 miliar di 2025 → proyeksi Rp 7,8 miliar di 2026). • Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022–2026 sebesar Rp 51,6 miliar untuk pembangunan fisik dan alat kesehatan. • Realisasi anggaran 2025 mencapai 84%, terkendala sistem e-katalog dan tanda tangan elektronik. Temuan Masalah dan Hambatan Strategis • Kesejahteraan tenaga medis: tidak ada insentif khusus, menimbulkan kecemburuan sosial. Pihak manajemen tidak memahami mengenai peruntukan dana otsus diijinkan bagi pembayaran Insentif Nakes dan Named • Koordinasi dengan BPJS: layanan kemoterapi belum bisa diakses karena syarat PKS obat kronik yang merupakan prasyarat untuk melakukan layanan kemoterapi • Kebijakan top-down KJSU: operasional gedung dan alat canggih membebani RS (biaya listrik naik dari Rp 80 juta → Rp 190 juta/bulan). Manajemen
--	--

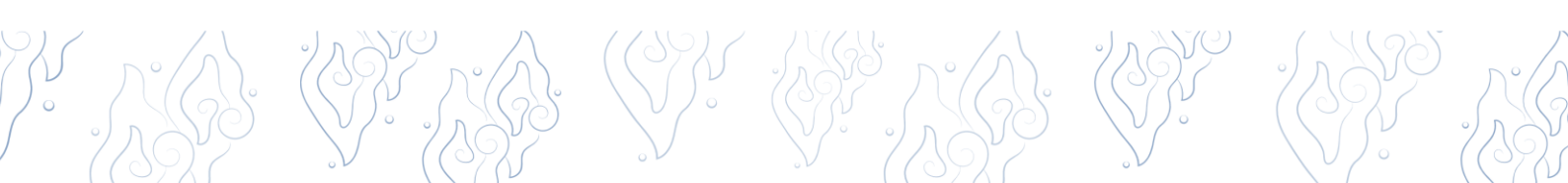
	tidak memahami prinsip prioritas dalam perencanaan KJSU serta lemah literasi terhadap sistem perencanaan KJSU berbasis aktifitas. Masalah Operasional dan Mutu • Pompa IPAL sering mati, insinerator tidak berfungsi karena izin. • Waktu tunggu pasien di UGD panjang akibat keterbatasan cleaning service. • Tidak ada checklist kebersihan di bangsal, tempat sampah medis tidak sesuai standar. • SIP/STR tenaga medis ada yang tidak aktif. • Produktivitas pegawai hanya 60–70% meski retensi tinggi.
Hasil Kegiatan	1. Evaluasi kinerja pelayanan menunjukkan tren kunjungan pasien yang terus meningkat, kapasitas tempat tidur bertambah, serta profil penyakit dominan yang perlu penanganan prioritas. 2. Analisis anggaran memperlihatkan fluktuasi dana Otsus dan DAK, dengan serapan anggaran 2025 mencapai 84% meski terkendala sistem pengadaan e-katalog. 3. Temuan masalah strategis meliputi ketidakadilan insentif tenaga medis, hambatan koordinasi dengan BPJS terkait layanan kemoterapi, serta beban kebijakan top-down KJSU yang menambah biaya operasional. 4. Masalah operasional teridentifikasi pada pengelolaan limbah, keterbatasan cleaning service, standar kebersihan ruangan, serta produktivitas SDM yang belum optimal. 5. Rekomendasi tindak lanjut mencakup optimalisasi dana Otsus untuk insentif, fokus layanan unggulan (misalnya Stroke atau Kanker), solusi energi

	terbarukan dengan solar cell, advokasi kebijakan pusat, serta perbaikan manajerial melalui audit internal dan penagihan klaim BPJS.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. Optimalisasi dana Otsus untuk insentif tenaga kesehatan. 2. Fokus layanan unggulan (misalnya Stroke atau Kanker) agar anggaran efektif. 3. Usulan energi terbarukan (solar cell) untuk menekan biaya listrik. 4. Advokasi kebijakan pusat agar RS tidak terbebani instruksi top-down. 5. Perbaikan manajerial: menagih klaim BPJS tertunda dan audit produktivitas SDM.
Dokumentasi	



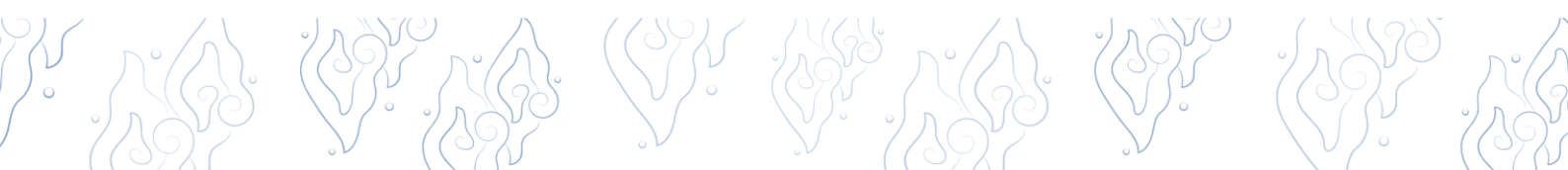
Kegiatan 6

Nama Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Pokja Papua Sehat melalui Kegiatan Pelatihan Survei Akreditasi Bagi Calon Surveior Akreditasi Rumah Sakit
----------------------	---



Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin-Jum'at, 27-31 Juli 2026 WFA (Surabaya)
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 3. Terwujudnya komunikasi public yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks rata-rata ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan 2. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 3. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Di dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang telah selaras dengan ASTA CITA presiden dan wakil presiden RI pada pada Misi Papua Sehat, Program percepatan: akselerasi akses dan mutu kesehatan dengan sub program percepatan: Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program (kegiatan Prioritas/Program/Bidang): Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan (Proyek Prioritas/Kegiatan/Menu): Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdapat output yang diharapkan berupa Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota. Selain itu kegiatan lainnya berupa Misi Papua Sehat dengan Program Percepatan Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Sub Program Percepatan: Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

	Program (kegiatan Prioritas/Program/Bidang): Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan (Proyek Prioritas/Kegiatan/Menu): Pembinaan dan Dukungan Sumber Daya yang Dibutuhkan dalam Pelaksanaan Akreditasi Seluruh Puskesmas, dan Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Output yang diharapkan adalah: Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten/Kota. Akreditasi Rumah sakit berpedoman pada penerapan standar yang dilaksanakan menggunakan referensi yang berbasis pada regulasi dengan spesifikasi tertentu sehingga anggota pokja papua sehat perlu melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguasaan pada regulasi serta standar yang berlaku agar saat melaksanakan evaluasi pada pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan, demi menjaga mutu pelaksanaan tugas pokja serta menjaga kesesuaian dengan tugas dan fungsi Pokja Papua Sehat maka diperlukan pemahaman yang baik agar dalam memberikan arahan serta melaksanakan pengawasan dapat melaksanakannya secara profesional dan berbasis pada kemampuan dan kompetensi anggota Pokja Papua sehat, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	1. Melaksanakan fungsi harmonisasi terhadap tata aturan dalam penerapan standar akreditasi rumah sakit. 2. Melaksanakan fungsi evaluasi terhadap standar yang berlaku bagi akreditasi rumah sakit. 3. Melakukan pemenuhan kapasitas Pokja demi menjaga mutu kesehatan.



Peserta Kegiatan	• Peserta Pelatihan termasuk Anggota Pokja Papua Sehat (drg. Rosaline Novita Irianna Krimadi, MPH., SpPM) • Kemenkes • dst
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Harmonisasi Evaluasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	• Penetapan regulasi sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit. • Pelatihan melaksanakan survey terhadap standar akreditasi Rumah Sakit. • Penilaian validitas hasil akreditasi Rumah sakit terhadap regulasi yang ada.
Hasil Kegiatan	4. Dokumentasi Kegiatan 5. Laporan Kegiatan 6. Sertifikat Surveyor Akreditasi
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. Pelaksanaan Akreditasi fasilitas kesehatan sebaiknya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan standar yang sesuai. 2. Pelaksanaan akreditasi yang dilaksanakan hanya diatas “kertas” merupakan salah satu bentuk pengabaian terhadap pelayanan yang berkualitas sehingga perlu dilaksanakan pengawasan yang ketat demi menjaga kepentingan masyarakat. 3. Pelayanan kesehatan sebaiknya memperhatikan standar untuk menjaga mutu pelayanan yang akan berdampak terhadap keselamatan pasien. Menjaga mutu merupakan kewajiban bagi pelaksana layanan kesehatan dan wajib dilaksanakan dengan sungguh-sungguh demi menghindari kejadian yang tidak diinginkan baik

	pada pasien maupun penyelenggara layanan kesehatan tersebut. Dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit program nasional merupakan hal yang wajib diperhatikan. Beberapa program nasional tersebut diantaranya adalah terkait permasalahan Stunting dan wasting serta pemberantasan penyakit menular seperti TB dan HIV yang merupakan masalah di Papua, sehingga perlu diperhatikan secara lebih ketat.
Dokumentasi	



3.2 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Cerdas

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	SHEK Tindak Lanjut Pengembangan PDD-AKNESS dan Pendidikan Vokasi di Provinsi Papua Barat Daya bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 1 Juli 2026 Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya (KM 8, Kota Sorong)

Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 3. Terwujudnya komunikasi public yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 2. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya menerima undangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya untuk melaksanakan koordinasi tindak lanjut pasca penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan Universitas Papua (UNIPA) terkait pengembangan PDD-Akademi Komunitas Negeri Sorong Selatan (PDD-AKNESS). Pertemuan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) guna memberikan arahan, masukan strategis, serta memastikan langkah-langkah tindak lanjut reaktivasi PDD-AKNESS berjalan selaras dengan RIPPP dan RAPPP.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi SHEK terhadap tindak lanjut MoU pengembangan PDD-AKNESS. • Memberikan arahan dan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya mengenai tahapan reaktivasi PDD-AKNESS.

	Memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, UNIPA, dan BPP dalam pengembangan pendidikan vokasi.
Peserta Kegiatan	- Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (Pokja Papua Cerdas: Helena Trivona Tuririday, S.Si., M.Si. dan Dea Anggie Varena, S.Kom.) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya (Kepala Dinas, Sekretaris, Jajaran terkait)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Harmonisasi Evaluasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta arahan dan rekomendasi Badan Pengarah Papua terkait langkah-langkah strategis pasca penandatanganan MoU dengan UNIPA, khususnya rencana reaktivasi PDD-AKNESS. - Pokja Papua Cerdas menyampaikan masukan dan rekomendasi mengenai tahapan yang perlu dipersiapkan, baik aspek kelembagaan, administrasi, akademik, maupun dukungan pembiayaan agar proses reaktivasi berjalan sesuai ketentuan. - Dibahas komitmen bersama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UNIPA, dan Badan Pengarah Papua dalam mengawal implementasi pengembangan pendidikan vokasi sebagai bagian

	dari pelaksanaan RIPP dan RAPP pada misi Papua Cerdas.
Hasil Kegiatan	1. Disepakati akan dilaksanakan koordinasi lanjutan bersama Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terkait penyelesaian status aset dan sarana prasarana PDD-AKNESS. 2. UNIPA akan menyiapkan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai salah satu persyaratan reaktivasi PDD-AKNESS. 3. UNIPA akan melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan dalam proses reaktivasi program studi. 4. Setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi, akan dilakukan peluncuran (launching) kembali operasional PDD-AKNESS.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. UNIPA agar segera menyusun draft PKS dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya. 2. UNIPA agar menyusun kebutuhan anggaran (RAB) untuk mendukung proses reaktivasi tahun 2026 serta operasional penyelenggaraan PDD-AKNESS pada tahun berikutnya. 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Badan Pengarah Papua melakukan SHEK berkala terhadap progres re-operasional PDD-AKNESS.
Dokumentasi	



Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Peran Aktif SHEK Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya pada Kegiatan Pembekalan Siswa Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 3 Juli 2026 Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif
IKU Pokja	Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya menerima undangan dari Dinas Pendidikan

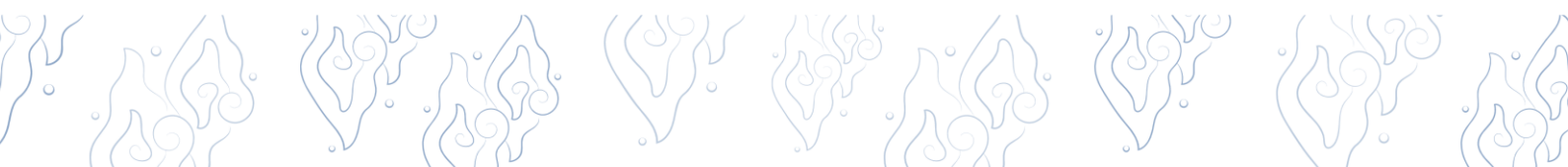
	dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya untuk menghadiri kegiatan Pembekalan Siswa Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Tahun 2026. Kehadiran BPP merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung implementasi program percepatan pembangunan sumber daya manusia Orang Asli Papua melalui sektor pendidikan.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan tugas dan fungsi SHEK terhadap pelaksanaan Program ADEM Tahun 2026. • Mengidentifikasi pelaksanaan Program ADEM beserta isu strategis yang dihadapi. • Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program ADEM.
Peserta Kegiatan	• Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (Pokja Papua Cerdas: Dea Anggie Varena, S.Kom.) • Gubernur Papua Barat Daya • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya • Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya • 90 Peserta Program ADEM Tahun 2026 • Orang tua/wali peserta • Undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Harmonisasi Evaluasi Koordinasi

Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	• Penyampaian laporan pelaksanaan Program ADEM Tahun 2026 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya. • Arahan Gubernur Papua Barat Daya mengenai pentingnya pendidikan sebagai investasi pembangunan SDM Papua serta harapan agar peserta mampu menjaga nama baik daerah selama menempuh pendidikan di luar Papua. • Penjelasan mekanisme pelaksanaan Program ADEM, proses seleksi berbasis prestasi, pembagian kuota bagi enam kabupaten/kota, serta penempatan peserta pada sekolah tujuan di Jawa Tengah, Bali, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. • Penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan Program ADEM sebagai bagian dari percepatan pembangunan Papua.
Hasil Kegiatan	1. Program ADEM Tahun 2026 di Provinsi Papua Barat Daya diikuti oleh 90 siswa, dengan pembagian kuota secara proporsional kepada 5 kabupaten dan 1 kota. 2. Seluruh peserta dinyatakan lolos melalui mekanisme seleksi berbasis prestasi akademik yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 3. Peserta akan melanjutkan pendidikan menengah di Provinsi Jawa Tengah, Bali, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. BPP memperoleh informasi dan gambaran pelaksanaan Program ADEM sebagai bahan pelaksanaan fungsi SHEK, khususnya dalam

	evaluasi pelaksanaan program peningkatan kualitas SDM Papua.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya agar terus melakukan monitoring dan pendampingan terhadap peserta Program ADEM selama masa pendidikan. 2. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap capaian peserta Program ADEM sebagai dasar penyempurnaan kebijakan afirmasi pendidikan di Papua Barat Daya. 3. BPP melalui Pokja Papua Cerdas akan terus melakukan fungsi SHEK terhadap implementasi Program ADEM sebagai bagian dari percepatan pembangunan SDM Papua sesuai RIPPP dan RAPPP.
Dokumentasi	

Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Pendampingan Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya melalui Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam rangka Rencana
----------------------	--



	Reaktivasi Pendidikan Vokasi (PDD-AKNESS) di Kabupaten Sorong Selatan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis-Sabtu, 16-18 Juli 2026 Kabupaten Sorong Selatan • SMA Negeri 1 Teminabuan • Eks Gedung PDD-AKNESS
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 3. Terwujudnya komunikasi public yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 2. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya menerima permohonan pendampingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka koordinasi lanjutan pengaktifan kembali Pendidikan Vokasi/PDD-AKNESS di Kabupaten Sorong Selatan. Pendampingan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) untuk memastikan proses reaktivasi PDD-AKNESS berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memperjelas aspek kewenangan, status aset, serta memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, UNIPA, dan instansi terkait.

Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan tugas dan fungsi SHEK dalam pendampingan re-operasional PDD-AKNESS. • Memberikan penjelasan (sebagai Narasumber) mengenai dasar hukum penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berdasarkan PP Nomor 106 Tahun 2021, serta tahapan Revitalisasi PDD-AKNESS yang telah dijalankan sesuai amanat Perpres No 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi • Mengidentifikasi permasalahan kelembagaan, aset, dan sarana prasarana persiapan re-operasional PDD-AKNESS. • Memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya mengenai langkah percepatan reaktivasi PDD-AKNESS.
Peserta Kegiatan	• Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (Pokja Papua Cerdas: Helena Trivona Tuririday, S.Si., M.Si. dan Dea Anggie Varena, S.Kom.) • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya • Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan • BPKAD Kabupaten Sorong Selatan • Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan • Kepala SMAN 1 Teminabuan
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Harmonisasi Evaluasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas

Poin-Poin Pembahasan	• Penyampaian dasar hukum re-operasional Pendidikan Vokasi/PDD-AKNESS berdasarkan PP Nomor 106 Tahun 2021, yang menegaskan kewenangan penyelenggaraan pendidikan khusus dan vokasi berada pada Pemerintah Provinsi. • Penyampaian progres tindak lanjut Disdikbud Provinsi Papua Barat Daya bersama UNIPA, termasuk keberlanjutan MoU, status kelembagaan PDD-AKNESS, dan langkah percepatan agar program tetap berjalan. • Pembahasan status aset PDD-AKNESS, termasuk bangunan yang telah dibangun sebelumnya dan kondisi lahan yang saat ini dimanfaatkan oleh Batalyon/TNI. • Pembahasan alternatif lokasi operasional sementara PDD-AKNESS dengan memanfaatkan fasilitas SMAN 1 Teminabuan. • Masukan dari Inspektorat mengenai pentingnya dasar hukum, penyusunan PKS bersama Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan sebelum pengambilan kebijakan terkait penggunaan kampus sementara di SMAN 1 Teminabuan dan rehabilitasi gedung atau sarana prasarana.
Hasil Kegiatan	1. Seluruh peserta rapat pada prinsipnya mendukung percepatan re-operasional PDD-AKNESS sebagai bagian dari percepatan pembangunan Papua Cerdas di Provinsi Papua Barat Daya. 2. Disepakati bahwa operasional sementara PDD-AKNESS direncanakan memanfaatkan fasilitas SMAN 1 Teminabuan, dengan dukungan dari pihak sekolah. 3. Disdikbud Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen melakukan rehabilitasi ruang belajar yang akan

	digunakan sebagai kampus sementara setelah mekanisme kerja sama dan aspek hukum diselesaikan. 4. Disepakati bahwa penyelesaian status aset lama PDD-AKNESS perlu dilakukan secara hati-hati sesuai ketentuan hukum dan tata kelola pemerintahan. 5. Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan menyatakan kesiapan melakukan pendampingan agar seluruh tahapan reaktivasi tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun administrasi. 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk menempatkan BPP untuk melaksanakan pendampingan re-operasional PDD-AKNESS di Kabupaten Sorong Selatan.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. Perlu koordinasi dan konsultasi dengan BPKP Perwakilan Papua Barat Daya terkait status aset PDD-AKNESS sebelum dilakukan rehabilitasi maupun pemanfaatan aset. 2. Menyiapkan Berita acara antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Kepala Daerah dan Pihak SMAN 1 Teminabuan) sebagai dasar pemanfaatan fasilitas SMAN 1 Teminabuan sebagai kampus sementara. 3. Melanjutkan koordinasi dengan UNIPA terkait penyempurnaan dokumen kelembagaan dan tahapan operasional kembali PDD-AKNESS. 4. BPP melalui Pokja Papua Cerdas berkomitmen melaksanakan fungsi SHEK dan pendampingan dalam rangka pengarahannya, pembinaan maupun

	pengawasan proses reaktivasi PDD-AKNESS hingga program dapat kembali beroperasi.
Dokumentasi	   

Kegiatan 4

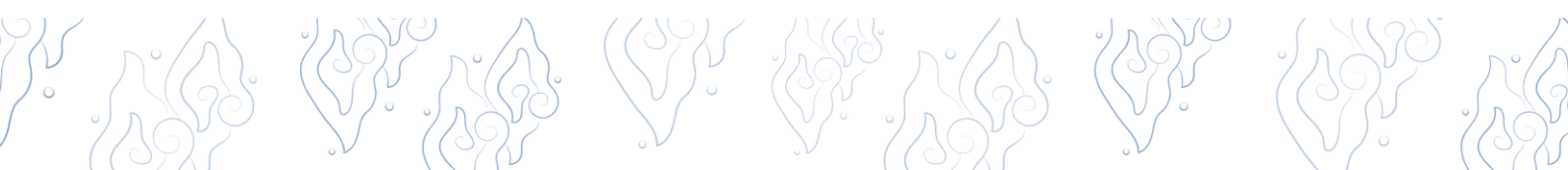
Nama Kegiatan	Peran Aktif SHEK BPP PBD pada Kegiatan Pembekalan Siswa ADIK PBD Tahun 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 21 Juli 2026 Aimas Hotel & Convention Centre, Kabupaten Sorong
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 2. Terwujudnya komunikasi public yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 2. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) merupakan salah satu kebijakan afirmatif Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua. Keberhasilan implementasi program ini memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar proses pembinaan, pembekalan, serta pelaksanaan program berjalan secara efektif. Sebagai pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025, BPP Perwakilan Provinsi

	Papua Barat Daya melalui Pokja Papua Cerdas turut mengawal pelaksanaan pembekalan Program ADIK Tahun 2026 untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai arah kebijakan percepatan pembangunan Papua, khususnya pada misi Papua Cerdas.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap pelaksanaan Program ADIK Tahun 2026 di Provinsi Papua Barat Daya. • Mendukung pembinaan implementasi Program ADIK agar berjalan efektif sesuai kebijakan pemerintah. • Mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan Program ADIK sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. • Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua melalui perluasan akses pendidikan tinggi.
Peserta Kegiatan	• Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (Anggota BPP dan Pokja Papua Cerdas: Helena Trivona Tuririday, S.Si., M.Si. dan Dea Anggie Varena, S.Kom.). • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya. • Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya • Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua Barat Daya. • Peserta Program ADIK Tahun 2026.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Harmonisasi

	Evaluasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	• Pelaksanaan pembekalan bagi peserta Program ADIK Tahun 2026. • Laporan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya mengenai gambaran pelaksanaan Program ADIK Tahun 2026 di Provinsi Papua Barat Daya, penyampaian data jumlah pendaftar dan peserta yang dinyatakan lulus Program ADIK Tahun 2026. • Arahan Anggota Badan Pengarah Papua mengenai pentingnya pemilihan program studi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Papua. • Evaluasi terhadap tingkat serapan peserta Program ADIK di Papua Barat Daya. • Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program ADIK.
Hasil Kegiatan	1. Kegiatan Pembekalan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) Tahun 2026 terlaksana dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah kabupaten/kota, peserta Program ADIK, serta Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melalui Pokja Papua Cerdas sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). 2. Disampaikan bahwa Program ADIK merupakan program afirmasi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan

	Teknologi (Kemendiktisaintek) yang dibiayai melalui APBN, sedangkan pelaksanaan pembinaan dan pembekalan peserta di tingkat Provinsi Papua Barat Daya didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus). 3. Berdasarkan data pelaksanaan Program ADIK Tahun 2026 di Provinsi Papua Barat Daya, tercatat 755 peserta mengikuti seleksi dan 249 peserta dinyatakan lulus dengan tingkat kelulusan sebesar 33 persen. Rincian jumlah pendaftar dan peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan asal daerah adalah sebagai berikut: • Kota Sorong: 123 pendaftar, 67 peserta lulus (54%). • Kabupaten Sorong Selatan: 89 pendaftar, 33 peserta lulus (37%). • Kabupaten Maybrat: 82 pendaftar, 27 peserta lulus (33%). • Kabupaten Raja Ampat: 149 pendaftar, 44 peserta lulus (30%). • Kuota Provinsi: 130 pendaftar, 34 peserta lulus (26%). • Kabupaten Tambrau: 68 pendaftar, 17 peserta lulus (25%). • Kabupaten Sorong: 114 pendaftar, 27 peserta lulus (24%). 4. Anggota Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Otto Ihalauw, M.A., menyampaikan bahwa Program ADIK harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Papua. Pemilihan program studi diharapkan
--	--

	mempertimbangkan kebutuhan daerah, terutama pada bidang-bidang yang belum tersedia di Tanah Papua, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang dapat mendukung percepatan pembangunan ketika kembali mengabdikan di daerah. 5. Dalam pelaksanaan fungsi Evaluasi, BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya mengidentifikasi bahwa tingkat serapan Program ADIK di Provinsi Papua Barat Daya masih perlu ditingkatkan. Dari total 755 peserta yang mengikuti seleksi, 249 peserta dinyatakan lulus, sehingga diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kualitas persiapan peserta, pemerataan sosialisasi program, serta penguatan pembinaan sebelum pelaksanaan seleksi. 6. BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan penyebaran informasi mengenai Program ADIK agar kesempatan yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh putra-putri Papua, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sebagai bagian dari percepatan pembangunan sumber daya manusia Papua.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melalui Pokja Papua Cerdas akan terus melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap implementasi Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) Tahun 2026 sebagai bagian dari pengawalan percepatan pembangunan sumber daya manusia Papua.



	2. BPP akan menyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program ADIK, khususnya terkait peningkatan kualitas pembinaan peserta, pemerataan sosialisasi, dan peningkatan tingkat kelulusan peserta asal Papua Barat Daya. 3. BPP mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat sosialisasi, pendampingan, dan pembinaan kepada calon peserta Program ADIK secara berkelanjutan agar kesempatan memperoleh akses pendidikan tinggi melalui jalur afirmasi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Orang Asli Papua. 4. BPP mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan Program ADIK, termasuk peningkatan kualitas persiapan akademik dan administrasi calon peserta sebelum mengikuti proses seleksi. 5. BPP merekomendasikan agar penentuan program studi (prodi) bagi penerima Program ADIK memperhatikan kebutuhan riil pembangunan Papua, dengan memprioritaskan bidang-bidang ilmu yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan di Tanah Papua, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan dapat berkontribusi secara nyata terhadap percepatan pembangunan di daerah.
--	---

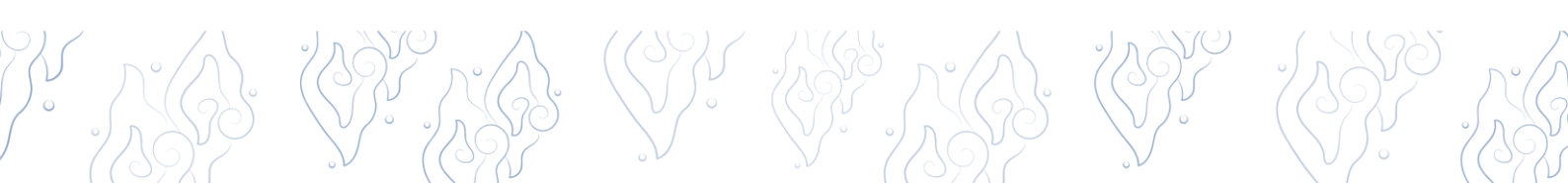
	6. BPP akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut pelaksanaan Program ADIK serta menghimpun masukan dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan dalam mendukung implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) pada misi Papua Cerdas.
Dokumentasi	 The top photograph shows four men in uniform (three in brown and one in a white shirt) engaged in a conversation. The bottom photograph shows a group of people on a stage in front of a large banner. The banner text includes: 'PAPUA BARAT DAYA', 'IN KEBUDAYAAN', 'LAN SISWA / S', 'PENDIDIKAN TI', 'KI', '2026', 'PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA', 'DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN', 'KEGIATAN PEMERIKSAAN SISWA / SOROT', 'PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI', 'KI', '2026'.



Kegiatan 5

Nama Kegiatan	Peran Aktif SHEK BPP PBD pada Kegiatan Rapat Kerja I Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis-Jum'at, 23-24 Juli 2026 Gedung SARA, Jayapura, Provinsi Papua
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 2. Terwujudnya komunikasi public yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 2. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025, Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, termasuk pada Misi Papua Cerdas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). Salah satu fokus pengawalan BPP adalah peningkatan kualitas tata kelola pendidikan sebagai

	bagian dari upaya percepatan pembangunan sumber daya manusia Papua. Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian Pokja Papua Cerdas BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya adalah penyelenggaraan pendidikan pada sekolah-sekolah swasta, khususnya yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Tanah Papua. Mengingat YPK merupakan penyelenggara pendidikan swasta terbesar di Tanah Papua dengan mayoritas peserta didik merupakan Orang Asli Papua (OAP), kualitas tata kelola yayasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian indikator pembangunan pendidikan, khususnya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai bagian dari sasaran pembangunan Papua Cerdas. Melalui pelaksanaan fungsi SHEK, Pokja Papua Cerdas BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan pengawasan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan uji petik terhadap penyelenggaraan pendidikan pada sekolah-sekolah YPK di Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat. Hasil pelaksanaan SHEK menunjukkan masih terdapat berbagai permasalahan dalam tata kelola kelembagaan, pemenuhan tenaga pendidik, manajemen penyelenggaraan pendidikan, serta keberlanjutan layanan pendidikan. Selain itu, BPP juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga, termasuk Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), sebagai bahan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan guna mendukung
--	---



	perbaikan tata kelola pendidikan swasta di Tanah Papua. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan fungsi SHEK tersebut, Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Tanah Papua mengundang Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya untuk menghadiri Rapat Kerja I Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua Tahun 2026. Kehadiran BPP pada forum ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) untuk menyampaikan hasil pengawasan dan evaluasi, memberikan rekomendasi kebijakan, serta memperkuat sinergi antara YPK, pemerintah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pendidikan dan pencapaian Misi Papua Cerdas.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua dalam pelaksanaan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap percepatan pembangunan sektor pendidikan di Tanah Papua. • Menyampaikan hasil pelaksanaan SHEK, monitoring, evaluasi, dan uji petik Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya terkait penyelenggaraan pendidikan pada sekolah-sekolah YPK di Provinsi Papua Barat Daya. • Mendukung implementasi kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, sebagai bagian dari upaya penguatan layanan pendidikan di sekolah swasta.

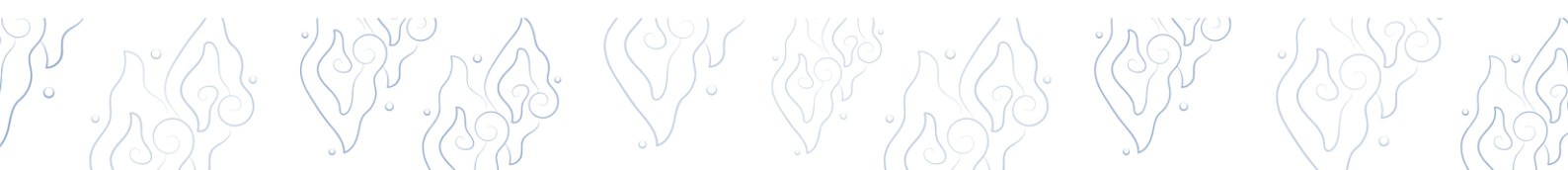
	• Memberikan masukan dan rekomendasi strategis dalam rangka penguatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan YPK guna mendukung percepatan pencapaian sasaran Papua Cerdas. • Memperkuat koordinasi dan sinergi antara Badan Pengarah Papua, Yayasan Pendidikan Kristen, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung percepatan pembangunan pendidikan di Tanah Papua.
Peserta Kegiatan	• Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (Anggota BPP dan Pokja Papua Cerdas: Helena Trivona Tuririday, S.Si., M.Si.). • Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Tanah Papua. • Sekitar 70 Ketua Klasis se-Tanah Papua. • Pemerintah Kota Jayapura. • Akademisi dan pemerhati pendidikan. • Mitra pembangunan sektor pendidikan.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Harmonisasi Evaluasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	• Revitalisasi kelembagaan Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua. • Perubahan nomenklatur Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua menjadi YPK Tanah Papua. • Hasil pendampingan dan SHEK BPP terhadap penyelenggaraan pendidikan YPK di beberapa wilayah Papua Barat Daya.

	• Strategi peningkatan mutu pendidikan dalam rangka meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). • Penguatan kemitraan YPK dengan pemerintah, UPT Kementerian, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. • Optimalisasi implementasi Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 dan redistribusi guru melalui sistem IMUT. • Pembahasan usulan penguatan dukungan pendanaan pendidikan melalui Peraturan Daerah Khusus sesuai amanat Otonomi Khusus Papua. • Pembentukan komisi-komisi kerja dan penguatan kemitraan nasional maupun internasional.
Hasil Kegiatan	1. BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melalui Pokja Papua Cerdas melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dengan mengikuti seluruh rangkaian Rapat Kerja I Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Tanah Papua serta berpartisipasi sebagai narasumber dalam sesi pembahasan strategis mengenai pembangunan pendidikan di Tanah Papua. 2. Berdasarkan hasil pendampingan dan pelaksanaan SHEK, diperoleh informasi bahwa YPK Tanah Papua mengelola lebih dari 700 satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik mencapai sekitar 100.000 siswa di Tanah Papua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa YPK merupakan salah satu lembaga pendidikan terbesar yang memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan Orang Asli Papua dan secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian indikator Rata-

	rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). 3. BPP memaparkan hasil uji petik (sampling) yang telah dilaksanakan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat sebagai bahan analisis dalam pembahasan Rapat Kerja I YPK Tanah Papua. Hasil tersebut menjadi masukan dalam penyusunan strategi peningkatan kualitas tata kelola pendidikan serta penguatan kemitraan YPK dengan berbagai pemangku kepentingan. 4. Melalui Rapat Kerja I disepakati revitalisasi organisasi dengan perubahan nomenklatur menjadi YPK Tanah Papua sebagai hasil penggabungan YPK, Yayasan Otto Geisler, dan Sekolah Tinggi Filsafat Ilmu Teologi I.S. Kijne. Revitalisasi ini memperkuat posisi YPK Tanah Papua sebagai yayasan yang mengelola pendidikan secara terpadu mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. 5. Anggota Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Otto Ihalaui, M.A., menyampaikan bahwa besarnya jumlah peserta didik yang dikelola YPK merupakan potensi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua. Oleh karena itu, YPK diharapkan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), UPT Kementerian, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan swasta lainnya guna mendukung percepatan pembangunan sektor pendidikan.
--	---

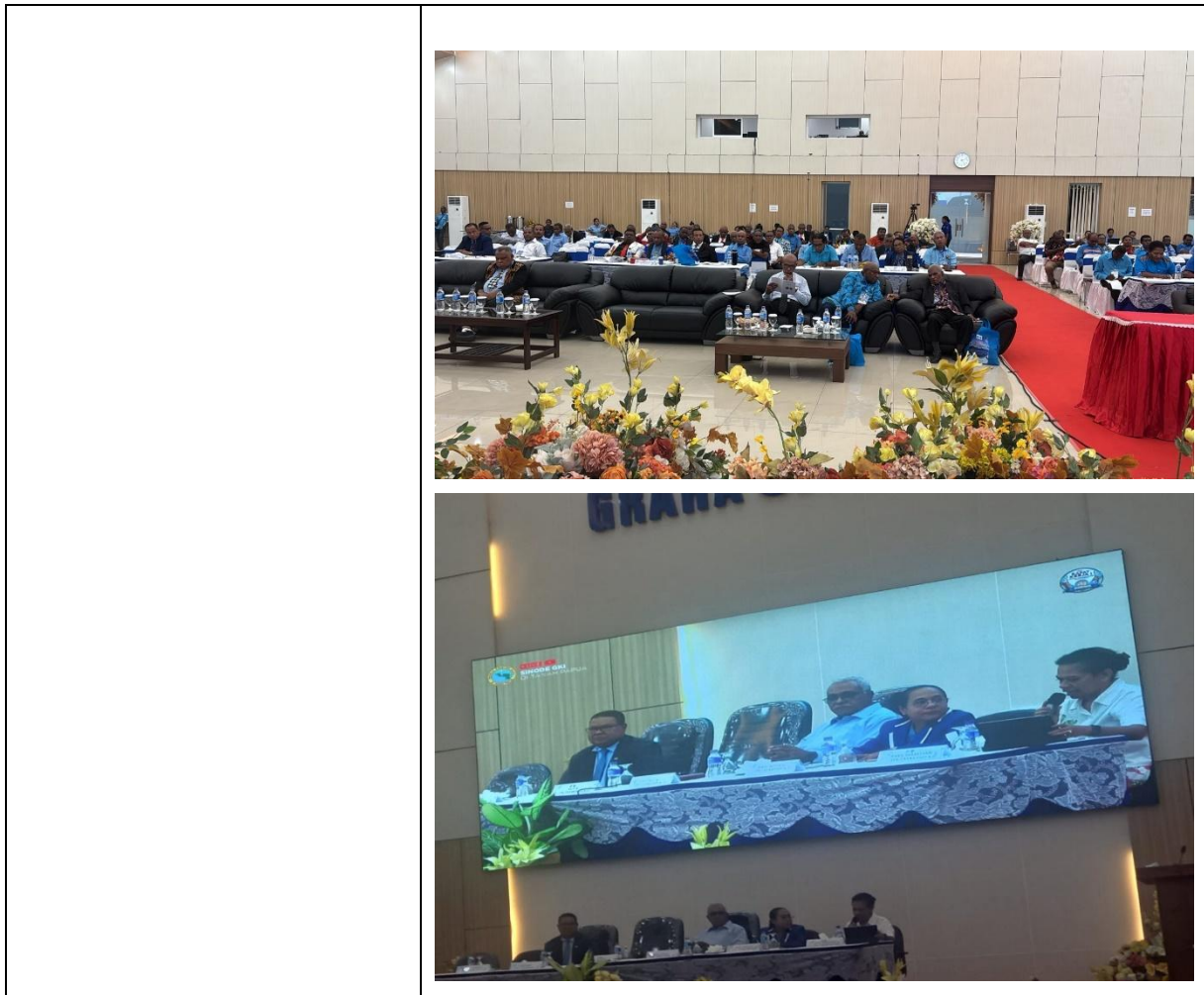
	6. Dalam arahannya, Anggota BPP juga menyampaikan bahwa BPP terus mengawal optimalisasi implementasi Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025, termasuk melalui koordinasi lintas kementerian guna mengaktifkan kembali sistem IMUT melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instrumen redistribusi guru di Tanah Papua. 7. BPP turut merekomendasikan agar YPK Tanah Papua menginisiasi usulan pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) mengenai persentase pembagian Dana Otonomi Khusus bagi masyarakat penyelenggara pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagai dasar pemberian hibah kepada yayasan penyelenggara pendidikan, khususnya yayasan pionir pendidikan di Tanah Papua. 8. Dalam sidang komisi Rapat Kerja I, Pokja Papua Cerdas BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dipercaya sebagai Sekretaris Komisi Bidang Kemitraan, yang membahas strategi pengembangan kemitraan YPK baik di tingkat nasional maupun internasional.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melalui Pokja Papua Cerdas akan terus melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mengawal pelaksanaan hasil-hasil Rapat Kerja I YPK Tanah Papua sebagai bagian dari percepatan pembangunan pada misi Papua Cerdas.

	2. BPP akan menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah berdasarkan hasil pendampingan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan YPK Tanah Papua. 3. BPP mendorong YPK Tanah Papua untuk memperkuat kemitraan dengan pemerintah, UPT Kementerian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga pendidikan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia Papua. 4. BPP akan terus mengawal optimalisasi implementasi Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025, termasuk mendorong percepatan pengaktifan sistem IMUT melalui BKN guna mendukung redistribusi guru yang lebih merata di Tanah Papua. 5. BPP merekomendasikan kepada YPK Tanah Papua untuk menginisiasi penyusunan usulan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) mengenai pengalokasian Dana Otonomi Khusus bagi masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, sebagai landasan penguatan dukungan pembiayaan bagi yayasan penyelenggara pendidikan di Tanah Papua. 6. BPP akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi hasil-hasil Rapat Kerja I YPK Tanah Papua sebagai bahan penyusunan rekomendasi dalam mendukung pelaksanaan RIPP dan RAPPP pada misi Papua Cerdas.
--	---



Dokumentasi





Kegiatan 6

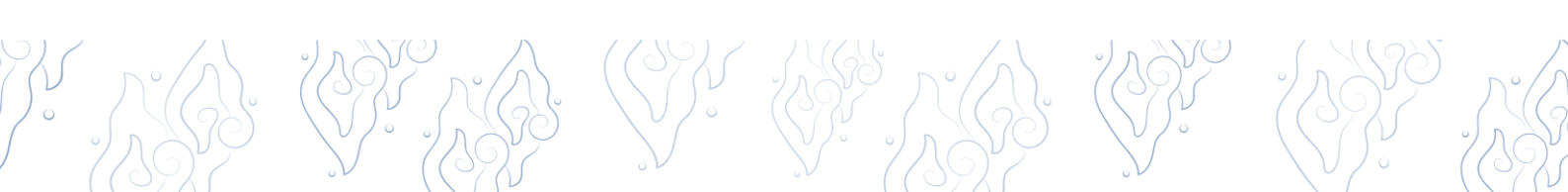
Nama Kegiatan	SHEK Virtual bersama LLDIKTI terkait Pengelolaan Akademi Komunitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 29 Juli 2026 Daring (Zoom Meetings)
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 3. Terwujudnya komunikasi public yang efektif

IKU Pokja	1. Indeks rata-rata Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan 2. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 3. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua mengamanatkan pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tanah Papua, termasuk di bidang pendidikan. Dalam ketentuan tersebut, pengelolaan pendidikan dasar dan menengah telah diatur secara jelas, yaitu pengelolaan SD, SMP, SMA/K menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota., sedangkan mengamanatkan bahwa Akademi Komunitas dikelola oleh Pemerintah Provinsi di Tanah Papua. Secara normatif, penggunaan frasa "pengelolaan" menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana pengaturan kewenangan pengelolaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun demikian, implementasi amanat tersebut hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala karena belum tersedia regulasi teknis yang mengatur mekanisme penyelenggaraan Akademi Komunitas yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

	Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan dalam implementasi, antara lain terkait mekanisme pendirian, penyelenggaraan program studi, kurikulum, pengelolaan dosen, pemberian gelar akademik, hingga sistem pembinaan dan pengawasan Akademi Komunitas. Oleh karena itu, Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama LLDIKTI Wilayah XIV untuk memperoleh penjelasan mengenai aspek regulasi, pembagian kewenangan, serta langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh dalam percepatan implementasi amanat PP Nomor 106 Tahun 2021 terkait penyelenggaraan Akademi Komunitas di Tanah Papua.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam rangka memperoleh informasi, klarifikasi, dan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 terkait pengelolaan Akademi Komunitas di Tanah Papua. • Memperoleh penjelasan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV mengenai implementasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 terkait pengelolaan dan penyelenggaraan Akademi Komunitas di Tanah Papua. • Mengidentifikasi permasalahan, kendala regulasi, serta pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, dan LLDIKTI dalam penyelenggaraan Akademi Komunitas.

	Menghimpun masukan sebagai bahan penyusunan rekomendasi Badan Pengarah Papua dalam rangka percepatan implementasi amanat PP Nomor 106 Tahun 2021, khususnya pengembangan Akademi Komunitas di Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	- Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya (Anggota BPP dan Pokja Papua Cerdas: Helena Trivona Tuririday, S.Si., M.Si. & Dea Anggie Varena, S.Kom.) - Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat - Ketua dan Tim LLDIKTI Wilayah XIV - Dr Jems Modouw- Tim Ahli SKALA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya (Sie Akademi Komunitas)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Harmonisasi Evaluasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	- Disampaikan bahwa frasa "pengelolaan Akademi Komunitas" sebagaimana diatur dalam PP Nomor 106 Tahun 2021 masih memerlukan penafsiran dan penjabaran lebih lanjut, khususnya mengenai batas kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola pendidikan tinggi. - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya maupun Papua Selatan telah berencana mengajukan izin operasional Akademi Komunitas, namun masih memerlukan kepastian hukum mengenai mekanisme penyelenggaraannya.

	• Ketua LLDIKTI Wilayah XIV menjelaskan bahwa LLDIKTI merupakan perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam melaksanakan pelayanan pendidikan tinggi di daerah, termasuk memproses pendirian perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, pembukaan program studi baru, serta pembinaan perguruan tinggi lainnya yang berada di bawah koordinasi kementerian. • Akademi Komunitas yang diamanatkan dalam PP Nomor 106 Tahun 2021 (dikelola Pemerintah Daerah), tidak termasuk dalam tiga bentuk pengelolaan Perguruan Tinggi yang ada, yaitu: • Perguruan Tinggi Negeri (PTN); • Perguruan Tinggi Swasta (PTS); dan • Perguruan Tinggi Kementerian lain (PTKL). • Sementara Akademi Komunitas yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 106 Tahun 2021 belum memiliki landasan regulasi teknis yang mengatur penyelenggaraannya. • LLDIKTI menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat regulasi turunan, baik berupa Peraturan Menteri maupun kebijakan teknis lainnya, yang mengatur pengelolaan Akademi Komunitas berdasarkan PP Nomor 106 Tahun 2021. Akibatnya, belum terdapat acuan mengenai: • Tata kelola pengelolaan Akademi Komunitas oleh Pemerintah Daerah (termasuk pengembangan program studi, kurikulum, pemberian gelar akademik, pengelolaan dosen, Nomor Induk Dosen (NID), jabatan fungsional
--	--

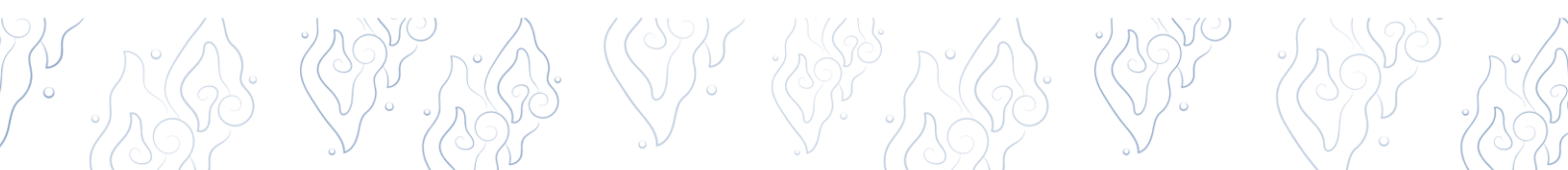


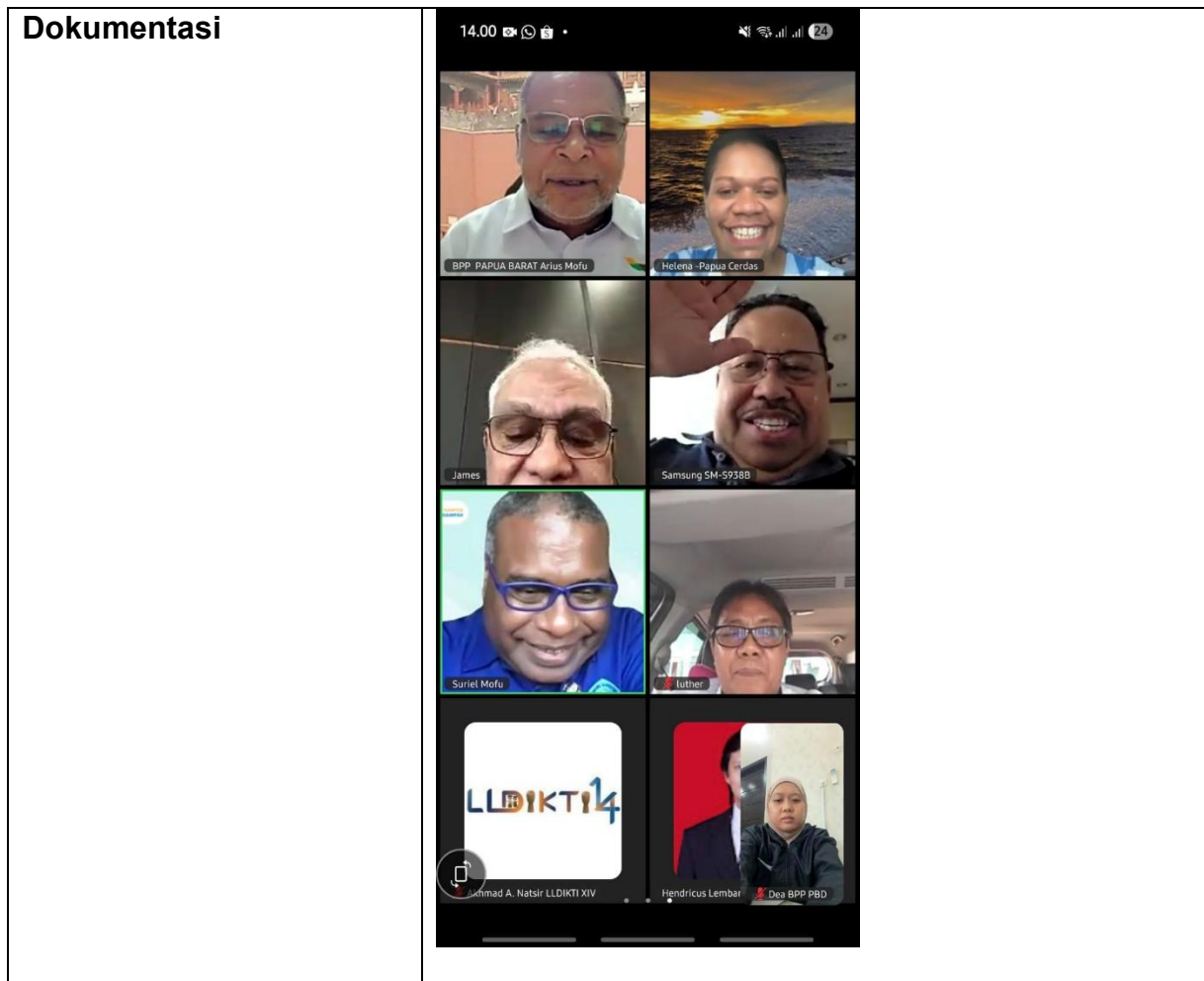
	dosen, maupun mekanisme pembinaan akademik); • Karena tidak mungkin Pemerintah Daerah yang akan menjalankan itu semua. • LLDIKTI menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan merupakan kewenangan yang dapat diselesaikan pada tingkat LLDIKTI maupun Pemerintah Daerah, melainkan memerlukan kebijakan pada tingkat kementerian, khususnya melalui koordinasi antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan Kementerian Dalam Negeri, serta apabila diperlukan melibatkan kementerian terkait lainnya. • LLDIKTI memberi saran agar dokumen pendirian maupun penggunaan anggaran daerah untuk pendirian Akademi Komunitas sebaiknya jangan dulu dilakukan secara penuh sebelum terdapat landasan hukum yang jelas, agar tidak menimbulkan kendala pada tahap implementasi. • Dalam diskusi, Anggota Pokja Papua Cerdas BPP Papua Barat mengangkat pertanyaan mengenai keberlakuan Permendikbud Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pendirian Akademi Komunitas. Ketua LLDIKTI menjelaskan bahwa regulasi tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi Akademi Komunitas yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana amanat PP Nomor 106 Tahun 2021 karena ruang lingkup pengaturannya berbeda. • Anggota Pokja Papua Cerdas BPP Papua Barat Daya menyampaikan bahwa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan berbagai persiapan, termasuk koordinasi dengan Universitas Papua (UNIPA),
--	--

	penyiapan dokumen, identifikasi aset, serta dukungan penganggaran revitalisasi PDD-AKNESS. Namun demikian, LLDIKTI menyarankan agar proses tersebut tidak dilanjutkan terlebih dahulu sampai terdapat regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Akademi Komunitas. • BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan bahwa permasalahan implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan Akademi Komunitas berdasarkan PP Nomor 106 Tahun 2021 merupakan isu strategis yang memerlukan penyelesaian di tingkat nasional. Oleh karena itu, BPP Papua Barat Daya merekomendasikan agar isu tersebut diusulkan dalam Rapat Pleno Badan Pengarah Papua di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2026, melalui Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, sehingga Sekretariat Wakil Presiden dapat memfasilitasi rapat koordinasi lanjutan dengan menghadirkan kementerian/lembaga terkait, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Dalam Negeri, guna membahas dan merumuskan regulasi sebagai tindak lanjut implementasi amanat PP Nomor 106 Tahun 2021. Upaya ini diharapkan dapat mengikuti pola penyelesaian isu strategis sebelumnya, yaitu permasalahan kekosongan guru pada sekolah swasta sebagai dampak rekrutmen PPPK Guru, yang difasilitasi oleh Sekretariat Wakil Presiden dan menghasilkan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN.
--	--

Hasil Kegiatan	1. Diperoleh pemahaman bahwa implementasi pengelolaan Akademi Komunitas sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 106 Tahun 2021 belum dapat dilaksanakan secara optimal karena belum tersedia regulasi teknis sebagai dasar operasional. 2. LLDIKTI Wilayah XIV pada prinsipnya mendukung penyelenggaraan Akademi Komunitas di Tanah Papua, namun belum dapat memproses usulan pendirian maupun memberikan rekomendasi sebelum terdapat landasan hukum yang mengatur mekanisme penyelenggaraannya. 3. Permasalahan penyelenggaraan Akademi Komunitas memerlukan penyelesaian pada tingkat nasional melalui penyusunan regulasi bersama antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga terdapat kejelasan mengenai pembagian kewenangan Pemerintah Daerah, LLDIKTI, serta kementerian terkait. 4. BPP dipandang memiliki peran strategis untuk mengawal percepatan penyelesaian regulasi dimaksud melalui koordinasi dengan kementerian terkait, mengingat isu tersebut merupakan amanat pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. 5. BPP Papua Barat Daya melalui Pokja Cerdas, Ibu Helena Tuririday mengusulkan agar isu pengelolaan Akademi Komunitas berdasarkan PP Nomor 106 Tahun 2021 diangkat sebagai salah satu isu strategis dalam Rapat Pleno Badan Pengarah Papua tanggal 30 Juli 2026, dengan harapan Sekretariat Wakil Presiden dapat memfasilitasi koordinasi lintas
------------------------------	--

	kementerian/lembaga guna mempercepat penyusunan regulasi yang menjadi dasar implementasi pengelolaan Akademi Komunitas di Tanah Papua.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. BPP akan menyampaikan isu strategis pengelolaan Akademi Komunitas berdasarkan amanat PP Nomor 106 Tahun 2021 sebagai salah satu bahan pembahasan dalam Rapat Pleno/pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Badan Pengarah Papua, serta mendorong Sekretariat Wakil Presiden untuk memfasilitasi rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka percepatan penyusunan regulasi pelaksanaan pengelolaan Akademi Komunitas di Tanah Papua. 2. BPP akan mengawal pembahasan penyusunan regulasi turunan sebagai tindak lanjut implementasi PP Nomor 106 Tahun 2021 melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, serta kementerian/lembaga terkait. 3. Pemerintah Daerah diharapkan tetap melakukan persiapan konseptual dan koordinasi lintas instansi, namun menunda proses pendirian secara formal hingga diterbitkannya regulasi teknis yang mengatur penyelenggaraan Akademi Komunitas sesuai amanat PP Nomor 106 Tahun 2021.





3.3 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Produktif

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	SHEK BPP PBD bersama DPMPTSP Provinsi Papua Bara Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 2 Juli 2026 Kantor DPMPTSP PBD
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output
IKU Pokja	1. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Peningkatan nilai investasi merupakan salah satu strategi utama dalam mewujudkan Misi Papua

	Produktif sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Investasi yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, mengurangi angka pengangguran, serta menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya. Papua Barat Daya memiliki potensi investasi yang besar pada sektor pariwisata, perikanan, pertanian, kehutanan, energi, jasa logistik, dan industri pengolahan. Namun demikian, sebagian besar peluang investasi tersebut belum dikemas dalam bentuk dokumen proyek yang siap ditawarkan kepada investor. Kondisi ini menyebabkan informasi investasi masih tersebar, belum terstandarisasi, serta belum didukung dengan data teknis maupun pra-studi kelayakan (Pre-Feasibility Study). Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP/PTSP) Provinsi Papua Barat Daya memiliki peran strategis sebagai inisiator, kurator, dan fasilitator utama dalam penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO). Dokumen IPRO menjadi instrumen promosi investasi yang memuat informasi komprehensif mengenai potensi proyek, aspek legalitas, kesiapan lahan, infrastruktur pendukung, analisis pasar, hingga proyeksi investasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan calon investor. Melalui kegiatan ini diharapkan tersedia daftar proyek investasi unggulan yang siap dipromosikan pada forum investasi tingkat nasional maupun internasional.
--	--

Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Mendukung DPMPTSP Papua Barat Daya dalam penyusunan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO). • Mengidentifikasi sektor dan proyek investasi prioritas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. • Mendorong penyediaan data investasi yang terintegrasi, akurat, dan memenuhi kebutuhan calon investor. • Mengharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan investasi. • Memperkuat koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dunia usaha, akademisi, dan mitra pembangunan. • Mendukung peningkatan investasi sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan di Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	• BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (Anggota Pokja Papua Produktif) • Sekertaris DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	Dalam kegiatan ini dibahas beberapa agenda strategis, antara lain: • Gambaran kondisi investasi dan perkembangan realisasi investasi di Papua Barat Daya. • Identifikasi sektor investasi unggulan yang memiliki daya saing tinggi. • Penentuan proyek prioritas yang layak dikembangkan menjadi IPRO.

	• Standar penyusunan dokumen IPRO sesuai pedoman Kementerian Investasi/BKPM. • Penyusunan data teknis proyek meliputi: lokasi proyek; status lahan; potensi pasar; kebutuhan investasi; estimasi manfaat ekonomi; analisis risiko; dukungan infrastruktur; aspek lingkungan; dan regulasi pendukung. • Kebutuhan penyusunan Pre-Feasibility Study (Pre-FS) untuk setiap proyek prioritas. • Strategi promosi investasi melalui forum investasi, business matching, dan platform digital. • Pembagian tugas antar OPD dalam penyediaan data proyek investasi.
Hasil Kegiatan	1. Terbangunnya kesepahaman bahwa penyusunan IPRO menjadi prioritas penguatan promosi investasi daerah. 2. Disepakati perlunya pembentukan Tim Penyusun Dokumen IPRO yang melibatkan OPD teknis, akademisi, Bappeda, dan pemangku kepentingan lainnya. 3. Teridentifikasi sejumlah sektor investasi potensial yang akan diprioritaskan dalam penyusunan IPRO. 4. Tersusunnya rencana pengumpulan data teknis dan ekonomi untuk setiap proyek investasi prioritas. 5. Disepakati penggunaan format IPRO yang mengacu pada standar nasional sehingga mudah dipromosikan kepada investor. 6. Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam penyediaan data investasi daerah.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. DPMPTSP segera membentuk Tim Penyusun Dokumen IPRO Provinsi Papua Barat Daya.

	2. Melaksanakan inventarisasi seluruh potensi investasi prioritas pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 3. Menyusun Pre-Feasibility Study untuk proyek-proyek unggulan. 4. Mengembangkan basis data investasi daerah yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala. 5. Menyusun materi promosi investasi dalam bentuk Investment Profile, Project Profile, dan IPRO Book. 6. Melaksanakan business matching dan forum investasi bersama Kementerian Investasi/BKPM, KADIN, serta calon investor. 7. Mengintegrasikan hasil penyusunan IPRO ke dalam strategi pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian dari implementasi Papua Produktif.
Dokumentasi	 

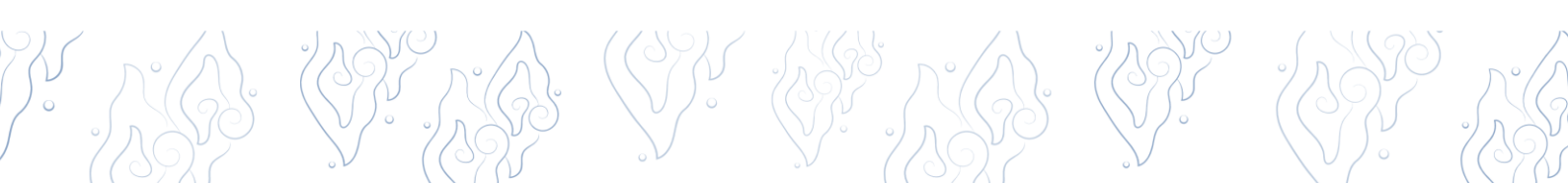
Kegiatan 2

Nama Kegiatan	SHEK BPP PBD bersama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 7 Juli 2026 Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua
Latar Belakang	Forum Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) diperlukan sebagai instrumen tata kelola untuk memastikan seluruh program pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua berjalan secara terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga keuangan, BUMN/BUMD, dunia usaha, dan masyarakat adat. Dalam PP 107 Tahun 2021, percepatan pembangunan Papua dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, tata kelola yang partisipatif, serta keberpihakan kepada Orang Asli Papua. Analisis Penyebab Dilaksanakannya SHEK: <i>“Rendahnya akses Mama-Mama OAP terhadap permodalan formal”</i>

	Permasalahan utama adalah: • belum memenuhi persyaratan administrasi perbankan; • tidak memiliki agunan; • usaha masih bersifat informal; • belum memiliki pencatatan keuangan; • literasi keuangan masih rendah. Akibatnya, sebagian besar pelaku usaha perempuan OAP belum dapat mengakses pembiayaan melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan formal. SHEK diperlukan untuk: • mengidentifikasi penyebab terjadinya demo selama 3 hari (Rabu, 1 Juli 2026, hingga Jumat, 3 Juli 2026) yang melibatkan Mama-Mama OAP terkait penyaluran bantuan • mendiskusikan kendala dan hambatan pemberian bantuan modal usaha bagi Mama-Mama OAP;
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Terjadinya proses penyaluran bantuan secara baik dan benar kepada para pihak yang benar membutuhkannya, sehingga menciptakan peluang kerja dan menurunkan Tingkat kemiskinan di kalangan OAP
Peserta Kegiatan	• BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (Anggota Pokja Papua Produktif) • Sekertaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Evaluasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif

Poin-Poin Pembahasan	1. Rendahnya akses Mama-Mama OAP terhadap permodalan formal Permasalahan utama adalah: • belum memenuhi persyaratan administrasi perbankan; • tidak memiliki agunan; • usaha masih bersifat informal; • belum memiliki pencatatan keuangan; • literasi keuangan masih rendah. Akibatnya, sebagian besar pelaku usaha perempuan OAP belum dapat mengakses pembiayaan melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan formal. 2. Program bantuan modal bagi Mama-mama OAP dalam bentuk Hibah masih berjalan sendiri-sendiri antara Kabupaten/Kota dan Provinsi di Papua Barat Daya Sebab masing-masing memiliki: • sasaran berbeda; • mekanisme berbeda; • indikator berbeda; • database berbeda. Akibatnya terjadi: • penerima ganda; • sebagian wilayah tidak tersentuh; • bantuan tidak berkelanjutan. 3. Belum adanya database tunggal Mama-Mama OAP
------------------------------------	---

	Banyak OPD menggunakan data berbeda antara Kabupaten Kota dan Provinsi di Papua Barat Daya. Misalnya pada OPD: • Dinas Koperasi • Dinas Perindustrian • Dinas Perdagangan • Dinas Sosial • Dinas Pemberdayaan Perempuan • Bank Papua • Ormas Masyarakat Karena menggunakan basis data yang berbeda Akibatnya: • validitas rendah; • sasaran kurang tepat; • monitoring sulit dilakukan. 4. Rendahnya keberlanjutan bantuan modal Banyak bantuan hanya diberikan sekali. Tidak disertai: • pelatihan usaha; • pendampingan; • akses pasar; • digitalisasi usaha; • pembinaan koperasi. Akibatnya: • usaha tidak berkembang; • modal habis untuk konsumsi; • tingkat keberhasilan rendah.
--	---

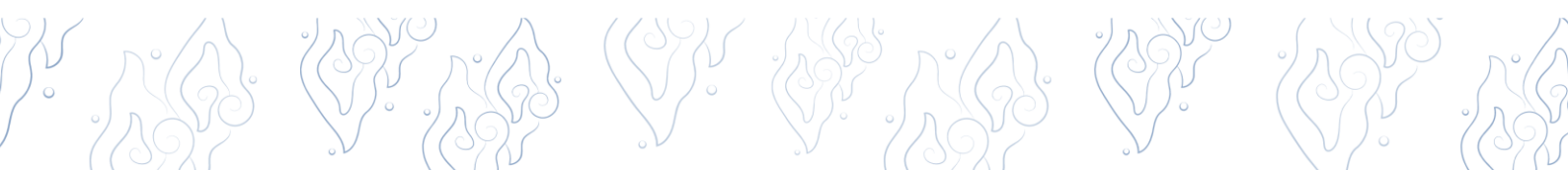


Hasil Kegiatan	1. Menyamakan skema bantuan modal lewat dana HIBAH Gubernur. 2. Terjadinya kesempahaman untuk mendorong agar terjadi mengharmonisasikan seluruh data – data penerima manfaat dari program bantuan modal bagi Mama-Mama OAP. 3. Adanya kesepahaman bahwa diperlukan adanya dashboard secara real time secara online untuk menjadi acuan single data pelaku usaha OAP untuk mempermudah proses pengusulan dan pengawasan bantuan hibah permodalan. 4. Ditemykan bahwa tidak adanya mekanisme pengawasan dan pembinaan lanjut atas hasil permodalan bagi mama-mama OAP.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. Mengusulkan pembuatan Dashboard Pemberdayaan Ekonomi Mama-Mama OAP lintas pemerintah daerah se Provinsi Papua Barat Daya. 2. Mengusulkan adanya kegiatan Program prioritas Strategis Bersama bagi kegiatan permodalan bagi Mama- Mama OAP antara pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Barat Daya agar tidak terjadi tumpang tindih data penerima dan bisa saling melengkapi dalam aspek pembiayaan. 3. Mengusulkan pertemuan lanjutan untuk melakukan koordinasi rutin. 4. Menyusun Indeks Kemandirian Ekonomi Mama-Mama OAP sebagai indikator evaluasi keberhasilan program. 5. Mengusulkan adanya sistem pemantauan berbasis data penerima bantuan secara terpadu dan online untuk memastikan bantuan modal diikuti dengan pendampingan, peningkatan kapasitas, dan akses pasar dan tidak terjadi dobel pemberian kredit.

Dokumentasi**Kegiatan 3**

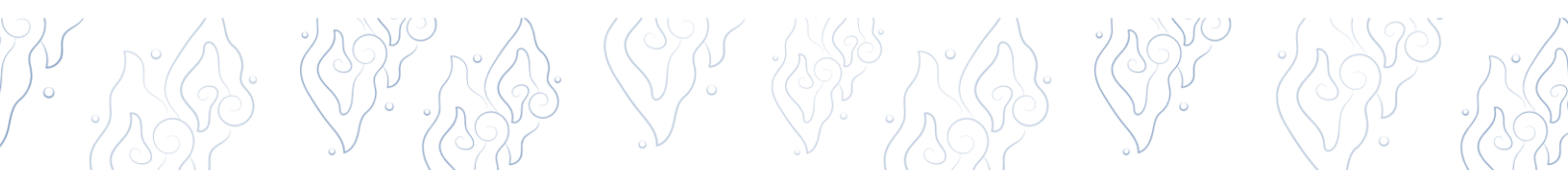
Nama Kegiatan	SHEK BPP PBD terkait Potensi Pengembangan Sagu (Gubernur PBD dan Prof. Dr. H. MH Bintoro IPB)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 10 Juli 2026 Kantor Gubernur PBD
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output
IKU Pokja	1. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua
Latar Belakang	Sagu merupakan salah satu komoditas pangan lokal strategis yang memiliki nilai historis, sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat adat di Tanah Papua, termasuk di Provinsi Papua Barat Daya. Selain

	menjadi sumber pangan pokok, sagu memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bahan baku industri pangan, energi terbarukan, pakan ternak, hingga produk bernilai tambah lainnya. Papua Barat Daya memiliki hamparan hutan sagu yang cukup luas, terutama di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Tambrauw, dan Raja Ampat. Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain pengelolaan yang masih tradisional, keterbatasan teknologi pengolahan, minimnya hilirisasi industri, akses pasar yang belum optimal, serta belum terintegrasinya kebijakan pengembangan sagu antar pemangku kepentingan. Dalam kerangka Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua dan implementasi Misi Papua Produktif, pengembangan komoditas sagu diarahkan sebagai salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi masyarakat adat, serta mendorong investasi berbasis potensi unggulan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sentra sagu, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, serta masyarakat adat dalam menyusun langkah strategis pengembangan ekosistem sagu secara berkelanjutan dari hulu hingga hilir.
--	--



Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Mendorong percepatan pengembangan komoditas sagu sebagai salah satu program prioritas Papua Produktif. • Mengidentifikasi potensi, tantangan, dan peluang pengembangan sagu di Papua Barat Daya. • Memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan masyarakat adat dalam pengembangan sagu. • Merumuskan strategi pengelolaan sagu secara berkelanjutan mulai dari budidaya, pengolahan, hingga pemasaran. • Mendorong peningkatan investasi dan hilirisasi industri berbasis sagu. • Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Peserta Kegiatan	• BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (Anggota BPP dan Anggota Pokja Papua Produktif: Herman Wafom Tubur, S.P., M.Si.) • Prof. Dr. H. MH Bintoro IPB • Gubernur Papua Barat Daya dan Jajaran
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	• Gambaran potensi sumber daya sagu di Provinsi Papua Barat Daya. • Inventarisasi kawasan sentra produksi sagu beserta kondisi eksisting. • Peluang pengembangan industri hilir berbasis sagu. • Penguatan kelembagaan petani dan kelompok pengelola sagu.

	• Peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam inovasi teknologi pengolahan sagu. • Peluang investasi dan kemitraan dengan sektor swasta. • Perlindungan kawasan hutan sagu sebagai bagian dari upaya konservasi dan ketahanan pangan. • Strategi pemasaran produk olahan sagu pada pasar lokal, nasional, dan internasional. • Penyusunan roadmap pengembangan sagu sebagai komoditas unggulan Papua Barat Daya. • Sinkronisasi program pemerintah provinsi dan kabupaten sentra sagu dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis sagu.
Hasil Kegiatan	1. Terbangunnya komitmen bersama untuk menjadikan sagu sebagai salah satu komoditas prioritas dalam implementasi Misi Papua Produktif. 2. Teridentifikasinya wilayah sentra sagu beserta potensi pengembangan ekonomi berbasis sagu. 3. Disepakatinya perlunya penyusunan Roadmap Pengembangan Sagu Papua Barat Daya yang terintegrasi. 4. Meningkatnya koordinasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan sagu. 5. Teridentifikasinya peluang pengembangan industri pengolahan sagu serta investasi berbasis sumber daya lokal. 6. Disepakatinya penguatan pendampingan kepada kelompok masyarakat adat dan pelaku usaha pengolahan sagu untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk.



Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. Menyusun Roadmap Pengembangan Sagu Provinsi Papua Barat Daya sebagai acuan pembangunan lintas sektor. 2. Melakukan pemetaan potensi dan kawasan sentra sagu secara komprehensif berbasis data spasial. 3. Mengembangkan pusat inovasi dan riset sagu melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian. 4. Mendorong pembangunan industri pengolahan sagu skala kecil, menengah, dan besar untuk meningkatkan nilai tambah produk. 5. Memfasilitasi akses pembiayaan, investasi, dan kemitraan bagi pelaku usaha sagu. 6. Melaksanakan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas masyarakat adat dalam budidaya, pengolahan, dan pemasaran produk sagu. 7. Mengintegrasikan pengembangan sagu ke dalam program ketahanan pangan, ekonomi hijau, dan pemberdayaan masyarakat adat di Papua Barat Daya.
Dokumentasi	 A photograph showing a group of people, including men and women, seated around a long wooden conference table in a meeting room. They appear to be engaged in a discussion or meeting. In the background, a banner reads "MEDIA CENTRE PROVINSI PAPUA BARAT DAYA". A timestamp "10.36" is visible in the bottom right corner of the photo.



Kegiatan 4

Nama Kegiatan	SHEK BPP PBD bersama Pihak CV Anugrah Bahari Kendari terkait Ekspor Hasil Perikanan melalui Jalur Udara
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 20 Juli 2026 Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terwujudnya Komunikasi Publik yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Provinsi Papua Barat Daya memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar, khususnya komoditas unggulan seperti tenggiri, kerapu, tuna, kakap merah, udang, dan produk olahan kelor yang telah memasuki pasar domestik maupun internasional. Potensi tersebut merupakan salah satu penggerak utama Misi Papua Produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan peningkatan kesejahteraan

	masyarakat, khususnya nelayan, pelaku UMKM, dan eksportir Orang Asli Papua (OAP). Dalam rangka mendukung pengembangan ekspor, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Bea Cukai telah melaksanakan pembukaan ekspor perdana dari Papua Barat Daya. Namun demikian, hasil koordinasi dengan pelaku usaha menunjukkan masih terdapat berbagai kendala yang menghambat peningkatan daya saing ekspor, antara lain keterbatasan kapasitas kargo udara, tingginya tarif angkutan udara, belum optimalnya pemanfaatan aset pemerintah, keterbatasan gudang penyimpanan berpendingin (cold storage), keterbatasan kontainer berpendingin (reefer container), serta pembatasan wilayah penangkapan ikan. Hal ini menyebabkan adanya keluhan yang disampaikan kepada para pihak terkait tentang hal dimaksud oleh CV Bahari Anugrah Kendari, selaku eksportir perikanan di Papua Barat Daya, sesuai surat yang dikirimkan pada tanggal, Sebagai pelaksana fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi, BP3OKP perlu mengidentifikasi berbagai hambatan tersebut untuk menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan sesuai arah Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Mengidentifikasi potensi ekspor hasil perikanan Papua Barat Daya. • Menginventarisasi hambatan logistik, transportasi, dan infrastruktur ekspor.

	• Melakukan sinkronisasi program pemerintah daerah dengan kebutuhan pelaku usaha ekspor. • Mengharmonisasikan dukungan lintas sektor dalam pengembangan ekspor daerah. • Mengevaluasi efektivitas sistem logistik ekspor saat ini. • Membangun koordinasi antarinstansi guna meningkatkan daya saing ekspor hasil perikanan Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	• Pokja Papua Produktif BPP PBD • Hemayudin (CV. Angurah Bahari Kendari), Cabang Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	• Pelaksanaan ekspor perdana dari Papua Barat Daya. • Potensi pengembangan ekspor hasil perikanan. • Tingginya biaya logistik udara. • Keterbatasan kapasitas kargo. • Pemanfaatan aset pemerintah sebagai gudang logistik. • Pengembangan cold storage. • Penyediaan reefer container. • Pelayanan sertifikasi mutu (HACCP dan BPMHKP). • Pengembangan pasar ekspor ke Jepang, Singapura, Malaysia, dan Eropa. • Dampak pembatasan wilayah tangkap terhadap produksi nelayan. • Dukungan maskapai terhadap tarif kargo ekspor. • Penguatan koordinasi lintas instansi.

Hal ini dirincikan dalam diskusi terkait poin–poin SHEK sebagai berikut:

A. Sinkronisasi

Dalam pelaksanaan fungsi sinkronisasi, BP3OKP mengidentifikasi kebutuhan pelaku usaha dengan berbagai program pemerintah, antara lain:

- sinkronisasi kebutuhan peningkatan kapasitas angkutan kargo udara;
- sinkronisasi pemanfaatan aset pemerintah yang belum produktif sebagai gudang logistik;
- sinkronisasi pengembangan fasilitas cold storage dan pusat distribusi hasil perikanan;
- sinkronisasi pengembangan ekspor menuju Singapura, Malaysia, Jepang, dan Eropa.

B. Harmonisasi

Pelaksanaan harmonisasi dilakukan melalui penyelarasan peran antarinstansi, meliputi:

- koordinasi antara Bea Cukai, BPMHKP, Karantina Ikan, dan Dinas Perikanan dalam pelayanan ekspor;
- harmonisasi pelayanan sertifikasi mutu dan HACCP bagi komoditas ekspor;
- penyelarasan kebijakan logistik antara pemerintah daerah dan maskapai penerbangan;
- harmonisasi pemanfaatan aset pemerintah sebagai fasilitas pendukung ekspor.

C. Evaluasi

1. Potensi Ekspor

	Komoditas yang telah dan berpotensi diekspor meliputi: • Tenggiri • Kerapu • Tuna • Kakap Merah • Udang • Produk olahan kelor Negara tujuan ekspor: • Singapura • Malaysia • Jepang • Rencana pengembangan ke negara-negara Eropa 2. Kondisi Produksi Hasil koordinasi menunjukkan: • produksi kerapu dan tenggiri mencapai sekitar 300–500 kg per hari; • distribusi tuna, kakap merah, dan kerapu menuju Surabaya dan Jakarta sebelum diekspor; • rencana ekspor tuna beku (frozen tuna) ke Eropa; • ekspor udang ke Jepang dilakukan melalui jalur laut sekitar satu kontainer setiap bulan; • kapasitas ekspor diperkirakan mencapai sekitar 15 ton × 3 kontainer per bulan untuk beberapa komoditas. 3. Kendala Logistik Evaluasi menunjukkan beberapa hambatan utama: • kapasitas kargo udara sangat terbatas;
--	--

- terjadi overload sehingga pengiriman sering tertunda 2–3 kali;
- tersedia 2 penerbangan, yakni lion dan garuda untuk penerbangan menuju Singapura; Dimana yang mengirim tepat waktu di Singapura adalah kargo garuda
- pesawat yang digunakan bukan pesawat kargo khusus, tetapi menggunakan kargo dari pesawat penumpang;
- tarif kargo meningkat dari sekitar **Rp29.000/kg menjadi Rp40.000/kg** dalam dua tahun terakhir;
- kenaikan biaya logistik tidak diikuti kenaikan harga jual produk;
- belum tersedia program promosi tarif kargo dari maskapai garuda sebagaimana diterapkan oleh maskapai ini di daerah lain.

4. Kendala Infrastruktur

Masih ditemukan beberapa keterbatasan, yaitu:

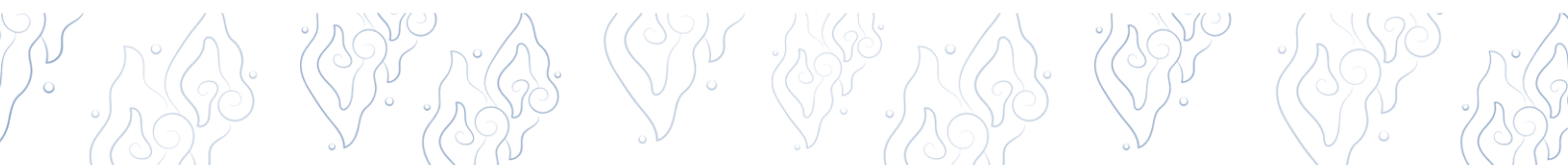
- belum tersedianya gudang logistik yang memadai;
- aset pemerintah yang belum dimanfaatkan secara optimal, semisalnya pada gudang perikanan di Pelabuhan Ikan Jl. Baru ;
- keterbatasan cold storage;
- keterbatasan reefer container untuk ekspor melalui laut, sehingga harus didatangkan dari Surabaya untuk komoditas udang;
- proses pengiriman kontainer masih bergantung pada Surabaya.

5. Kendala Regulasi

	Beberapa hambatan regulasi yang diidentifikasi antara lain: • proses perizinan ekspor produk kelor masih belum optimal; • pembatasan wilayah penangkapan ikan melalui sistem GPS menyebabkan hasil tangkapan nelayan menurun hingga sekitar 50%; • kebutuhan penyederhanaan pelayanan ekspor lintas instansi. 6. Kondisi Usaha Dari hasil evaluasi diperoleh informasi: • nilai cash flow perusahaan mencapai sekitar Rp25 miliar, CV Anugrah Kendari Bahari; • tenaga kerja tetap sebanyak 5–8 orang; • tenaga kerja tidak tetap sekitar 10 orang; • musim gelombang tinggi di wilayah selatan berlangsung pada bulan Juli – September /tahun sehingga memengaruhi produksi. D. Koordinasi Koordinasi terkait kegiatan export hasil Bahari, sebagai bagian dari persiapan untuk melakukan SHEK Bersama Bea Cukai terkait potensi daerah, perlu dilakukan lebih lanjut dengan: • Gubernur Papua Barat Daya. • Bea Cukai. • BPMHKP. • Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Papua Barat Daya. • Maskapai penerbangan. • Garuda Cargo. • ESN Cargo.
--	---

	• Pelaku usaha ekspor. • Pemerintah Kota Sorong. • Pengelola aset pemerintah Provinsi PBD. Koordinasi difokuskan pada peningkatan kapasitas ekspor, penyediaan fasilitas logistik, efisiensi biaya distribusi, serta peningkatan daya saing produk perikanan Papua Barat Daya.
Hasil Kegiatan	1. Teridentifikasi bahwa sektor perikanan memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi Papua Barat Daya. 2. Bea Cukai dan BPMHKP memberikan dukungan terhadap pengembangan ekspor daerah. 3. Teridentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas logistik udara dan laut. 4. Teridentifikasi perlunya pemanfaatan aset pemerintah sebagai gudang logistik dan pusat distribusi. 5. Diperoleh masukan mengenai perlunya kebijakan tarif kargo yang lebih kompetitif. 6. Teridentifikasi perlunya peningkatan fasilitas ekspor seperti cold storage dan reefer container. 7. Diperoleh informasi mengenai dampak pembatasan wilayah tangkap terhadap produktivitas nelayan. 8. Terbangun komitmen koordinasi antara BP3OKP dan pelaku bisnis di wilayah Papua Barat Daya (CV Anugrah Kendari Bahari) dalam mendukung pengembangan ekspor hasil perikanan Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. BP3OKP memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, serta maskapai

	penerbangan untuk meningkatkan kapasitas dan frekuensi angkutan kargo dari Sorong. 2. Mendorong penyusunan kebijakan tarif kargo khusus (cargo incentive) bagi komoditas ekspor unggulan Papua Barat Daya melalui skema promosi atau subsidi logistik. 3. Mengoordinasikan pemanfaatan aset pemerintah yang belum produktif menjadi gudang logistik, cold storage, atau pusat distribusi ekspor. 4. Mendorong percepatan penyediaan reefer container dan penguatan rantai dingin (cold chain) guna menjaga mutu produk ekspor. 5. Memfasilitasi penyederhanaan proses perizinan ekspor dan sertifikasi mutu melalui integrasi layanan BPMHKP, Karantina Ikan, dan Bea Cukai. 6. Melakukan evaluasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dampak pembatasan wilayah penangkapan ikan agar tetap menjaga keseimbangan antara konservasi sumber daya dan keberlanjutan ekonomi nelayan. 7. Mengintegrasikan pengembangan kawasan logistik dan ekspor hasil perikanan ke dalam RIPP dan RAPP sebagai program prioritas Misi Papua Produktif. 8. Mendorong penguatan kemitraan antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD untuk memperluas akses pasar internasional serta meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan Papua Barat Daya.
--	--



Dokumentasi



CV. ANUGRAH BAHARI KENDARI
 Address : Jl. Selat Obi KM 9,5 Distrik Sorong Timur, Kel. Kladefa,
 Kota Sorong, Southwest Papua - Indonesia
 Contact : 0821-9984-5128
 Email : anugrahbahari@gmail.com

Bapak Inspektur Provinsi Papua Barat Daya
 di Sorong

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan pengaduan resmi sekaligus permohonan pengawasan Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya terkait keterbatasan kuota muatan kargo pesawat Garuda Indonesia dan Lion Grup (Batik) pada penerbangan yang beroperasi melalui Bandara Domine Edouard Osok (DEO) Sorong.

Permasalahan keterbatasan kuota kargo tersebut terjadi secara berulang dan berkelanjutan, sementara kebutuhan pengiriman barang melalui jalur udara dari Bandara DEO Sorong terus meningkat, khususnya untuk barang export hasil perikanan, melalui jalur udara dengan negara tujuan Singapura, Arab Saudi, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Kondisi ini telah menimbulkan dampak nyata berupa:

1. Penumpukan kargo di area bandar jika terjadi overflow kuota kargo
2. Keterlambatan distribusi/export barang ke daerah/negara tujuan
3. Terganggunya aktivitas usaha UMKM serta rantai pasok masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat Daya terkhusus nelayan pesisir propinsi Papua Barat Daya.
4. Terjadinya Penurunan kualitas ikan segar atau hasil perikanan lainnya yang akan di export dari kota Sorong melalui jalur udara
5. Menghambat perkembangan usaha UMKM khususnya nelayan pesisir Papua Barat Daya
6. Akan terjadi pembatasan volume komoditi export oleh negara tujuan export

Hingga saat ini, penanganan atas kondisi tersebut belum menunjukkan adanya solusi yang terkoordinasi dan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan instansi terkait. Oleh karena itu, kami memohon atau memandangkan perlu adanya pengawasan dan evaluasi administratif guna memastikan bahwa kebijakan serta prosedur pemuatan kargo di Bandara DEO Sorong telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya untuk dapat melakukan pengawasan, penelaahan, dan evaluasi terhadap:

1. Keefektifan pelaksanaan kebijakan dan prosedur pemuatan kargo pesawat di Bandara DEO Sorong;
2. Mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola Bandara DEO Sorong, operator penerbangan, serta instansi terkait lainnya;
3. Efektivitas langkah fasilitasi dan pengendalian yang telah atau seharusnya dilakukan guna menjamin kelancaran distribusi kargo udara untuk meningkatkan kualitas dan volume komoditi export dari propinsi Papua Barat Daya.
4. Sangat besarnya sumber perikanan di propinsi Papua Barat Daya sehingga dengan ini bisa untuk meningkatkan serta melancarkan Pembangunan propinsi Papua Barat Daya melalui jalur perikanan khususnya export dengan meningkatkan Export hasil perikanan

Pengaduan ini kami sampaikan tanpa prasangka, sebagai bentuk kepedulian terhadap tertib administrasi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara khususnya jalur export, menjaga kestabilan penguasa UMKM dan para pekerja serta nelayan pesisir propinsi Papua Barat Daya dan distribusi logistik di Provinsi Papua Barat Daya dengan lancar.

Kami berharap pengaduan ini dapat ditindaklanjuti serta menjadi perhatian sesuai kewenangan Inspektorat, dan hasilnya dapat menjadi dasar rekomendasi perbaikan kebijakan maupun tindakan korektif yang diperlukan.

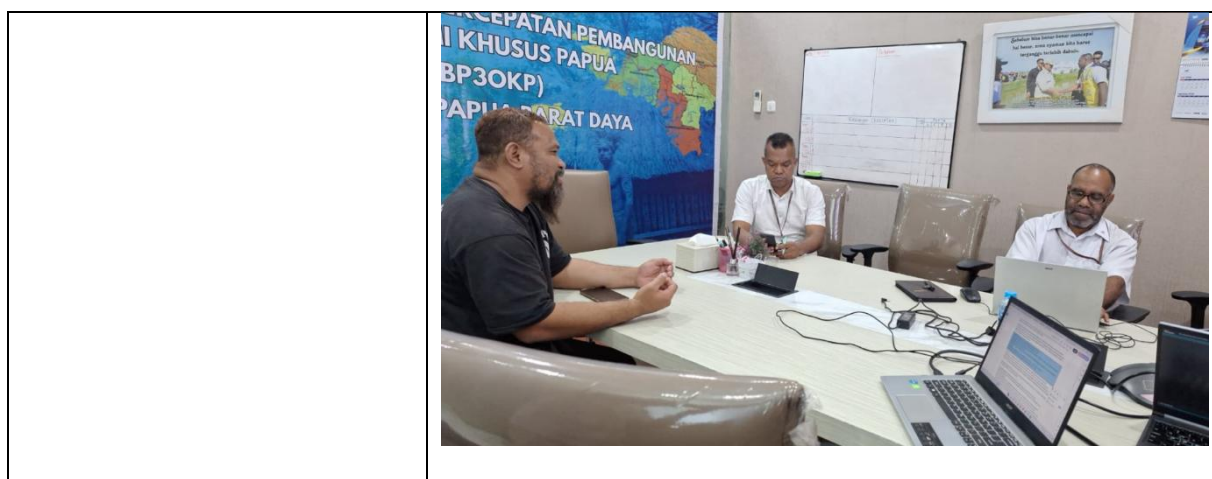
Demikian pengaduan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 Pengirim: CV. Anugrah Bahari Kendari



- Tembusan:
1. Bpk. Gubernur Propinsi Papua Barat Daya
 2. Kadis Perhubungan Propinsi Papua Barat Daya
 3. Kadis Perikanan Propinsi Papua Barat Daya
 4. Kepala KPPBC TMP C Sorong
 5. Kepala Bimexor Kota Sorong
 6. Kepala Badan Karantina Ikan Indonesia kota Sorong
 7. Pimpinan Garuda Indonesia cabang kota sorong
 8. Pimpinan Lion Grup cabang kota sorong
 9. Pimpinan PT. Suryagita Nusantara cabang kota sorong

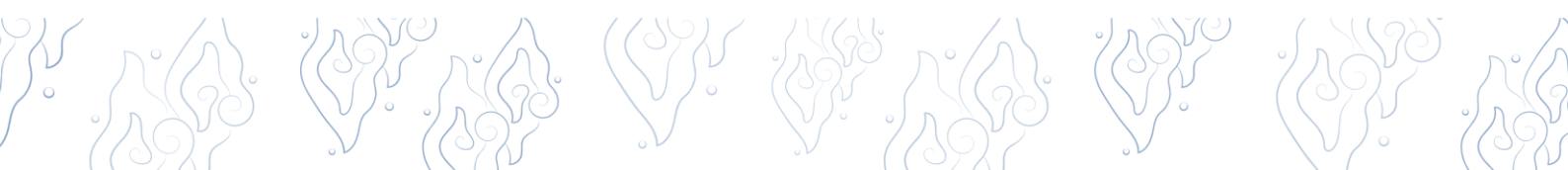




Kegiatan 5

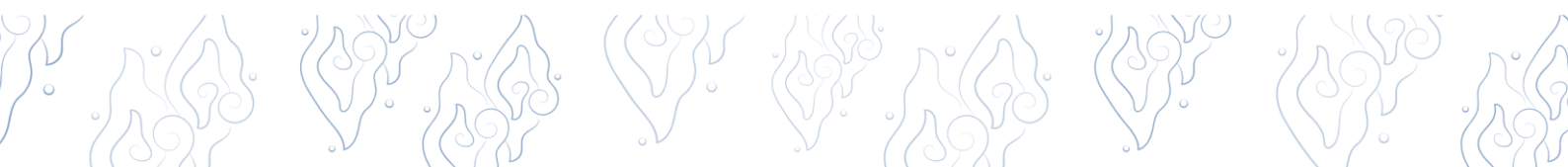
Nama Kegiatan	SHEK BPP PBD melalui Kegiatan Audiensi dengan Yayasan Domberay Creative Project
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 21 Juli 2026 Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 3. Terwujudnya komunikasi public yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 2. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP), pelestarian identitas budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah semakin

	berkurangnya ruang interaksi antara generasi muda dengan para tetua adat dalam proses pewarisan nilai, pengetahuan, dan praktik budaya. Konsep Jambore Pemuda Adat Domberay Tahun 2026 disusun sebagai media pembelajaran, pelestarian budaya, dan penguatan kapasitas pemuda adat melalui kegiatan edukatif, dialog budaya, workshop, visualisasi budaya, serta pemanfaatan pangan lokal berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 5–11 Agustus 2026 di Rumah Etnik Papua Kabupaten Sorong dan Gedung Multipurpose E.C. Lambert Jitmau Kota Sorong. Dalam perspektif BP3OKP Papua Barat Daya, kegiatan ini memiliki relevansi strategis terhadap pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), khususnya dalam penguatan kapasitas SDM OAP, pelestarian budaya, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, promosi pangan lokal, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan generasi muda. Oleh karena itu, BP3OKP berkepentingan melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) agar pelaksanaan kegiatan selaras dengan prioritas percepatan pembangunan Papua.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Kegiatan tatap muka dengan panitia Jambore Pemuda Adat Domberay bertujuan untuk mendorongnya adanya fungsi SHEK bagi kegiatan tersebut, sehingga tercipta sinergi antara panitia dan BPP Perwakilan Papua Barat Daya untuk mengawal agenda kerja



	terkait pelestarian kebudayaan di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga bisa memunculkan beberapa aspek : 1. Melestarikan budaya adat melalui pewarisan pengetahuan, nilai, dan praktik budaya dari tetua adat kepada generasi muda. 2. Memberikan edukasi mengenai sejarah, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat adat Domberay melalui media visual. 3. Memperkuat kesadaran terhadap pemanfaatan pangan lokal dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. 4. Membangun kader pemuda adat sebagai agen pelestarian budaya dan pembangunan daerah. 5. Mendukung implementasi program percepatan pembangunan Papua sesuai arah RIPP dan RAPP.
Peserta Kegiatan	• Anggota BPP Perwakilan Papua Barat Daya • Perwakilan Yayasan Domberay Creative Project • Anggota Pokja Papua Produktif: Herman Wafom Tubur S.P., M.Si. dan Alberd Berhad Duwith, M.T. • Anggota Pokja Papua Damai: Grein Wutoy dan Virginus Turot • Anggota Pokja Papua Sehat: dr. Alouisius
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Harmonisasi Evaluasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	Beberapa pokok pembahasan yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini antara lain:

	• Pelestarian identitas budaya masyarakat adat Domberay. • Pewarisan nilai budaya antar generasi. • Penguatan kapasitas pemuda adat sebagai agen pembangunan. • Visualisasi dan dokumentasi budaya melalui media digital. • Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. • Penguatan pemanfaatan pangan lokal. • Pelestarian lingkungan melalui kearifan lokal. • Pembentukan jejaring kolaborasi budaya. • Festival budaya sebagai media promosi budaya Papua Barat Daya. • Penyusunan komitmen bersama untuk keberlanjutan pelestarian budaya.
Hasil Kegiatan	Berdasarkan hasil sinkronisasi dan evaluasi, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut: 1. Konsep kegiatan telah mendukung pelestarian budaya dan pembangunan SDM OAP. 2. Kegiatan berpotensi memperkuat identitas budaya masyarakat adat Domberay. 3. Tersedianya ruang kolaborasi antara pemuda adat dan tetua adat. 4. Terciptanya mekanisme dokumentasi budaya melalui foto, video, dan dokumenter. 5. Terbangunnya pemahaman mengenai hubungan budaya, pangan lokal, dan pelestarian lingkungan. 6. Meningkatnya jejaring antar komunitas budaya di Papua Barat Daya. 7. Mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya sebagai bagian dari pembangunan Papua Produktif.



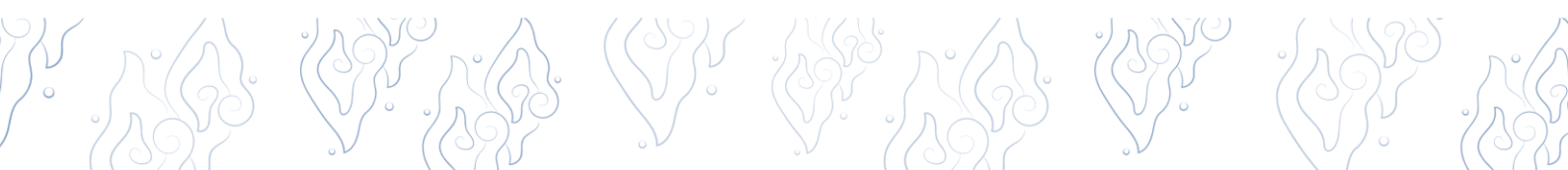
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Rekomendasi:																							
	1. Mengintegrasikan Jambore Pemuda Adat Domberay ke dalam agenda prioritas pembangunan daerah dan pelaksanaan RAPPP Papua Barat Daya.																							
	2. Memperluas keterlibatan OPD teknis, lembaga adat, perguruan tinggi, serta pelaku ekonomi kreatif.																							
	3. Mengembangkan hasil workshop menjadi produk ekonomi kreatif yang bernilai ekonomi.																							
	4. Menyusun sistem monitoring dan evaluasi pascakegiatan untuk mengukur dampak terhadap kapasitas pemuda adat.																							
	5. Mendorong replikasi kegiatan di wilayah adat lainnya di Papua Barat Daya.																							
	6. Memanfaatkan hasil dokumentasi budaya sebagai bahan pendidikan, promosi wisata budaya, dan arsip kebudayaan daerah.																							
	Rencana Tindak Lanjut:																							
	<table><tr><th>No.</th><th>Rencana Tindak Lanjut</th><th>Penanggung Jawab</th></tr><tr><td>1</td><td>Sinkronisasi program Jambore ke dalam RAPPP dan RKPD</td><td>BP3OKP, Bappeda</td></tr><tr><td>2</td><td>Koordinasi dengan OPD teknis dan Kementerian Kebudayaan</td><td>BP3OKP</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyusunan rencana pendanaan dan dukungan kemitraan</td><td>Pemerintah Daerah dan mitra</td></tr><tr><td>4</td><td>Pembentukan tim monitoring dan evaluasi</td><td>BP3OKP</td></tr><tr><td>5</td><td>Penyusunan laporan hasil pelaksanaan Jambore</td><td>Panitia</td></tr><tr><td>6</td><td>Pengembangan program lanjutan pemberdayaan pemuda adat</td><td>BP3OKP, Pemerintah Daerah, Lembaga Adat</td></tr></table>			No.	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	1	Sinkronisasi program Jambore ke dalam RAPPP dan RKPD	BP3OKP, Bappeda	2	Koordinasi dengan OPD teknis dan Kementerian Kebudayaan	BP3OKP	3	Penyusunan rencana pendanaan dan dukungan kemitraan	Pemerintah Daerah dan mitra	4	Pembentukan tim monitoring dan evaluasi	BP3OKP	5	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan Jambore	Panitia	6	Pengembangan program lanjutan pemberdayaan pemuda adat	BP3OKP, Pemerintah Daerah, Lembaga Adat
	No.	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab																					
1	Sinkronisasi program Jambore ke dalam RAPPP dan RKPD	BP3OKP, Bappeda																						
2	Koordinasi dengan OPD teknis dan Kementerian Kebudayaan	BP3OKP																						
3	Penyusunan rencana pendanaan dan dukungan kemitraan	Pemerintah Daerah dan mitra																						
4	Pembentukan tim monitoring dan evaluasi	BP3OKP																						
5	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan Jambore	Panitia																						
6	Pengembangan program lanjutan pemberdayaan pemuda adat	BP3OKP, Pemerintah Daerah, Lembaga Adat																						

	7	Menghadirkan Bapak Wolas Krenak, sebagai Tokoh Adat Senior Suku Tehit dalam kegiatan: “Jambore Pemuda Adat Domberai – Papua Barat Daya” sebagai narasumber yang kompeten	Panitia dan BP3OKP Pokja Papua Produktif
Dokumentasi	  		

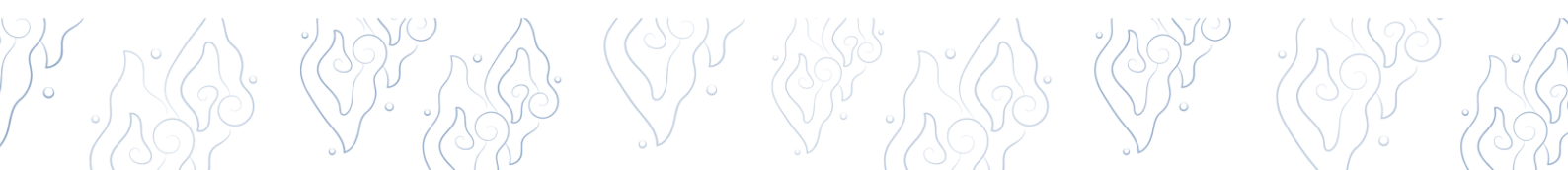
Kegiatan 6

Nama Kegiatan	Peran Aktif SHEK BPP PBD pada Kegiatan FGD Kolaborasi Multipihak Pengelolaan Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa-Rabu, 28-29 Juli 2026 Hotel Aston, Sorong
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 3. Terwujudnya komunikasi public yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 2. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua (MPTP) merupakan kawasan strategis yang memiliki nilai ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan Papua Barat Daya. Pengelolaannya memerlukan pendekatan kolaboratif yang mampu mengintegrasikan kepentingan pemerintah, masyarakat hukum adat, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, RIPPP, dan RAPPP, pengelolaan kawasan strategis tersebut tidak hanya diarahkan pada aspek konservasi, tetapi juga harus mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,

	khususnya Orang Asli Papua (OAP), melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi Multipihak Pengelolaan Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua sebagai forum strategis untuk memperkuat koordinasi, integrasi perencanaan, sinkronisasi kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	A. Sinkronisasi Dalam perspektif BP3OKP, kegiatan ini mendukung proses sinkronisasi melalui: • penyelarasan kebijakan konservasi dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan; • integrasi program pemerintah pusat dan daerah; • penyelarasan implementasi RIPPP dan RAPPP dengan kebijakan daerah; • sinkronisasi rencana pembangunan berbasis bentang alam dan pemberdayaan masyarakat adat; • integrasi agenda perlindungan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan OAP. B. Harmonisasi FGD menjadi media harmonisasi kebijakan melalui: • penyamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan;

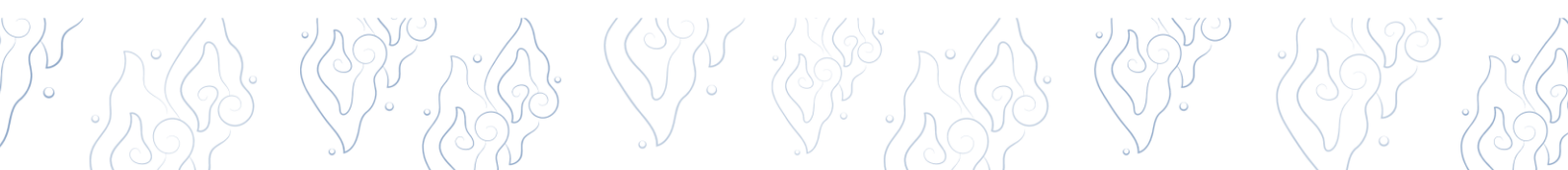


	• harmonisasi kepentingan konservasi dan pembangunan ekonomi; • harmonisasi peran pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta; • penyelarasan program pembangunan lintas sektor; • penguatan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam. C. Evaluasi Forum ini menjadi sarana evaluasi terhadap: • efektivitas tata kelola kawasan bentang alam; • koordinasi lintas sektor yang telah berjalan; • tantangan implementasi perlindungan kawasan; • peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; • kebutuhan penguatan kelembagaan kolaboratif. D. Koordinasi FGD memperkuat koordinasi melalui: • pembentukan forum komunikasi multipihak; • peningkatan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah; • koordinasi dengan masyarakat hukum adat; • koordinasi bersama akademisi dan lembaga penelitian; • koordinasi dengan dunia usaha dan mitra pembangunan;
--	---



	• penguatan mekanisme kolaborasi dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan. • Meningkatnya jejaring antar komunitas budaya di Papua Barat Daya. • Mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya sebagai bagian dari pembangunan Papua Produktif.
Peserta Kegiatan	• Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya • Anggota MRP Papua Barat Daya • Instansi vertikal dari Kementerian Kehutanan • Masyarakat Hukum Adat • Akademisi • Organisasi masyarakat sipil • Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua • BPP Papua Barat Daya (Anggota Pokja Papua Produktif: Alberd Berhad Duwith, M.T.)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Harmonisasi Evaluasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	Pokok-pokok pembahasan yang dapat diidentifikasi dari materi FGD meliputi: • Penguatan tata kelola Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua. • Perlindungan lingkungan hidup secara terintegrasi. • Penguatan pembangunan berkelanjutan.

	• Sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah. • Kolaborasi multipihak. • Integrasi perencanaan lintas sektor. • Penguatan komitmen bersama. • Perlindungan masyarakat hukum adat. • Pelestarian keanekaragaman hayati. • Penguatan kemitraan pembangunan.
Hasil Kegiatan	FGD menghasilkan beberapa capaian strategis, yaitu: 1. Meningkatnya komitmen bersama dalam pengelolaan Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua; 2. Terbentuknya ruang koordinasi lintas sektor; 3. Meningkatnya sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, dan mitra pembangunan; 4. Tersusunnya arah penguatan tata kelola lingkungan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan; 5. Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat Daya. Kegiatan ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan Misi Papua Produktif, khususnya dalam: 1. Menjaga keberlanjutan sumber daya alam sebagai modal pembangunan ekonomi; 2. Memperkuat ekonomi berbasis konservasi; 3. Mendorong investasi yang memperhatikan aspek lingkungan; 4. Meningkatkan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; 5. Memperkuat peran masyarakat adat sebagai pelaku utama pembangunan.



	6. Selain itu, hasil fgd juga mendukung misi papua cerdas melalui pelibatan akademisi, papua sehat melalui perlindungan kualitas lingkungan hidup, serta papua damai melalui penguatan kolaborasi dan pengurangan potensi konflik dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. BPP perlu menjadi bagian aktif dalam forum koordinasi pengelolaan Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua. 2. Menyusun peta sinkronisasi program RAPP, RIPP, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten/Kota terkait pengelolaan bentang alam. 3. Mengembangkan indikator evaluasi keberhasilan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan bentang alam. 4. Mendorong penguatan peran masyarakat hukum adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. 5. Mengembangkan model ekonomi hijau berbasis OAP melalui ekowisata, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan perdagangan karbon. 6. Memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan mitra pembangunan agar implementasi kebijakan berlangsung secara terpadu dan berkelanjutan. Laporan ini menunjukkan bahwa FGD tersebut merupakan forum strategis yang mendukung pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi BP3OKP dalam mempercepat pembangunan Papua Barat Daya melalui tata kelola bentang alam yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan.

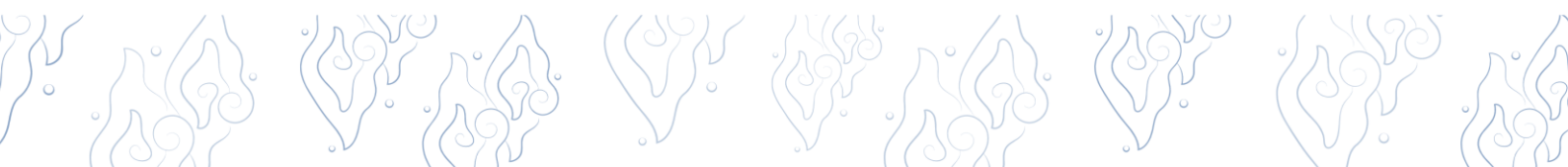
Dokumentasi**3.4 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Polhukam/Damai****Kegiatan 1**

Nama Kegiatan	Forum SHEK Papua Damai : Sinkronisasi & Evaluasi Dinamika Sosial Kemasyarakatan serta Stabilitas Keamanan di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 3 Juli 2026 Aula KPPN Sorong
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 3. Terwujudnya komunikasi public yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks rata-rata Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan 2. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 3. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik

Latar Belakang	Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) memiliki tugas melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025. Salah satu prasyarat utama keberhasilan pembangunan di Papua adalah terwujudnya kondisi sosial kemasyarakatan yang harmonis serta situasi keamanan yang aman dan kondusif. Stabilitas keamanan memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah pusat dan daerah. Kabupaten Maybrat merupakan salah satu wilayah di Provinsi Papua Barat Daya yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai dinamika sosial dan keamanan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Berbagai peristiwa gangguan keamanan yang pernah terjadi tidak hanya mempengaruhi stabilitas wilayah, tetapi juga menimbulkan dampak sosial berupa perpindahan penduduk atau masyarakat eksodus, terganggunya aktivitas pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat, serta hubungan sosial kemasyarakatan di sejumlah kampung dan distrik.
-----------------------	---

	Seiring dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif, diperlukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan kondisi sosial kemasyarakatan dan keamanan di Kabupaten Maybrat. Evaluasi tersebut penting untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai situasi terkini, mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan secara bersama-sama dalam mendukung terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Selain itu, proses pemulihan kehidupan masyarakat, termasuk penanganan masyarakat eksodus, penguatan rekonsiliasi sosial, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur terkait perlu terus diperkuat melalui forum komunikasi dan koordinasi yang konstruktif. Berkaitan dengan hal tersebut, BPP Provinsi Papua Barat Daya memandang perlu menyelenggarakan Forum Sinkronisasi dan Evaluasi Dinamika Sosial Kemasyarakatan serta Stabilitas Keamanan di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya. Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk melakukan sinkronisasi informasi, evaluasi perkembangan situasi sosial dan keamanan, identifikasi berbagai
--	---

	permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta penyusunan rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Maybrat yang aman, damai, dan kondusif. Selain itu, melalui forum ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi, komitmen, dan kerja sama yang lebih kuat antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan, memperkuat kohesi sosial masyarakat, serta mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maybrat sebagai bagian dari percepatan pembangunan Papua secara menyeluruh.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) Badan Pengarah Papua terhadap perkembangan dinamika sosial kemasyarakatan dan stabilitas keamanan di Kabupaten Maybrat. • Mengidentifikasi perkembangan kondisi sosial kemasyarakatan, situasi keamanan, berbagai tantangan, permasalahan, serta faktor-faktor yang memengaruhi percepatan pembangunan di Kabupaten Maybrat. • Menghimpun masukan, pengalaman, praktik baik (best practices), serta perspektif dari Pemerintah Daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung terwujudnya Papua Damai. • Memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor antara Badan Pengarah Papua, Pemerintah Daerah, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung



	stabilitas keamanan dan pembangunan di Kabupaten Maybrat. Menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai bahan pelaksanaan fungsi SHEK Badan Pengarah Papua dalam mendukung percepatan pembangunan serta pelaksanaan Otonomi Khusus di Kabupaten Maybrat.
Peserta Kegiatan	- Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya (Anggota BPP dan seluruh Anggota Pokja) - Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat (Wakil Bupati Maybrat) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Daya - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maybrat - Kepolisian Daerah Papua Barat Daya - Kepolisian Resor Maybrat - Korem 181/PVT Sorong - SKPKC Christus Totus Papua OSA - SKP Keuskupan Manokwari-Sorong - Distrik Aifat Timur Tengah - Distrik Aifat Selatan - DPRP Papua Barat Daya - DPRK Kabupaten Maybrat - MRP Papua Barat Daya - Tim Eksodus Maybrat - Tokoh Masyarakat/Agama/Pemuda Kabupaten Maybrat
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Harmonisasi Evaluasi

	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Polhukam
Poin-Poin Pembahasan	• Badan Pengarah Papua (BPP) berkomitmen menyelaraskan pembangunan melalui Forum SHEK demi mewujudkan perdamaian dan resolusi konflik di wilayah Aifat. • Polres Maybrat melaporkan kondisi ketahanan nasional menggunakan analisis Astagatra, yang menyoroti masalah pengungsian, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta penanganan kasus kriminal dan kontinjensi kelompok bersenjata. • Tokoh masyarakat, Zakeus Mamou, mengkritik pemerintah daerah yang dinilai tidak serius menangani pengungsi dan mengabaikan pembangunan infrastruktur jalan di daerah konflik. • Akibat pembiaran konflik, masyarakat di 13 kampung dari dua distrik hingga saat ini masih mengungsi dan merasa ruang geraknya terlalu dibatasi oleh pengawasan Satgas keamanan. • Masyarakat mendesak solusi nyata atas dinamika sosial-politik ini dan mengancam akan meminta wilayah mereka dikembalikan ke Kabupaten Teluk Bintuni jika pemerintah tidak segera bertindak.
Hasil Kegiatan	1. Tuntutan Transparansi Janji Pembangunan dan Keadilan Fasilitas Dasar Masyarakat menuntut realisasi pembangunan daerah 3T tahun 2025 dan menolak keras pengalihan proyek infrastruktur vital (jembatan, jalan, pendidikan, kesehatan) ke daerah lain dengan alasan keamanan. 2. Evaluasi Kehadiran TNI Melalui Pendekatan Teritorial yang Humanis

	Masyarakat menginginkan pos TNI tetap ada melalui penguatan wilayah teritorial per distrik, namun menuntut pendekatan yang lebih humanis, penghentian latihan tembak dekat pemukiman, serta penyelesaian ganti rugi rumah warga yang dipakai sebagai pos. 3. Pemberantasan Akar Konflik dan Jaminan Akses Jalan Aman Konflik dinilai subur karena kekecewaan masyarakat kepada pemerintah serta pembiaran organisasi KNPB. Warga mendesak pemerintah dan aparat membuka serta mengamankan akses jalan yang sangat mereka butuhkan. 4. Keterwakilan Politik Melalui Penataan Dapil Khusus Perlu adanya pemisahan Dapil bagi Aifat Timur dan Aifat Selatan agar aspirasi dan kepentingan politik masyarakat di kedua wilayah konflik tersebut dapat diperjuangkan secara mandiri oleh wakil mereka di DPRD. 5. Penyelamatan Masa Depan Generasi Muda (Pendidikan & Lapangan Kerja) Pemerintah diminta serius menangani konflik yang menyebabkan anak-anak putus sekolah, sekaligus memberikan keberpihakan regulasi melalui formasi CPNS khusus untuk mengakomodasi pencari kerja lokal.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. Masyarakat Aifat Timur dan Aifat Selatan Mendukung Program Pembangunan baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten 2. Program Pembangunan yang berfokus pada Wilayah Aifat Timur dan Aifat Selatan jangan di ahlikan ke daerah lain

	3. Masyarakat mendukung kebijakan pemerintah dalam menenpatkan Satgas TNI/Polri yang bertugas di Wilayah Aifat 4. Segera lakukan evaluasi terhadap penggunaan fasilitas umum dan rumah penduduk sebagai Pos Satgas TNI/Polri 5. Wilayah Aifat Timur dan Aifat Selatan didorong untuk menjadi 1 Daerah Pemilihan (Dapil) tersendiri 6. Pembangunan Pasar dan Fasilitas Pendukung Perekonomian Masyarakat 7. Pembangunan fasilitas Bank di Wilayah Aifat Timur (Ayata)
Dokumentasi	



Kegiatan 2

Nama Kegiatan	SHEK bersama Polres Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 17 Juli 2026 Kantor Polres Sorong
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 3. Terwujudnya komunikasi public yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks rata-rata Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan

	2. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 3. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025, Pokja Papua Damai memiliki fungsi melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan Papua, khususnya pada misi Papua Damai. Misi Papua Damai dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) menempatkan keamanan, ketenteraman masyarakat, serta meningkatnya rasa aman sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan Papua. Dua indikator penting yang menjadi perhatian adalah persentase tindakan kriminal dan persentase masyarakat yang merasa aman berjalan sendirian di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai daerah yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan mobilitas masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong memiliki posisi strategis dalam mendukung tercapainya indikator tersebut. Oleh karena itu diperlukan koordinasi langsung dengan Kepolisian Resor Kabupaten Sorong guna memperoleh gambaran kondisi keamanan terkini, perkembangan angka kriminalitas, berbagai upaya pencegahan, serta strategi peningkatan rasa aman masyarakat. Selain sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi SHEK, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk

	memperkenalkan tugas, fungsi, dan peran Badan Pengarah Papua kepada jajaran Kepolisian sehingga tercipta sinergi dalam mendukung implementasi RIPP dan RAPPP di Papua Barat Daya. Berdasarkan hal tersebut, Pokja Papua Damai BPP Papua Barat Daya akan melaksanakan kegiatan SHEK di Polres Kabupaten Sorong sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung terwujudnya Papua Damai.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Memperkenalkan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengarah Papua kepada jajaran Polres Kabupaten Sorong dan Polresta Sorong Kota. • Mengidentifikasi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. • Menghimpun data dan informasi mengenai perkembangan persentase tindakan kriminal di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. • Mengidentifikasi perkembangan indikator persentase masyarakat yang merasa aman berjalan sendirian di lingkungan tempat tinggalnya. • Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator Misi Papua Damai RIPP. • Menyusun rekomendasi tindak lanjut sebagai bahan pelaksanaan fungsi SHEK BPP Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	• Kasat Reskrim Polres Kab.Sorong • Kasat Intel Polres Kab.Sorong • Anggota Pokja Polhukam BPP PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Harmonisasi Koordinasi

Misi/Keterangan	Papua Polhukam
Poin-Poin Pembahasan	• Faktor Ekonomi & Kriminalitas: Angka pencurian (khususnya curanmor) meningkat akibat penurunan lapangan kerja dan dominasi pekerja buruh lepas tanpa penghasilan tetap. Kemandirian fiskal daerah masih sangat rendah. Faktor Ekonomi & Kriminalitas: Angka pencurian (khususnya curanmor) meningkat akibat penurunan lapangan kerja dan dominasi pekerja buruh lepas tanpa penghasilan tetap. Kemandirian fiskal daerah masih sangat rendah. • Kendala Regulasi & Sektoral: Pemda dinilai lambat menerbitkan Perda PAD untuk menstimulasi ekonomi. Di sisi lain, kepatuhan PBB masih rendah dan masyarakat cenderung pasif terhadap inovasi digital. • Isu Keamanan & Adat: Kabupaten Sorong menjadi wilayah perlintasan strategis. Isu utama yang menonjol adalah aksi pemalangan yang sering dilakukan, terbaru adalah pemalangan kantor Dispenda, Samsat dan UPTD Pasar Mariat terkait hak ulayat dan tingginya angka anak-anak di jalanan pada malam hari. • Hambatan Operasional: Sinkronisasi data antara Polri dan Pemda belum berjalan optimal akibat buruknya infrastruktur jaringan internet di titik-titik krusial. • Strategi Penanganan Polres: Optimalisasi Unit Patmor di area Tugu Merah, sosialisasi aktif Call Center 110, pelaksanaan kegiatan dialogis (nobar/ngopi bersama ormas dan tokoh agama), serta penguatan jejaring intelijen Kominda-Kesbangpol.
Hasil Kegiatan	1. Teridentifikasi bahwa meningkatnya angka kriminalitas, khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih, terbatasnya

	lapangan pekerjaan, serta rendahnya kapasitas fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Diperoleh masukan bahwa percepatan penyusunan regulasi daerah, khususnya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan investasi, dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. 3. Terpetakan sejumlah isu strategis yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di Kabupaten Sorong, antara lain permasalahan hak ulayat yang memicu aksi pemalangan terhadap fasilitas publik, meningkatnya aktivitas anak jalanan, serta posisi Kabupaten Sorong sebagai wilayah perlintasan yang memiliki tingkat kerawanan relatif tinggi. 4. Ditemukan bahwa koordinasi dan pertukaran data antarinstansi belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan infrastruktur jaringan internet, sehingga diperlukan penguatan sistem integrasi data untuk mendukung deteksi dini serta penyusunan kebijakan berbasis data. 5. Polres Kabupaten Sorong telah melaksanakan berbagai upaya preventif melalui patroli lapangan dan patroli siber, optimalisasi layanan darurat Call Center 110, serta pendekatan dialogis bersama tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Kesbangpol sebagai bagian dari strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. 6. Forum menyepakati pentingnya memperkuat sinergi antara BP3OKP, Pemerintah Daerah, Polres, Kesbangpol, OPD terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung implementasi Misi Papua Damai melalui koordinasi yang berkelanjutan,
--	---

	penyelesaian konflik secara dialogis, serta pelaksanaan program lintas sektor yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas keamanan.										
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Rekomendasi 1. Akselerasi Regulasi: Mendorong Pemda Kabupaten Sorong segera menerbitkan Perda PAD untuk membuka lapangan kerja baru. 2. Penyelesaian Hak Ulayat: Memfasilitasi mediasi tripartit antara BPP, Pemda, dan pemilik hak ulayat guna menghentikan aksi pemalangan fasilitas publik. 3. Infrastruktur Data: Memprioritaskan perbaikan jaringan internet untuk mendukung integrasi sistem data Polri-Pemda. 4. Intervensi Sosial Bersama: Menyusun program lintas sektor (Dinas Sosial, Pemda, dan Polres) untuk penanganan preventif anak jalanan Rencana Tindak Lanjut <table><tr><th>No</th><th>Isu Strategis</th><th>Rencana Tindak Lanjut (Rencana Aksi)</th><th>Penanggung Jawab</th><th>Waktu</th></tr><tr><td>1</td><td>Peningkatan kriminalitas akibat lemahnya kondisi ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja</td><td>Menyusun program terpadu peningkatan kesempatan kerja melalui pemetaan tenaga kerja lokal, pengembangan UMKM, perluasan investasi, dan fasilitasi penempatan tenaga kerja pada sektor swasta sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada ASN sebagai pilihan pekerjaan.</td><td>Pemkab Sorong (Disnaker, Dinas Koperasi/UMKM, Bappeda), BP3OKP, Polres</td><td>Jangka Pendek–Menengah</td></tr></table>	No	Isu Strategis	Rencana Tindak Lanjut (Rencana Aksi)	Penanggung Jawab	Waktu	1	Peningkatan kriminalitas akibat lemahnya kondisi ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja	Menyusun program terpadu peningkatan kesempatan kerja melalui pemetaan tenaga kerja lokal, pengembangan UMKM, perluasan investasi, dan fasilitasi penempatan tenaga kerja pada sektor swasta sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada ASN sebagai pilihan pekerjaan.	Pemkab Sorong (Disnaker, Dinas Koperasi/UMKM, Bappeda), BP3OKP, Polres	Jangka Pendek–Menengah
No	Isu Strategis	Rencana Tindak Lanjut (Rencana Aksi)	Penanggung Jawab	Waktu							
1	Peningkatan kriminalitas akibat lemahnya kondisi ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja	Menyusun program terpadu peningkatan kesempatan kerja melalui pemetaan tenaga kerja lokal, pengembangan UMKM, perluasan investasi, dan fasilitasi penempatan tenaga kerja pada sektor swasta sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada ASN sebagai pilihan pekerjaan.	Pemkab Sorong (Disnaker, Dinas Koperasi/UMKM, Bappeda), BP3OKP, Polres	Jangka Pendek–Menengah							

	2	Belum optimalnya regulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mendorong percepatan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah mengenai PAD serta optimalisasi potensi pendapatan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal yang mendukung pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.	Pemkab Sorong, DPRD Kabupaten Sorong	Jangka Pendek
	3	Masalah hak ulayat yang memicu aksi pemalangan fasilitas publik	Membentuk forum penyelesaian sengketa hak ulayat melalui dialog dan mediasi antara pemerintah daerah, pemilik hak ulayat, tokoh adat, dan aparat keamanan guna menghasilkan mekanisme penyelesaian yang berkeadilan serta mencegah gangguan terhadap pelayanan publik dan investasi.	Pemkab Sorong, BP3OKP, Polres, Kesbangpol, Lembaga Adat	Berkelanjutan

	4	Permasalahan sosial anak jalanan dan kelompok rentan	Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Permasalahan Sosial melalui identifikasi dan pendataan anak jalanan, rehabilitasi sosial, penguatan ekonomi keluarga, pendidikan nonformal, pembinaan karakter, serta pelatihan keterampilan kerja yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Disnaker, BPVP/BLK, Polres, dan organisasi masyarakat.	Dinas Sosial, Disnaker, BPVP/BLK, Dinas Pendidikan, Polres, BP3OKP	Jangka Pendek–Menengah
	5	Belum tersedianya tenaga kerja lokal yang sesuai kebutuhan industri	Melaksanakan pemetaan kebutuhan pasar kerja dan menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arar serta sektor swasta lainnya, disertai fasilitasi penempatan kerja agar masyarakat Kabupaten Sorong, khususnya Aimas, menjadi	Disnaker, BPVP/BLK, Pengelola KEK Arar, Dunia Usaha, BP3OKP	Jangka Menengah

			penerima manfaat utama investasi.		
	6	Belum optimalnya integrasi data lintas instansi akibat keterbatasan jaringan internet	Meningkatkan infrastruktur jaringan internet pada wilayah strategis serta membangun mekanisme pertukaran data antara Polri, Pemda, Kesbangpol, dan OPD terkait guna mendukung penyusunan kebijakan berbasis data.	Diskominfo, Polres, Pemkab Sorong, Kesbangpol	Jangka Menengah

	7	Optimalisasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Memperkuat patroli preventif pada wilayah rawan, meningkatkan sosialisasi layanan darurat 110, mengembangkan patroli siber, serta memperluas kegiatan dialogis bersama tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat sebagai upaya deteksi dini konflik sosial.	Polres Sorong, Kesbangpol, Tokoh Masyarakat	Berkelanjutan
	8	Penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung Misi Papua Damai RIPPP	Menyelenggarakan forum koordinasi dan evaluasi secara berkala antara BP3OKP, Pemerintah Daerah, Polri, TNI, Kesbangpol, OPD terkait, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau perkembangan situasi keamanan, pelaksanaan rencana aksi, serta capaian indikator Misi Papua Damai RIPPP.	BP3OKP, Pemkab Sorong, Polres, Kesbangpol	Triwulanan

Dokumentasi

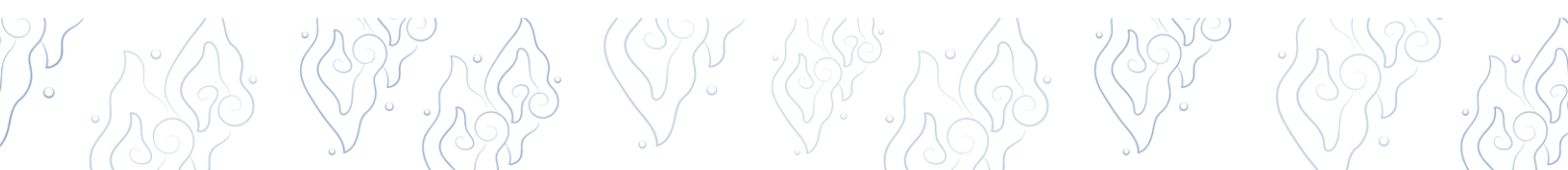
Kegiatan 3

Nama Kegiatan	BPP PBD Laksanakan SHEK Misi Papua Damai melalui Kegiatan Audiensi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 23 Juli 2026 Kantor Dinas Kominfo Sorong
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks rata-rata Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan 2. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Forum SHEK (Sisnronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi), adalah forum strategis yang diselenggarakan oleh Badan Pengarah Papua (BPP) Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) untuk memantau dan mempercepat pembangunan otonomi khusus. Forum ini melibatkan kementerian, pemerintah daerah, dan kelompok kerja (pokja).
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Kegiatan SHEK Pokja Papua Damai ke Dinas Kominfo Kota Sorong bertujuan untuk mengevaluasi capaian transformasi digital infrastruktur Smart City, mengoordinasikan percepatan pembangunan Command Center terintegrasi tahun 2027, serta memberikan dukungan kelembagaan
Peserta Kegiatan	• Anggota Pokja Papua Damai • Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Harmonisasi

	Evaluasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Polhukam
Poin-Poin Pembahasan	• Perkembangan Jaringan & Infrastruktur (Smart City) Dalam empat tahun terakhir, kapasitas bandwidth Pemerintah Kota Sorong melesat tajam dari 200 Mbps menjadi 1,2 Gbps berkat pembangunan 16 KM jaringan kabel udara fiber optik menggunakan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp2,8 Miliar sejak 3 tahun lalu. • Target Implementasi & Kolaborasi Pemerintah Kota Sorong menargetkan pembangunan fisik Command Center pada tahun 2027 sebagai pusat pemantauan kota terintegrasi, yang didukung oleh kerja sama aktif bersama pihak Kepolisian dalam memantau CCTV di berbagai titik rawan. • Kendala Utama & Isu Strategis Dinas Kominfo Kota Sorong menghadapi kendala strategis karena belum masuk dalam struktur kelembagaan Satu Data Indonesia meski berstatus sebagai Wali Data, serta belum menerima data terpilah Orang Asli Papua (OAP) dari instansi terkait. Dari aspek internal, keterbatasan SDM ahli di bidang jaringan dan planologi serta belum optimalnya penerapan prinsip Right Men Right Place mendorong dinas untuk mengusulkan peningkatan status menjadi Dinas Tipe B. • Poin Rekomendasi & Harapan ke BP3OKP Dinas Kominfo memohon dukungan strategis dari BP3OKP untuk mendorong percepatan

	pembangunan Command Center Pemkot Sorong serta mendesak komitmen kuat pimpinan daerah dalam menghadapi evaluasi Penilaian Pemerintah Digital yang sedang berlangsung.
Hasil Kegiatan	1. Perkembangan Jaringan & Infrastruktur (Smart City) Saat ini, sekitar 60-70% area layanan telah terfasilitasi oleh titik akses (access point) yang tersebar di gedung Walikota, sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, hingga beberapa aset videotron daerah [Pribadi]. Meskipun tahun ini kembali mendapatkan tambahan dana DTI sebesar Rp2,6 Miliar untuk pengembangan kapasitas, total realisasi pelayanan baru menyentuh angka 40% dari target kebutuhan akibat keterbatasan anggaran yang ada. 2. Target Implementasi & Kolaborasi Dinas Kominfo juga berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terkait penyusunan topologi jaringan serta berencana mengintegrasikan data dengan Dinas Pariwisata melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Guna memastikan seluruh program sinergi ini berjalan efisien, distribusi bandwidth kini dikelola secara mandiri oleh Kominfo dan tidak lagi dilepas ke masing-masing OPD melalui provider swasta 3. Kendala Utama & Isu Strategis Pengembangan digitalisasi masih sangat terbatas akibat ketergantungan finansial yang tinggi, di mana pendanaan murni hanya mengandalkan APBD dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tanpa adanya serapan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR).

	4. Poin Rekomendasi & Harapan ke BP3OKP Demi efisiensi anggaran rutin, seluruh OPD dilarang menganggarkan internet secara mandiri karena pengelolaan bandwidth kini telah dipusatkan di Kominfo, yang juga membutuhkan konsistensi penyerapan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk biaya pemeliharaan jaringan. Langkah penguatan kelembagaan ini dinilai sangat krusial dan telah selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, RIPP, dan RAPP) karena peningkatan indeks pemerintah digital akan berdampak langsung pada kelancaran transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. Penerbitan Regulasi Mandatori Efisiensi Anggaran Mendorong Walikota Sorong untuk menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) atau Surat Edaran yang melarang seluruh OPD menganggarkan internet mandiri, serta memusatkan tata kelola bandwidth sepenuhnya di Dinas Kominfo demi efisiensi fiskal. 2. Penguncian Dana Pemeliharaan dalam RIPP/RAPP Mengawal dan memastikan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk biaya pemeliharaan (maintenance) jaringan dikunci secara konsisten dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah, guna mendongkrak indeks pemerintah digital yang berdampak pada kelancaran transfer dana pusat.



Dokumentasi**3.5 Pelaksanaan SHEK Strategis (Gabungan Misi)****Kegiatan 1**

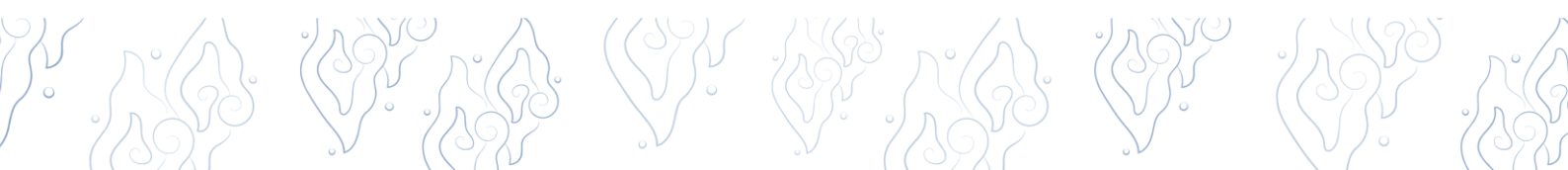
Nama Kegiatan	Koordinasi bersama SKALA terkait Rencana Pelaksanaan Pra-Forum SHEK dan Forum SHEK KDH se-PBD
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 14 Juli 2026 Sekretariat BPP Papua Barat Daya

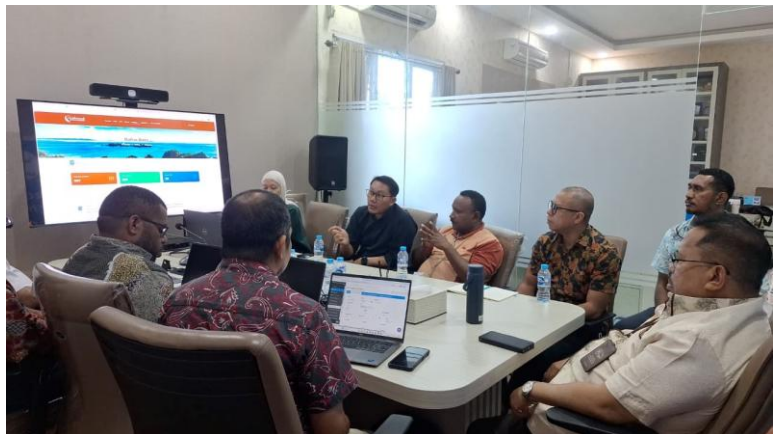
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 3. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks rata-rata Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan 2. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 3. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Para kepala daerah sudah menjalankan roda pemerintahannya terhitung dua tahun sejak dilantik. Selama itu banyak capaian dan kendala yang mereka hadapi dalam menyukkseskan visi misinya sesuai dengan RIPP dan RAPP, terutama ditengah efisensi anggaran ini. Setiap kabupaten/kota di Papua Barat Daya memiliki persoalan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga perlu ada kerja sama melalui Prioritas Program Strategis Bersama (PPSB) agar pelaksanaan Otonomi Khusus lebih tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dari pembahasan rapat juga disampaikan bahwa pendataan terpilah Orang Asli Papua Papua Barat Daya (SIOPADA) menjadi program yang paling penting karena menjadi dasar bagi pelaksanaan program-program strategis lainnya. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan, menyalurkan program, serta memantau hasil pembangunan Otsus di Papua Barat Daya. BPP bahwa penguatan pendataan OAP dan sinergi antar pemerintah daerah merupakan langkah penting

	untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran, menjaga stabilitas daerah, serta mewujudkan Papua adil, mandiri dan sejahtera (RIPPP).
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan tugas dan fungsi SHEK bersama SKALA terkait PPSB sebagai bentuk sinergi pembangunan di Papua Barat Daya yang efektif dan efisien. • Mengetahui perkembangan pendataan terpilah Orang Asli Papua melalui Inovasi dari mitra Pemerintah Provinsi, SKALA dalam platform Sistem Informasi Papua Barat Daya (SIOPADA) sebagai dasar penyusunan program Otonomi Khusus yang lebih tepat sasaran. • Mendorong agar pendataan OAP yang lebih komprehensif meliputi data adminduk serta data sosial ekonomi yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan program pemerintah, sehingga manfaat Otonomi Khusus benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua. • Mengidentifikasi program potensi PPSB untuk setiap misi percepatan Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Damai. • Mengidentifikasi peluang penyusunan kebijakan pendataan terpilah Orang Asli Papua (OAP) yang selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peserta Kegiatan	• BPP Provinsi Papua Barat Daya (Anggota BPP PBD, Pokja Sehat, Pokja Cerdas, Pokja Produktif, Pokja Damai) • Pihak SKALA (Koordinator Wilayah PB dan PBD, Koordinator Wilayah PBD, serta jajaran)

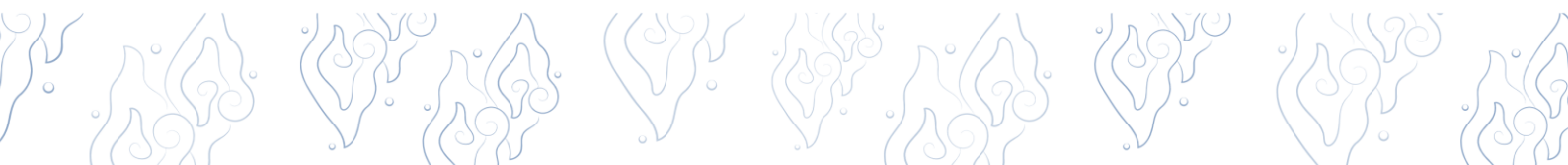
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Harmonisasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat Papua Cerdas Papua Produktif Papua Polhukam (Prasyarat Pembangunan/Kondisi Perlu)
Poin-Poin Pembahasan	• Pembahasan terkait rencana pelaksanaan Pra-Forum SHEK dan Forum SHEK KDH se-PBD terkait PPSB. • Pembahasan Prioritas Program Strategis Bersama (PPSB) sebagai program bersama pemerintah daerah antara provinsi dan kabupaten/kota. • Program Pelindung Hari Tua (PAITUA) Papua Barat Daya yang dijalankan pada pemerintahan Pj. Gubernur PBD Muhamad Musaad dengan model PPSB yang diinisiasi oleh pihak SKALA sebagai contoh baik pelaksanaan PPSB di Papua Barat Daya. • Setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda sehingga perlu diselesaikan melalui kerja sama dengan sharing anggaran agar dapat terselesaikan mengingat kondisi fiskal akibat program efisiensi. • Pendataan terpilah Orang Asli Papua melalui SIOPADA. • Rencana penyampaian aplikasi SIOPADA kepada Gubernur sebagai dukungan pengambilan kebijakan sebelum dimasukan sebagai agenda utama dalam PPSB.

	• Pengembangan dashboard SIOPADA untuk memantau pelaksanaan program pemerintah.
Hasil Kegiatan	1. Terbangun kesepahaman tentang konsep PPSB melalui kegiatan Pra-Forum SHEK dan Forum SHEK yang akan diselenggarakan oleh BPP PBD. 2. SKALA mendukung dan mendorong agar kegiatan Pra-Forum SHEK dan Forum SHEK terkait PPSB tersebut dapat segera dilaksanakan. 3. Memperoleh informasi tentang pendataan terpilah OAP menggunakan SIOPADA yang sedang dikembangkan oleh pihak SKALA bersama Dikdukcapil di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. 4. Disepakati bahwa pendataan terpilah OAP menjadi prioritas dalam mendukung program strategis daerah. 5. Terbangun kesepahaman pentingnya sinergi antar pemerintah dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dengan mengoptimalkan dana yang ada melalui PPSB. 6. SKALA menyampaikan permohonan agar BPP PBD dapat mendorong kolaborasi PPSB antar Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota dengan bermitra SKALA.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	BPP akan terus SHEK bersama SKALA terkait percepatan pendataan terpilah OAP dan PPSB di Papua Barat Daya.



Dokumentasi**Kegiatan 2**

Nama Kegiatan	Sinergitas BPP PBD - Silaturahmi bersama Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya (Penyelenggara Pangdam XVIII/Ksr dan Korem 181/PVT)
----------------------	---

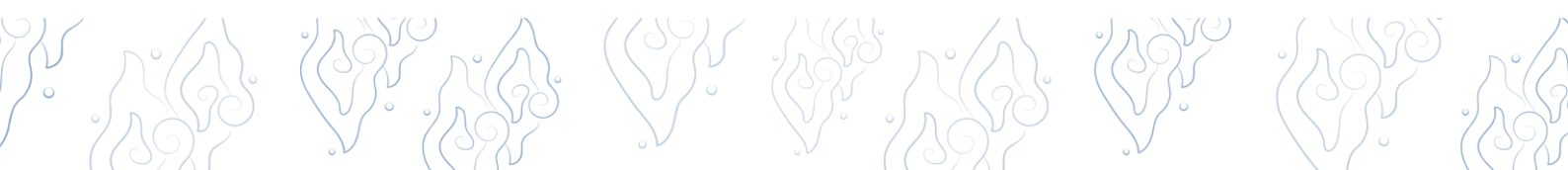


Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 14 Juli 2026 Mamberamo Seafood
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks rata-rata Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan 2. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya, Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya perlu membangun komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Silaturahmi bersama Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya yang diselenggarakan oleh Pangdam XVIII/Kasuari dan Korem 181/Praja Vira Tama menjadi salah satu ruang untuk memperkenalkan keberadaan dan peran BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya sekaligus membangun komunikasi awal dengan unsur pimpinan daerah dan pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat Daya. Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam mendukung kondisi keamanan, ketenteraman, dan harmoni sosial sebagai salah satu prasyarat dalam percepatan pembangunan Papua.

Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Memperkuat silaturahmi dan sinergi antara BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dengan Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya. • Memperkenalkan tugas, fungsi, dan peran BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya kepada pemangku kepentingan terkait. • Membangun komunikasi dan koordinasi awal dalam mendukung pelaksanaan fungsi SHEK BPP. • Membuka ruang koordinasi dan diskusi lebih lanjut antara BPP dengan unsur TNI/Polri dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung percepatan pembangunan Papua. • Memperkuat sinergi dalam mendukung terciptanya kondisi keamanan dan harmoni sosial di Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	• Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya. • Pangdam XVIII/Kasuari. • Korem 181/Praja Vira Tama. • Unsur/pemangku kepentingan terkait.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Harmonisasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat Papua Cerdas Papua Produktif Papua Polhukam (Prasyarat Pembangunan/Kondisi Perlu)

Poin-Poin Pembahasan	• Silaturahmi dan penguatan hubungan kelembagaan antara BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dengan Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya. • Pengenalan keberadaan, tugas, fungsi, dan peran BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Penguatan komunikasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan Papua. • Pembahasan awal mengenai peluang koordinasi dan diskusi lebih lanjut antara BPP dengan Korem 181/Praja Vira Tama. • Rencana Korem 181/Praja Vira Tama untuk melakukan kunjungan ke Kantor BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka diskusi dan pengenalan lebih lanjut terkait tugas dan fungsi masing-masing lembaga.
Hasil Kegiatan	1. Terjalin silaturahmi dan sinergi antara BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dengan Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya. 2. Terbangun komunikasi awal antara BPP dengan unsur TNI dan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPP. 3. Terbukanya ruang koordinasi dan komunikasi lebih lanjut antara BPP dengan Korem 181/Praja Vira Tama. 4. Korem 181/Praja Vira Tama menyampaikan rencana untuk berkunjung ke Kantor BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka diskusi dan pengenalan lebih lanjut. 5. Terbangun kesepahaman awal mengenai pentingnya sinergi dan komunikasi lintas sektor

	dalam mendukung percepatan pembangunan serta kondisi keamanan dan harmoni sosial di Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya akan menindaklanjuti rencana kunjungan Korem 181/Praja Vira Tama ke Kantor BPP untuk melaksanakan diskusi lebih lanjut terkait pengenalan tugas dan fungsi kelembagaan serta peluang sinergi dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat Daya. 2. BPP akan memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan unsur Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi SHEK dalam mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus. 3. BPP akan membuka ruang koordinasi lebih lanjut dengan unsur TNI/Polri dan Forkopimda untuk menghimpun informasi, masukan, dan isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan pada Misi Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Polhukam/Damai. 4. Hasil koordinasi lanjutan akan menjadi bahan BPP dalam pelaksanaan SHEK serta penyusunan analisis dan rekomendasi untuk mendukung penguatan sinergi lintas sektor dan percepatan pencapaian sasaran RIPPP dan RAPPP di Provinsi Papua Barat Daya.



Dokumentasi

Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Peran Aktif BPP PBD pada Kegiatan Rapat Koordinasi Perbaikan Tatakelola dan Pencegahan Korupsi Dana Otsus se-Wilayah Tanah Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 16 Juli 2026 Kantor Gubernur Papua
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif. 3. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks rata-rata Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan 2. Indeks Efektivitas Pembinaan Implementasi Program Percepatan Pembangunan Papua 3. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu memastikan setiap tahapan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka memperkuat tata kelola dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus, dilaksanakan Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Dana

	Otonomi Khusus se-Wilayah Tanah Papua yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait. Kegiatan tersebut menghadirkan materi dan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri terkait penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Bagi Badan Pengarah Papua, penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mengawal percepatan pembangunan Papua. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus perlu dipastikan selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) serta diarahkan untuk menjawab kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan OAP. Sehubungan dengan hal tersebut, keikutsertaan BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperoleh informasi dan arahan lintas kementerian/lembaga serta memperkuat komitmen bersama dalam mendorong perbaikan tata kelola Otonomi Khusus di Papua Barat Daya.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Mengikuti dan memperoleh informasi mengenai kebijakan dan strategi perbaikan tata kelola serta pencegahan korupsi dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua.

	• Melaksanakan fungsi SHEK melalui pencermatan terhadap kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus. • Memperoleh masukan dari KPK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan penguatan pengawalan pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua Barat Daya. • Mendorong pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang selaras dengan RIPP, RAPP, serta kebutuhan Orang Asli Papua. • Mengidentifikasi langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan BPP bersama Pemerintah Daerah dalam memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus.
Peserta Kegiatan	• Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Tanah Papua. • Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi di Tanah Papua. • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). • Kementerian Dalam Negeri. • Kementerian Keuangan. • Kementerian PPN/Bappenas. • Kepala Daerah se-Tanah Papua. • Pemangku kepentingan terkait lainnya.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Harmonisasi Evaluasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat

	Papua Cerdas Papua Produktif Papua Polhukam (Prasyarat Pembangunan/Kondisi Perlu)
Poin-Poin Pembahasan	• Penguatan tata kelola Otonomi Khusus Papua agar lebih transparan, akuntabel, efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan OAP. • Penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Otonomi Khusus. • Percepatan penyusunan dan penetapan Perdasus yang diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, khususnya yang berkaitan dengan OAP. • Penguatan regulasi dan sistem/prosedur pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, termasuk mekanisme penerimaan, rekening khusus, tagging, penatausahaan, pelaporan, pengawasan internal, serta integrasi data. • Penguatan tagging dan pelabelan keluaran fisik yang dibiayai dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus. • Penyelarasan perencanaan penggunaan Dana Otonomi Khusus dengan RIPP dan RAPPP serta integrasinya ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. • Penguatan pengelolaan penerimaan Otonomi Khusus melalui rekening khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

	• Penguatan sistem pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Otonomi Khusus. • Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus. • Pembentukan Task Force Interoperabilitas di pemerintah daerah untuk mendukung integrasi SIPD-RI, SIKD-Otsus, dan SIPPP. • Penyampaian laporan tahunan pengelolaan dan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus kepada kementerian/lembaga terkait dan BPP/BP3OKP. • Penguatan keberlanjutan tugas dan fungsi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus. • Percepatan penerapan SIPD Perencanaan dan Penganggaran pada pemerintah daerah se-Tanah Papua. • Penguatan peran APIP sebagai quality assurance dan early warning system dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus. • Penguatan akuntabilitas melalui perencanaan berbasis kebutuhan dan partisipatif, pelaksanaan efektif dan efisien, pelaporan tepat waktu dan transparan, serta pertanggungjawaban berbasis kinerja dan hasil pembangunan. • Peningkatan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan Dana Otonomi Khusus melalui kanal resmi pemerintah daerah. • Penguatan integritas pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus. • Memastikan penggunaan Dana Otonomi Khusus hanya untuk program dan kegiatan yang selaras dengan RIPPP, RAPPP, dan kebutuhan OAP.
--	---

	• Penguatan dan pemutakhiran basis data penerima manfaat Dana Otonomi Khusus, khususnya OAP, masyarakat adat, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. • Percepatan tindak lanjut atas hasil revidu, monitoring, evaluasi, audit, pemeriksaan, dan rekomendasi pengawasan dari APIP, BPK, BPKP, KPK, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, dan lembaga pengawasan lainnya.
Hasil Kegiatan	1. BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya memperoleh informasi dan arahan dari KPK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan LKPP mengenai penguatan tata kelola dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus. 2. Terbangun kesepahaman lintas pemerintah daerah dan kementerian/lembaga mengenai pentingnya penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus pada seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 3. Disepakati 18 butir Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua sebagai rencana aksi untuk memperkuat sinergi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus. 4. BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya turut menjadi bagian yang menyaksikan penandatanganan Komitmen Bersama tersebut bersama para pemangku kepentingan se-Tanah Papua. 5. Komitmen bersama menegaskan pentingnya memastikan penggunaan Dana Otonomi Khusus

	selaras dengan RIPPP, RAPPP, serta kebutuhan Orang Asli Papua. 6. Menguatnya perhatian terhadap pentingnya interoperabilitas SIPD-RI, SIKD-Otsus, dan SIPPP dalam mendukung perencanaan dan penganggaran Otonomi Khusus. 7. Menguatnya komitmen terhadap pengawasan, transparansi, pengaduan masyarakat, peran APIP, integritas pengadaan barang/jasa, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan. 8. Tersedianya bahan bagi BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan pengawalan dan tindak lanjut terhadap implementasi tata kelola Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya akan mengawal tindak lanjut 18 butir Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua, khususnya yang menjadi kewenangan dan relevan dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya. 2. BPP akan mendorong agar perencanaan dan penggunaan Dana Otonomi Khusus di Papua Barat Daya semakin selaras dengan RIPPP dan RAPPP, serta berorientasi pada kebutuhan dan manfaat nyata bagi OAP. 3. BPP akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah terkait untuk mencermati implementasi komitmen, khususnya pada aspek perencanaan, tagging, interoperabilitas data, pengawasan, dan akuntabilitas Dana Otonomi Khusus. 4. Hasil kegiatan dan 18 butir Komitmen Bersama menjadi bahan BPP dalam pelaksanaan fungsi

	SHEK serta penyusunan analisis dan rekomendasi kepada Pimpinan. 5. BPP akan memperkuat koordinasi dengan KPK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga terkait dalam rangka mendukung perbaikan tata kelola dan efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua Barat Daya. 6. BPP akan mendorong pemerintah daerah untuk memastikan tindak lanjut hasil reviu, monitoring, evaluasi, audit, dan pemeriksaan atas pengelolaan Dana Otonomi Khusus dilaksanakan secara tepat waktu sesuai kewenangan.
Dokumentasi	 

Kegiatan 4

Nama Kegiatan	Peran Aktif SHEK BPP PBD pada Kegiatan Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dengan Gubernur dan Bupati/Walikota se-Tanah Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 30 Juli 2026 Virtual/Daring (Zoom Meetings) Ballroom (Borum) Gedung BPKAD Kabupaten Mimika
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif.
IKU Pokja	1. Indeks rata-rata Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan 2. Indeks Efektivitas Pembinaan Implementasi Program Percepatan Pembangunan Papua
Latar Belakang	Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 yang menjadi arah pembangunan Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus. Implementasi RAPPP membutuhkan keterpaduan antara perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak nyata bagi Orang Asli Papua (OAP). Dalam rangka memperkuat penyelarasan tersebut, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas melaksanakan Dialog Strategis bersama Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua pada 30 Juli

	2026. Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas arah pembangunan Papua, evaluasi keselarasan program daerah dengan RAPP, penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus, kapasitas fiskal daerah, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta berbagai isu strategis yang dihadapi pemerintah daerah. Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Keikutsertaan BPP diarahkan untuk memperoleh informasi dan arahan kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat, mencermati aspirasi dan permasalahan yang disampaikan pemerintah daerah, serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pengawalan implementasi RAPP di Papua Barat Daya.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Memperoleh informasi dan arahan strategis terkait implementasi RIPP dan RAPP Tahun 2025–2029. • Mencermati tingkat keselarasan program dan perencanaan daerah dengan sasaran RAPP. • Mengidentifikasi berbagai isu dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam implementasi Otonomi Khusus, termasuk aspek fiskal, infrastruktur, pelayanan dasar, dan tata kelola. • Menyerap aspirasi pemerintah daerah sebagai bahan pelaksanaan fungsi SHEK BPP. • Memperkuat koordinasi antara BPP, pemerintah daerah, dan Kementerian PPN/Bappenas dalam pengawalan percepatan pembangunan Papua.

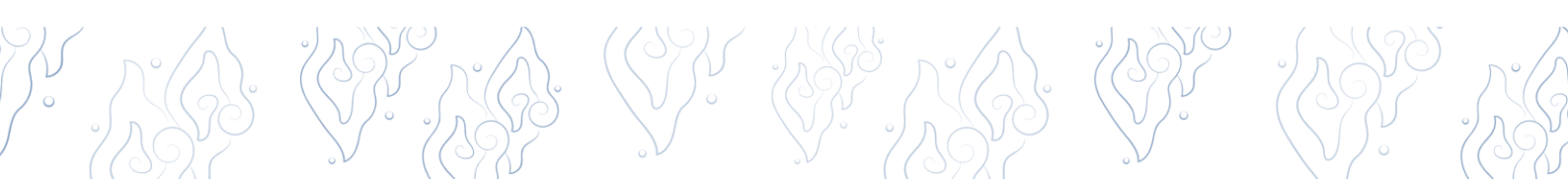
Peserta Kegiatan	Pemerintah Pusat: • Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas; • Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas; • Pejabat dan perencana di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas; • Perwakilan Kementerian Dalam Negeri; • Perwakilan Kementerian Keuangan; • Kementerian/Lembaga terkait. Pemerintah Daerah se-Tanah Papua: • Gubernur/Wakil Gubernur; • Bupati/Wakil Bupati; • Wali Kota/Wakil Wali Kota; • Bapperida/Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lainnya: • Badan Pengarah Papua (BPP); • Komite Eksekutif Papua; • pemangku kepentingan terkait. Data peserta tersebut mencakup unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah se-Tanah Papua, BPP/BP3OKP, serta pemangku kepentingan lainnya.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Harmonisasi Evaluasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat Papua Cerdas

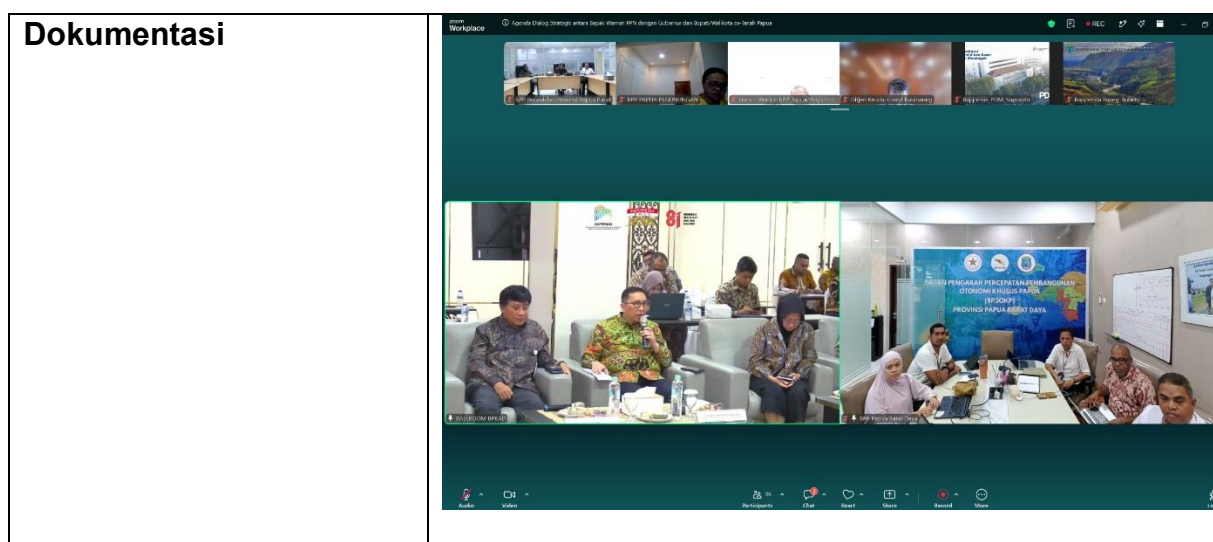
	Papua Produktif Papua Polhukam (Prasyarat Pembangunan/Kondisi Perlu)
Poin-Poin Pembahasan	• Penyelarasan program, kegiatan, dan penganggaran pemerintah daerah dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 sebagai pedoman utama dalam memastikan pembangunan daerah mendukung sasaran percepatan pembangunan Papua. • Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas menyampaikan bahwa tingkat keselarasan usulan daerah dengan RAPPP pada 33 pemerintah daerah yang telah mengunci Berita Acara Musrenbang Otsus di SIPPP rata-rata baru mencapai 52,27%, sedangkan Provinsi Papua Barat Daya tercatat memiliki tingkat keselarasan sebesar 32,92%, sehingga masih diperlukan penguatan penyelarasan program dan kegiatan daerah dengan RAPPP. • Penguatan pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus sebagai ruang partisipatif untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan program yang direncanakan menjawab akar persoalan pembangunan Papua sekaligus mendukung sasaran RAPPP Tahun 2025–2029. • Penguatan pemanfaatan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) sebagai platform bersama dan knowledge hub pembangunan Papua untuk mendukung keterpaduan data, koordinasi, pemantauan

	pelaksanaan RAPPP, serta peningkatan ketepatan sasaran kebijakan. • Penguatan tata kelola pelaksanaan RAPPP secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, termasuk memastikan program yang dibiayai Dana Otonomi Khusus memiliki kesesuaian dengan RAPPP dan tercantum dalam SIPPP. • Penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengarah Papua, Komite Eksekutif Papua, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan mitra pembangunan dalam mendukung implementasi RAPPP. • Penguatan pendampingan pembangunan Papua dalam aspek tata kelola, kapasitas kelembagaan, kualitas perencanaan, investasi, dan implementasi Otonomi Khusus untuk membantu pemerintah daerah mengatasi berbagai kendala pembangunan. • Pembentukan dan optimalisasi tim asistensi oleh Kementerian PPN/Bappenas yang akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membantu mengurai kendala implementasi, mempercepat penyelesaian masalah, memperkuat kualitas perencanaan, dan mengoptimalkan peluang pendanaan pembangunan.
Hasil Kegiatan	1. Diperoleh informasi bahwa tingkat keselarasan usulan daerah dengan RAPPP pada 33 Pemda yang telah mengunci Berita Acara Musrenbang Otsus di SIPPP rata-rata mencapai 52,27%, sedangkan Papua Barat Daya tercatat sebesar 32,92%, yang menunjukkan perlunya penguatan penyelarasan perencanaan dan program pembangunan daerah dengan RAPPP.

	2. Diperoleh arahan agar pemerintah daerah memastikan seluruh program, kegiatan, dan penganggaran daerah selaras dengan RAPP Tahun 2025–2029 serta mendukung prioritas pembangunan nasional. 3. Diperoleh arahan penguatan tata kelola implementasi RAPP secara akuntabel dengan memastikan kesesuaian program terhadap RAPP dan pengawalan pelaksanaannya. 4. Diperoleh arahan penguatan pemanfaatan SIPPP sebagai platform bersama dalam mendukung keterpaduan data, koordinasi, pemantauan pelaksanaan RAPP, dan ketepatan sasaran kebijakan pembangunan Papua. 5. Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan rencana pembentukan dan optimalisasi tim asistensi yang akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas perencanaan dan penyelesaian kendala implementasi pembangunan. 6. BPP memperoleh bahan evaluasi dan arahan strategis yang dapat digunakan dalam pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi dalam mengawal implementasi RAPP di Provinsi Papua Barat Daya. 7. Dialog strategis memperkuat pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPP, Komite Eksekutif Papua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas implementasi RAPP.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. Melakukan pencermatan dan evaluasi terhadap tingkat keselarasan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan

	RAPPP Tahun 2025–2029, dengan perhatian khusus terhadap capaian keselarasan yang masih berada pada angka 32,92%. 2. Mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan keselarasan program, kegiatan, dan penganggaran daerah dengan RAPPP Tahun 2025–2029. 3. Memperkuat koordinasi BPP dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Bappeda/Bapperida, dan OPD terkait dalam mengidentifikasi program yang belum selaras dengan RAPPP serta merumuskan langkah perbaikannya. 4. Mendorong optimalisasi SIPPP sebagai instrumen pendataan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan RAPPP di Provinsi Papua Barat Daya. 5. Berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait mekanisme pendampingan dan tim asistensi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan keselarasan program daerah dengan RAPPP. 6. Menjadikan hasil evaluasi keselarasan RAPPP sebagai salah satu bahan pelaksanaan fungsi SHEK BPP PBD dalam memberikan pertimbangan, arahan, dan rekomendasi terhadap permasalahan dan isu strategis pembangunan di Papua Barat Daya.
--	---





Kegiatan 5

Nama Kegiatan	Peran Aktif SHEK BPP PBD pada Kegiatan FGD Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 30 Juli 2026 ACC Aimas Hotel, Kabupaten Sorong
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 3. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks rata-rata Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan 2. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 3. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Data administrasi kependudukan merupakan salah satu aset strategis pemerintah yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik,

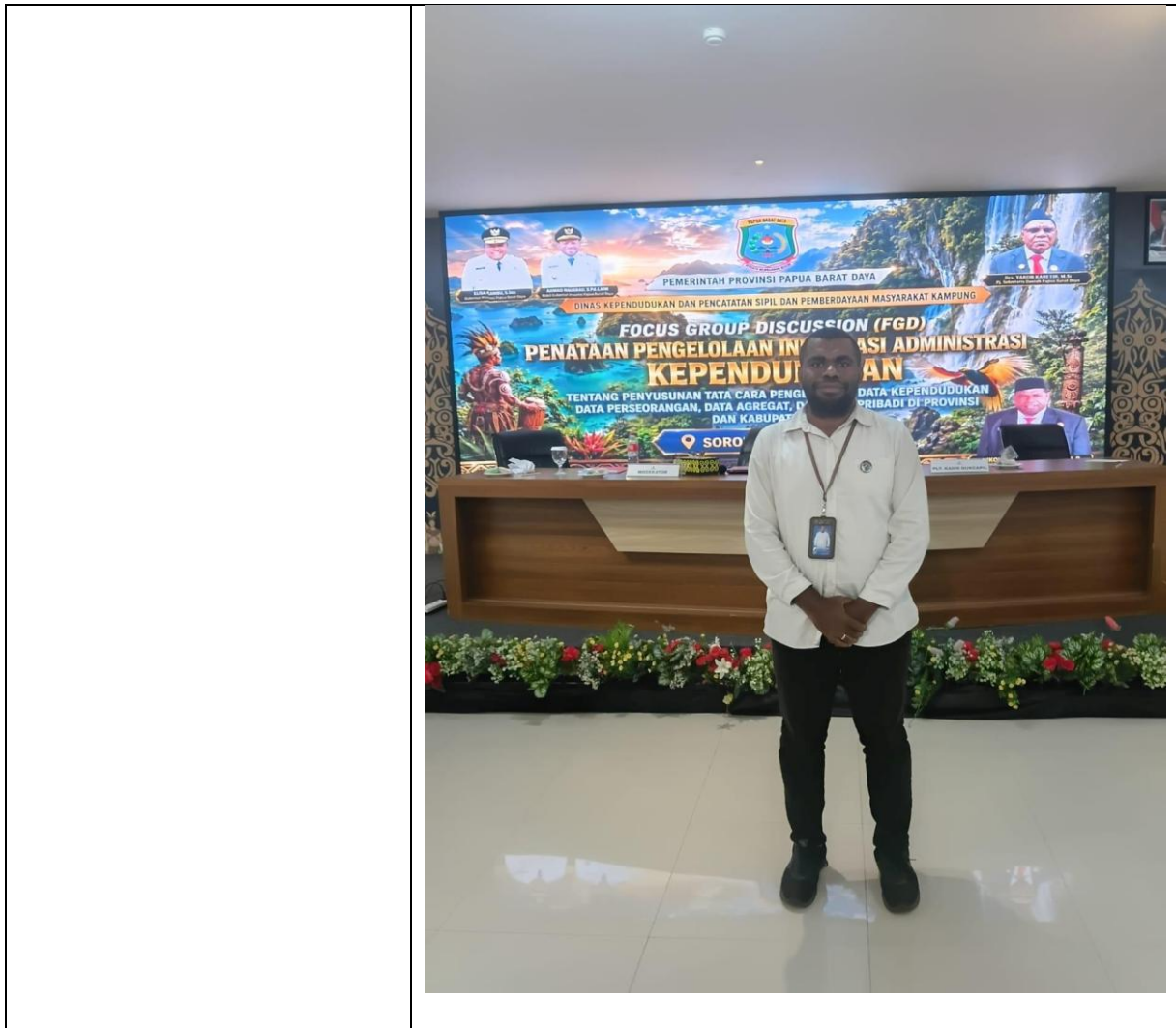
	perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, penegakan hukum, penyelenggaraan demokrasi, serta berbagai kebijakan pemerintah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dan instansi vertikal, diperlukan tata kelola informasi administrasi kependudukan yang menjamin keamanan, kerahasiaan, akurasi, integritas, dan pemanfaatan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Provinsi Papua Barat Daya, kebutuhan akan pedoman pengelolaan data kependudukan semakin penting mengingat tingginya kebutuhan integrasi data antarperangkat daerah, percepatan transformasi digital pemerintahan, serta perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan tata cara pengelolaan Data Kependudukan, Data Perseorangan, Data Agregat, dan Data Pribadi yang dapat menjadi pedoman bersama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Melalui Focus Group Discussion (FGD) ini diharapkan diperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan sehingga menghasilkan rumusan kebijakan yang komprehensif, implementatif, serta sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Provinsi Papua Barat Daya.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Memperoleh informasi dan pemahaman mengenai arah kebijakan penyusunan tata cara pengelolaan Data Kependudukan, Data Perseorangan, Data Agregat, dan Data Pribadi di Provinsi Papua Barat Daya.

	• Memberikan masukan strategis agar tata kelola data kependudukan dapat mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program percepatan pembangunan Papua, khususnya yang berkaitan dengan Orang Asli Papua (OAP), data terpilah OAP. • Mendorong tersedianya sistem pengelolaan data yang akurat, terintegrasi, dan terlindungi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran di Provinsi Papua Barat Daya. • Membangun sinergi dan koordinasi antara BPP dengan Dinas Dukcapil, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pemanfaatan data kependudukan untuk implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). • Mengidentifikasi peluang penyusunan kebijakan pendataan terpilah Orang Asli Papua (OAP) yang selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peserta Kegiatan	• Dukcapil Provinsi Papua Barat Daya • Dukcapil Kota Sorong • Dukcapil Kab.Sorong • Dukcapil Kab.Sorong Selatan • Dukcapil Kab.Raja Ampat • Dukcapil Kab.Tambrau • Para Lurah • Kepala distrik kabupaten Sorong • Kepala Distrik kota Sorong • Ketua KPU PBD dan • Anggota Pokja Papua Damai BPP PBD (Virginus Senau Air Turot, B.Sc.)

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Harmonisasi Evaluasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat Papua Cerdas Papua Produktif Papua Polhukam (Prasyarat Pembangunan/Kondisi Perlu)
Poin-Poin Pembahasan	• Penjelasan mengenai pengertian data kependudukan, data perseorangan, data agregat, dan data pribadi. • Setiap OPD yang menggunakan data kependudukan perlu melakukan PKS dengan Dukcapil agar penggunaan data sesuai aturan dan kerahasiaannya terjamin. • Data kependudukan harus dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pelayanan publik, tidak hanya digunakan saat pemilu. • Perlu adanya sistem atau server yang dapat memantau perkembangan pelayanan dan pendataan Dukcapil kabupaten/kota secara langsung oleh pemerintah provinsi. • Masih ditemukan kendala dalam pengelolaan data, seperti data penduduk yang belum akurat (lahir, meninggal, pindah), keterbatasan anggaran operasional, dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi.

	• Perlu menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi dalam setiap proses pengelolaan data kependudukan. • Pendataan Orang Asli Papua (OAP) perlu terus dipercepat melalui validasi dan verifikasi agar menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah. • Dukcapil perlu terus melakukan inovasi pelayanan, seperti pelayanan di luar jam kerja, Dukcapil Goes to Campus, dan penyerahan KTP kepada pelajar yang telah berusia 17 tahun. • KPU Papua Barat Daya menyampaikan pentingnya sinkronisasi data dengan Dukcapil agar pemutakhiran data pemilih berjalan lebih baik menjelang Pemilu 2029. • Masing-masing Dukcapil kabupaten/kota menyampaikan progres pendataan OAP di wilayahnya
Hasil Kegiatan	1. Peserta memperoleh pemahaman yang sama mengenai tata cara pengelolaan data kependudukan di Provinsi Papua Barat Daya. 2. Disepakati bahwa seluruh OPD yang memanfaatkan data kependudukan perlu membangun kerja sama (PKS) dengan Dukcapil. 3. Teridentifikasi beberapa kendala dalam pengelolaan data kependudukan yang perlu segera ditindaklanjuti, terutama terkait validitas data dan koordinasi antarinstansi. 4. Terbangun komitmen antara Dukcapil, KPU, dan instansi terkait untuk memperkuat sinkronisasi data kependudukan dan data pemilih. 5. Diperoleh informasi perkembangan pendataan terpilah OAP dari seluruh kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi Pemerintah Provinsi.

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. Menyusun tata cara pengelolaan data kependudukan sebagai pedoman bagi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya. 2. Mendorong seluruh OPD segera melakukan PKS dengan Dukcapil sebelum memanfaatkan data kependudukan. 3. Mengembangkan sistem monitoring atau dashboard untuk memantau progres pelayanan dan pendataan Dukcapil kabupaten/kota dimonitori oleh Dukcapil Provinsi. 4. Memperkuat koordinasi rutin antara Dukcapil, KPU, Bawaslu, dan instansi terkait dalam pemutakhiran data kependudukan dan data pemilih. 5. Mempercepat penyelesaian validasi dan verifikasi data terpilah Orang Asli Papua (OAP) di seluruh kabupaten/kota. 6. Menindaklanjuti usulan Pokja BPP terkait pelaksanaan SHEK Tematik pada bulan Agustus yang melibatkan seluruh kepala daerah di Papua Barat Daya dengan salah satu poin pembahasannya adalah Prioritas Program Strategis Bersama terkait pendataan Terpilah OAP (sharing anggaran antara Pemkab/Pemkot dengan Pemprov).
Dokumentasi	



Kegiatan 6

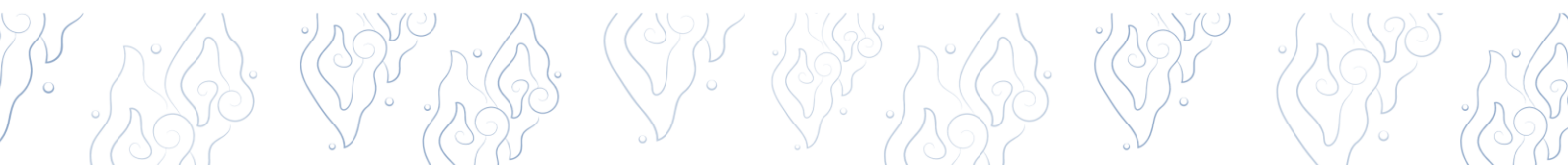
Nama Kegiatan	SHEK Anggota BPP bersama Sekretariat Wakil Presiden RI
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 30 Juli 2026 Sekretariat Wakil Presiden RI, Jakarta
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif. 3. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif.

IKU Pokja	1. Indeks rata-rata Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan 2. Indeks Efektivitas Pembinaan Implementasi Program Percepatan Pembangunan Papua 3. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua (BPP), khususnya Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua, Anggota BPP Perwakilan dari lima provinsi di Tanah Papua menghadiri agenda pertemuan di Sekretariat Wakil Presiden RI pada tanggal 30 Juli 2026. Pertemuan tersebut pada awalnya direncanakan sebagai agenda pleno bersama Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Badan Pengarah Papua. Namun, agenda pleno dimaksud mengalami penundaan. Selanjutnya, Anggota BPP Perwakilan tetap melaksanakan pertemuan bersama Asisten Deputi Bidang Politik, Keamanan, Hukum, dan HAM Sekretariat Wakil Presiden RI untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan fungsi SHEK serta berbagai isu strategis pembangunan di wilayah Papua yang memerlukan dukungan, fasilitasi, dan koordinasi Pemerintah Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan sejumlah isu strategis yang telah menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi SHEK, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, penguatan sistem rujukan kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit Regional, penguatan tata kelola

	pendidikan, pengembangan Akademi Komunitas, serta kebutuhan penguatan mekanisme koordinasi antara BPP Perwakilan dengan Ketua Badan Pengarah Papua melalui Sekretariat Wakil Presiden. Penyampaian isu tersebut merupakan bagian dari upaya BPP untuk memastikan berbagai permasalahan pembangunan yang memerlukan intervensi lintas kementerian/lembaga dapat memperoleh perhatian dan dukungan pada tingkat Pemerintah Pusat. Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang komunikasi strategis untuk menyampaikan hasil pelaksanaan SHEK di daerah sekaligus memperoleh dukungan terhadap percepatan penyelesaian isu pembangunan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi SHEK BPP dalam menyampaikan perkembangan pelaksanaan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. • Menyampaikan isu strategis daerah yang membutuhkan dukungan, fasilitasi, dan koordinasi Pemerintah Pusat. • Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas dan pelayanan dasar masyarakat. • Mendorong penguatan sistem rujukan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya. • Mendorong penguatan tata kelola pendidikan dan pengembangan pendidikan vokasi di Papua Barat Daya.

	Memperkuat koordinasi antara BPP Perwakilan dengan Sekretariat Wakil Presiden selaku bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan tugas BPP di Tanah Papua.
Peserta Kegiatan	- Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. - Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua. - Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat. - Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Selatan. - Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Tengah. - Deputi dan Asisten Deputi Bidang Politik, Keamanan, Hukum, dan HAM Sekretariat Wakil Presiden RI.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Harmonisasi Evaluasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat Papua Cerdas Papua Produktif Papua Polhukam (Prasyarat Pembangunan/Kondisi Perlu)
Poin-Poin Pembahasan	Percepatan pembangunan ruas jalan Susumuk–Bintuni di Kabupaten Maybrat dan Mare–Fef di Kabupaten Tamberau sebagai infrastruktur strategis kawasan yang telah menjadi bagian dari pelaksanaan SHEK BPP Papua Barat Daya bersama pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga.

	• Pembangunan ruas jalan Susumuk–Bintuni dan Mare–Fef memiliki nilai strategis dalam membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat, serta mendukung stabilitas keamanan dan pencapaian Misi Papua Damai, Papua Produktif, Papua Cerdas, dan Papua Sehat. • BPP Papua Barat Daya mendorong adanya dukungan dan arahan Presiden melalui Wakil Presiden kepada kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat pembangunan ruas jalan Susumuk–Bintuni dan Mare–Fef sebagai infrastruktur strategis dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Papua Barat Daya. • Penguatan sistem rujukan kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit Regional atau Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan di Kota Sorong, mengingat Papua Barat Daya belum memiliki rumah sakit rujukan tersier yang mampu menyediakan pelayanan spesialisik dan subspesialisik secara komprehensif. • Rumah Sakit Regional Vertikal Kementerian Kesehatan di Kota Sorong dipandang strategis karena dapat menjadi bagian dari jejaring rujukan nasional, didukung pembiayaan APBN, memenuhi kebutuhan dokter subspesialis dan peralatan medis berteknologi tinggi, serta berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan, penelitian, dan pengampu bagi wilayah Papua Barat Daya, Papua Barat, dan sebagian Papua Tengah.
--	--



	• BPP Papua Barat Daya mendorong dukungan Wakil Presiden kepada Kementerian Kesehatan agar pembangunan Rumah Sakit Regional Vertikal Kementerian Kesehatan di Kota Sorong dapat menjadi salah satu prioritas nasional dalam penguatan sistem rujukan kesehatan kawasan Papua bagian Barat. • Penguatan implementasi Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 dalam rangka penyelesaian permasalahan kekurangan guru pada sekolah swasta di Papua Barat Daya, khususnya sekolah yang mayoritas peserta didiknya merupakan Orang Asli Papua. • Implementasi Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 masih menghadapi kendala karena Sistem IMUT pada BKN belum berfungsi secara optimal sehingga proses redistribusi Guru ASN/PPPK ke satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat belum dapat berjalan efektif. • BPP Papua Barat Daya mendorong koordinasi dan fasilitasi percepatan implementasi Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 melalui pengoperasian Sistem IMUT pada BKN agar redistribusi Guru ASN ke sekolah swasta dapat segera dilaksanakan. • Penguatan pengelolaan Akademi Komunitas sebagai bagian dari pengembangan pendidikan vokasi di Provinsi Papua Barat Daya sesuai amanat PP Nomor 106 Tahun 2021. • Masih terdapat tantangan dalam pengelolaan pendidikan, termasuk pemanfaatan anggaran pendidikan dan Dana Otonomi Khusus pada program yang berada di luar kewenangan
--	---

	pemerintah provinsi sehingga belum sepenuhnya efektif, efisien, dan optimal dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. • Optimalisasi implementasi PP Nomor 106 Tahun 2021 diperlukan untuk memberikan kepastian tata kelola dan pembagian kewenangan dalam pengelolaan Akademi Komunitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta mendukung pengembangan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan daerah. • BPP Papua Barat Daya mendorong dukungan Wakil Presiden selaku Ketua BPP melalui Sekretariat Wakil Presiden untuk memfasilitasi pembahasan lintas kementerian/lembaga dalam penyusunan regulasi pelaksanaan PP Nomor 106 Tahun 2021 mengenai pengelolaan Akademi Komunitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi. • Penguatan mekanisme koordinasi antara BPP Perwakilan di wilayah/Daerah Otonom Baru dengan Ketua Badan Pengarah Papua melalui Sekretariat Wakil Presiden untuk mempercepat penyampaian perkembangan SHEK, isu strategis daerah, dan kebutuhan dukungan kebijakan yang memerlukan intervensi Pemerintah Pusat. • BPP Papua Barat Daya mengusulkan adanya mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur melalui penunjukan satu pejabat atau staf pada Sekretariat Wakil Presiden sebagai focal point komunikasi bagi BPP Perwakilan di setiap wilayah/Daerah Otonom Baru.
Hasil Kegiatan	1. Tersampainya perkembangan pelaksanaan fungsi SHEK BPP Papua Barat Daya dan berbagai isu strategis pembangunan kepada Asisten Deputi

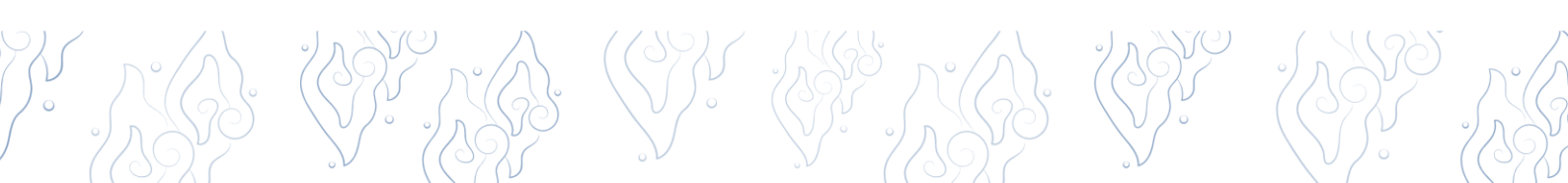
	Bidang Politik, Keamanan, Hukum, dan HAM Sekretariat Wakil Presiden RI. 2. Tersampaikannya kebutuhan percepatan pembangunan ruas jalan Susumuk–Bintuni dan Mare–Fef sebagai infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas wilayah, pelayanan dasar, perekonomian masyarakat, dan stabilitas keamanan. 3. Tersampaikannya usulan pembangunan Rumah Sakit Regional Vertikal Kementerian Kesehatan di Kota Sorong sebagai bagian dari penguatan sistem rujukan kesehatan kawasan Papua bagian Barat. 4. Tersampaikannya kebutuhan percepatan implementasi Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025, khususnya melalui pengoperasian Sistem IMUT pada BKN untuk mendukung redistribusi Guru ASN ke sekolah swasta. 5. Tersampaikannya kebutuhan fasilitasi lintas kementerian/lembaga dalam penguatan regulasi pelaksanaan PP Nomor 106 Tahun 2021 untuk mendukung pengelolaan Akademi Komunitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi. 6. Tersampaikannya kebutuhan penguatan mekanisme komunikasi antara BPP Perwakilan dengan Ketua Badan Pengarah Papua melalui Sekretariat Wakil Presiden dalam rangka mempercepat penyampaian isu strategis dan tindak lanjut pelaksanaan fungsi SHEK. 7. Terbangunnya komunikasi dan koordinasi antara BPP Perwakilan dari lima provinsi di Tanah Papua dengan Sekretariat Wakil Presiden dalam mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus.
--	--

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. BPP Papua Barat Daya menindaklanjuti hasil pertemuan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait terhadap isu strategis yang telah disampaikan kepada Sekretariat Wakil Presiden RI. 2. Memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah terkait untuk mengawal percepatan pembangunan ruas jalan Susumuk–Bintuni dan Mare–Fef. 3. Mendorong tindak lanjut dengan Kementerian Kesehatan terkait usulan pembangunan Rumah Sakit Regional Vertikal Kementerian Kesehatan di Kota Sorong. 4. Mendorong fasilitasi penyelesaian kendala Sistem IMUT pada BKN agar implementasi Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 dapat segera berjalan dan redistribusi Guru ASN ke sekolah swasta dapat dilaksanakan. 5. Mendorong Sekretariat Wakil Presiden untuk memfasilitasi pembahasan lintas kementerian/lembaga terkait regulasi pelaksanaan PP Nomor 106 Tahun 2021 mengenai pengelolaan Akademi Komunitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi. 6. Mendorong terbentuknya mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur antara BPP Perwakilan dengan Ketua Badan Pengarah Papua melalui Sekretariat Wakil Presiden, termasuk melalui penunjukan focal point. 7. Menjadikan hasil pertemuan sebagai bahan penguatan fungsi SHEK BPP Papua Barat Daya dalam mengawal isu strategis yang membutuhkan
--	--

	dukungan kebijakan dan koordinasi Pemerintah Pusat.
Dokumentasi	 

Kegiatan 7

Nama Kegiatan	SHEK BPP PBD bersama BPJS Kesehatan Cabang Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 31 Juli 2026 Sekretariat BPP Papua Barat Daya



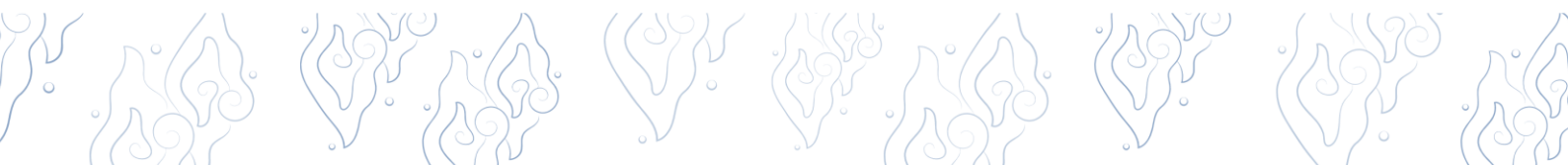
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif.
IKU Pokja	1. Indeks rata-rata Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan 2. Indeks Efektivitas Pembinaan Implementasi Program Percepatan Pembangunan Papua
Latar Belakang	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, tetapi juga oleh keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Di Provinsi Papua Barat Daya, masih terdapat berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, antara lain persoalan kepesertaan, akses dan kualitas pelayanan pada fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta koordinasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal. Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan koordinasi bersama BPJS Kesehatan Cabang Sorong

	untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan di lapangan sekaligus mendorong penguatan sinergi dalam penyelenggaraan Program JKN. Pertemuan ini juga menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai isu yang berkaitan dengan kepesertaan dan pelayanan kesehatan di wilayah Papua Barat Daya. Pelaksanaan koordinasi tersebut selaras dengan arah percepatan pembangunan Papua sebagaimana RIPPP dan RAPPP, khususnya dalam mendukung Misi Papua Sehat serta penguatan kondisi masyarakat yang sehat dan produktif. Melalui koordinasi ini diharapkan berbagai permasalahan pelayanan dan kepesertaan dapat ditindaklanjuti secara bersama sehingga manfaat program pemerintah semakin tepat sasaran dan dirasakan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) antara BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dengan BPJS Kesehatan Cabang Sorong. • Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan Program JKN di wilayah Papua Barat Daya. • Mendorong peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat Daya. • Memperkuat koordinasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait. • Mendorong penyelesaian berbagai permasalahan kepesertaan, pelayanan kesehatan, dan ketersediaan obat-obatan.

	• Mendukung pelaksanaan Misi Papua Sehat dan Papua Produktif melalui penguatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Peserta Kegiatan	• Anggota Pokja Papua Sehat BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Anggota Pokja Papua Produktif BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong. • Jajaran BPJS Kesehatan Cabang Sorong.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	• Gambaran kepesertaan Program JKN dan berbagai tantangan kepesertaan masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. • Penonaktifan sekitar 70.000 penduduk miskin di Kota Sorong sebagai dampak perubahan data desil dari Kementerian Sosial. • Permasalahan tunggakan iuran bagi perangkat desa (KPD) di Kabupaten Maybrat sejak April sampai dengan Juli yang berdampak pada akses terhadap pelayanan kesehatan. • Kendala komunikasi antara rumah sakit dan pasien dalam menjelaskan prosedur penjaminan kasus kecelakaan, khususnya terkait posisi BPJS Kesehatan sebagai penjamin kedua setelah Jasa Raharja. • Keterbatasan alat medis esensial pada fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain kebutuhan alat

	kraniotomi di RSUD Sele Be Solu yang berdampak pada proses pelayanan pasien. • Adanya laporan mengenai pungutan biaya tambahan atau iur biaya kepada peserta serta pembatasan hari rawat inap yang perlu menjadi perhatian dalam pengawasan pelayanan kesehatan. • Adanya ketidakkonsistenan antar rumah sakit mengenai cakupan pemberian kantong darah yang ditanggung dalam pelayanan peserta JKN. • Kekosongan obat-obatan untuk penyakit kronis, seperti hipertensi dan diabetes, pada apotek mitra, terutama pada periode akhir dan awal tahun, yang berdampak terhadap peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). • Pentingnya pemutakhiran dan integrasi data kepesertaan antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah, khususnya data masyarakat miskin dan kelompok yang membutuhkan dukungan pelayanan kesehatan. • Pentingnya penguatan koordinasi BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan memastikan hak peserta JKN terpenuhi.
Hasil Kegiatan	1. Terbangunnya kesepahaman antara BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dan BPJS Kesehatan Cabang Sorong mengenai pentingnya penguatan koordinasi dalam penyelenggaraan Program JKN. 2. Teridentifikasinya sejumlah permasalahan kepesertaan dan pelayanan kesehatan di Papua Barat Daya yang memerlukan tindak lanjut bersama.

	3. BPJS Kesehatan menyampaikan komitmen untuk melibatkan BPP dalam forum kemitraan serta forum pengelolaan kepesertaan di tingkat kabupaten/kota. 4. BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi internal dan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Maybrat terkait penyelesaian tunggakan kepesertaan perangkat desa (KPD). 5. BPJS Kesehatan berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan melalui kunjungan pelanggan (customer visit) secara berkala dan mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pungutan biaya tambahan atau iur biaya yang tidak sesuai regulasi. 6. BPJS Kesehatan akan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial terkait pemutakhiran data masyarakat miskin serta kepesertaan JKN. 7. BPJS Kesehatan akan mendorong penguatan koordinasi terkait ketersediaan obat-obatan melalui komunikasi dengan distributor dan dukungan pemerintah daerah. 8. BPJS Kesehatan akan mengoptimalkan keberadaan petugas BPJS SATU (BPJS Siap Membantu) pada titik layanan rumah sakit untuk memastikan peserta memperoleh informasi yang benar mengenai hak dan kewajibannya. 9. Terbangunnya ruang koordinasi antara BPP Papua Barat Daya dan BPJS Kesehatan dalam mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan serta penguatan produktivitas
--	--



	masyarakat melalui perlindungan jaminan kesehatan.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. Memperkuat koordinasi antara BPP, BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelesaian permasalahan Program JKN. 2. Mendorong percepatan pemutakhiran data kepesertaan JKN, khususnya data masyarakat miskin, Orang Asli Papua, dan kelompok rentan agar kepesertaan tepat sasaran. 3. Mengawal penyelesaian permasalahan kepesertaan perangkat desa (KPD) di Kabupaten Maybrat agar dapat kembali memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. 4. Mendorong peningkatan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan tidak terjadi pungutan biaya tambahan atau iur biaya kepada peserta di luar ketentuan. 5. Mendorong peningkatan ketersediaan obat-obatan bagi peserta, khususnya obat penyakit kronis yang dibutuhkan secara berkelanjutan. 6. Memperkuat mekanisme komunikasi dan penyampaian informasi kepada peserta JKN mengenai hak, kewajiban, serta prosedur pelayanan dan penjaminan. 7. Mendorong BPJS Kesehatan untuk melibatkan BPP secara berkelanjutan dalam forum koordinasi dan kemitraan di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi SHEK. 8. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil koordinasi sebagai bagian dari pengawalan BPP terhadap implementasi Misi Papua Sehat dan Papua Produktif.

Dokumentasi

BAB IV

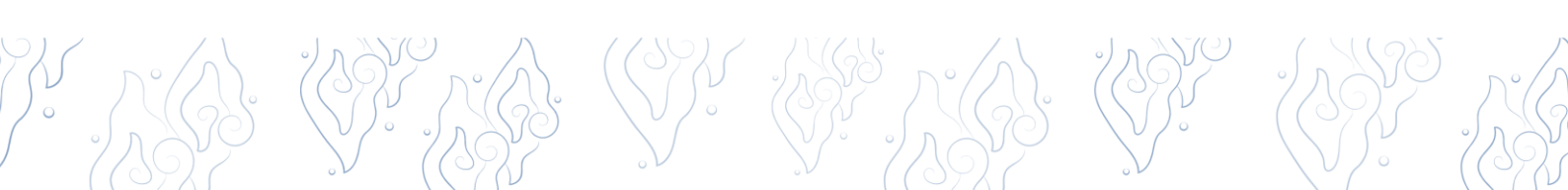
CAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

4.1 Capaian

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya selama bulan Juli 2026, telah dilaksanakan berbagai kegiatan strategis yang mencakup Misi Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai, serta kegiatan strategis gabungan lintas misi. Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan berbagai capaian sebagai berikut:

1. Penguatan Pelaksanaan SHEK dan Kolaborasi Lintas Sektor

- a. Terlaksananya fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) melalui koordinasi, monitoring, evaluasi, audiensi, forum, pendampingan, dan peningkatan kapasitas bersama pemerintah daerah, perangkat daerah, fasilitas kesehatan, perguruan tinggi, organisasi profesi, aparat keamanan, dunia usaha, masyarakat adat, mitra pembangunan, serta Sekretariat Wakil Presiden RI..
- b. Menguatnya koordinasi antara BPP Papua Barat Daya dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RIPPP, RAPPP, dan Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB).
- c. Teridentifikasinya berbagai isu strategis pembangunan yang memerlukan tindak lanjut lintas sektor, baik pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi produktif, keamanan, tata kelola data, maupun penguatan koordinasi pusat dan daerah.
- d. Tersampainya berbagai isu strategis pembangunan Papua Barat Daya kepada Sekretariat Wakil Presiden RI sebagai bahan dukungan dan fasilitasi Pemerintah Pusat. Isu tersebut antara lain konektivitas wilayah, pembangunan Rumah Sakit Regional Vertikal, tata kelola pendidikan, pengembangan Akademi Komunitas, serta penguatan mekanisme koordinasi BPP Perwakilan dengan Sekretariat Wakil Presiden.

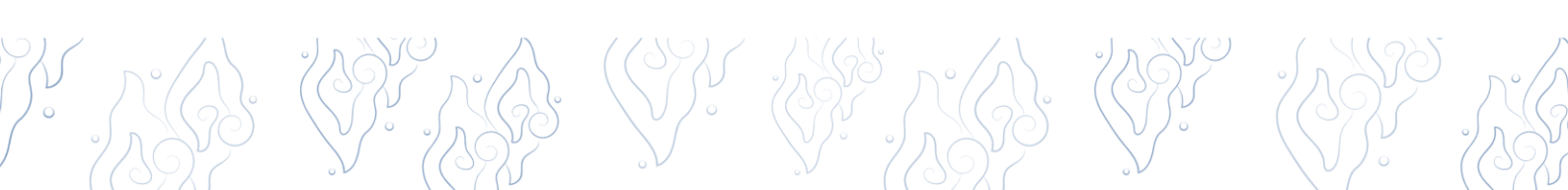


2. Penguatan Misi Papua Sehat

- a. Terlaksananya koordinasi dengan Universitas Ciputra terkait peluang beasiswa penuh pendidikan dokter dan dokter gigi bagi wilayah Indonesia Timur, termasuk peluang kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan.
- b. Terlaksananya SHEK terhadap rencana investasi pembangunan Rumah Sakit Siloam International di Kota Sorong, khususnya terkait aspek hukum, status aset, legalitas para pihak, serta kebutuhan kepastian hukum dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- c. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kondisi Puskesmas Sorong Kota sebagai bagian dari persiapan akreditasi, dengan teridentifikasinya permasalahan infrastruktur, peralatan medis, SDM, pelayanan gizi, keamanan lingkungan, serta aspek pendanaan.
- d. Teridentifikasinya kebutuhan perbaikan infrastruktur dan fasilitas pendukung Puskesmas Sorong Kota, termasuk kebocoran bangunan, kerusakan plafon, alat medis, aksesibilitas, ambulans, kursi roda, ruang laktasi, serta kebutuhan kalibrasi alat kesehatan.
- e. Terlaksananya koordinasi dengan organisasi profesi PDGI Cabang Sorong dalam rangka penguatan SDM kesehatan gigi dan mulut, pemerataan dokter gigi, peningkatan fasilitas pelayanan, serta pengembangan program afirmasi pendidikan spesialis bagi putra-putri Papua.
- f. Terlaksananya monitoring dan evaluasi RSUD Sele Be Solu Kota Sorong yang menghasilkan identifikasi terhadap kondisi pelayanan, kapasitas SDM, penggunaan Dana Otsus dan DAK, koordinasi BPJS, operasional KJSU, pengelolaan limbah, kebersihan, serta produktivitas SDM.
- g. Terlaksananya peningkatan kapasitas Pokja Papua Sehat melalui pelatihan survei akreditasi bagi calon survei akreditasi rumah sakit, sehingga mendukung peningkatan pemahaman terhadap regulasi dan standar akreditasi fasilitas kesehatan.

3. Penguatan Misi Papua Cerdas

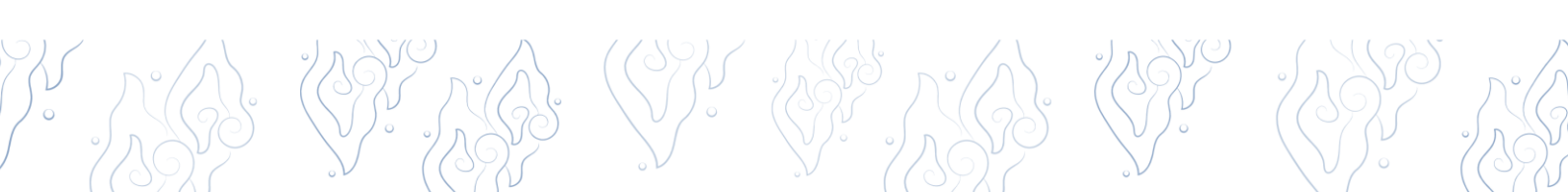
- a. Terlaksananya koordinasi tindak lanjut pengembangan PDD-AKNESS dan pendidikan vokasi antara BPP, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan UNIPA.



- b. Teridentifikasinya kebutuhan penyelesaian aspek kelembagaan, administrasi, aset, sarana prasarana, pembiayaan, serta penyusunan PKS dalam rangka reaktivasi PDD-AKNESS.
- c. Terlaksananya pendampingan BPP kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terkait rencana reaktivasi PDD-AKNESS.
- d. Terlaksananya peran aktif BPP dalam kegiatan pembekalan Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Tahun 2026 yang diikuti 90 siswa sebagai bagian dari penguatan pembangunan sumber daya manusia Orang Asli Papua.
- e. Teridentifikasinya sejumlah tantangan tata kelola pendidikan, termasuk implementasi Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025, kendala Sistem IMUT pada BKN, serta kebutuhan penguatan regulasi pengelolaan Akademi Komunitas berdasarkan PP Nomor 106 Tahun 2021.
- f. Tersampainya isu strategis pendidikan kepada Sekretariat Wakil Presiden RI, termasuk kebutuhan fasilitasi lintas kementerian/lembaga dalam penyusunan regulasi pelaksanaan PP Nomor 106 Tahun 2021 mengenai pengelolaan Akademi Komunitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

4. Penguatan Misi Papua Produktif

- a. Terlaksananya SHEK bersama DPMPSTSP Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka penguatan promosi investasi daerah melalui penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO).
- b. Terbangunnya kesepahaman bahwa penyusunan IPRO merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat promosi investasi daerah, serta teridentifikasinya kebutuhan pembentukan tim penyusun IPRO dan pengumpulan data teknis proyek prioritas.
- c. Terbangunnya kesepahaman bahwa penyusunan IPRO merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat promosi investasi daerah, serta teridentifikasinya kebutuhan pembentukan tim penyusun IPRO dan pengumpulan data teknis proyek prioritas.
- d. Teridentifikasinya berbagai hambatan dalam pengembangan ekspor hasil perikanan, antara lain keterbatasan kapasitas kargo udara, tingginya tarif

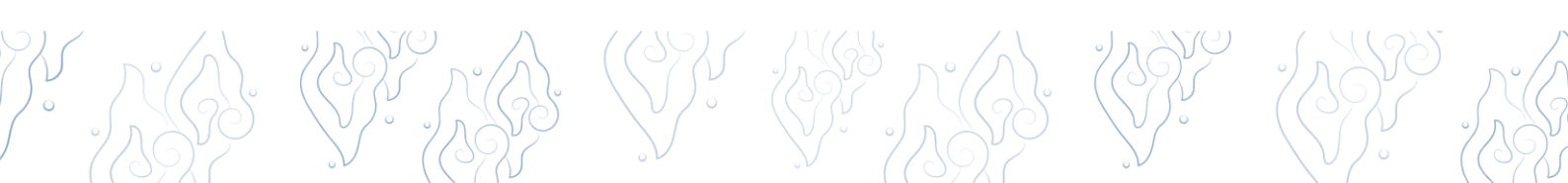


angkutan, keterbatasan cold storage dan reefer container, pemanfaatan aset pemerintah, serta pembatasan wilayah penangkapan ikan.

- e. Terbangunnya koordinasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait pengembangan ekspor hasil perikanan sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal.
- f. Terlaksananya audiensi dengan Yayasan Domberay Creative Project dalam rangka mendukung pelestarian budaya, penguatan kapasitas pemuda adat, pemanfaatan pangan lokal, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, serta pembangunan berkelanjutan.
- g. Terlaksananya FGD Kolaborasi Multipihak Pengelolaan Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua yang memperkuat koordinasi antara pemerintah, masyarakat hukum adat, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan.

5. Penguatan Misi Papua Damai

- a. Terlaksananya Forum SHEK Papua Damai di Kabupaten Maybrat dalam rangka sinkronisasi dan evaluasi dinamika sosial kemasyarakatan serta stabilitas keamanan.
- b. Teridentifikasinya berbagai aspirasi masyarakat Aifat Timur dan Aifat Selatan terkait keberlanjutan pembangunan, dukungan terhadap kebijakan keamanan, evaluasi penggunaan fasilitas umum dan rumah penduduk sebagai pos, pembangunan pasar, serta fasilitas perbankan.
- c. Terlaksananya SHEK bersama Polres Sorong untuk memperoleh gambaran kondisi keamanan, faktor yang memengaruhi kriminalitas, isu hak ulayat, aktivitas anak jalanan, serta kebutuhan penguatan koordinasi dan integrasi data.
- d. Teridentifikasinya bahwa peningkatan kriminalitas, khususnya curanmor, berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta kapasitas fiskal daerah.
- e. Menguatnya koordinasi antara BPP, Pemerintah Daerah, Polres, Kesbangpol, OPD terkait, tokoh adat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung Misi Papua Damai.
- f. Terlaksananya audiensi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong terkait pengembangan Smart City, infrastruktur jaringan, efisiensi bandwidth, serta rencana pembangunan Command Center terintegrasi.



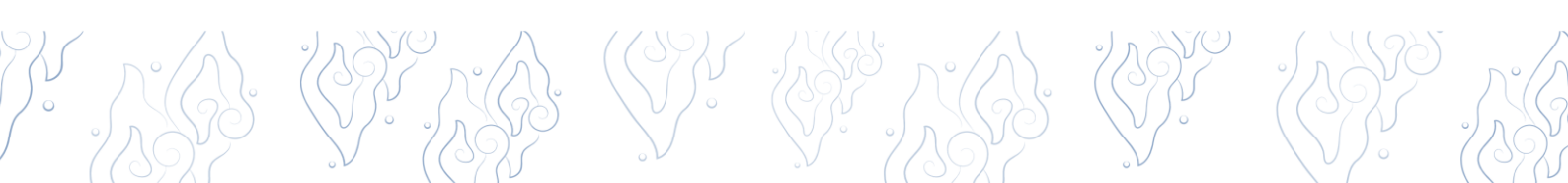
6. Penguatan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Papua

- a. Terlaksananya koordinasi dengan SKALA dalam rangka persiapan Pra-Forum SHEK dan Forum SHEK Kepala Daerah se-Papua Barat Daya terkait Prioritas Program Strategis Bersama (PPSB).
- b. Terbangunnya kesepahaman mengenai pentingnya PPSB sebagai mekanisme kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dalam kondisi keterbatasan fiskal.
- c. Teridentifikasinya pendataan terpilah Orang Asli Papua melalui Sistem Informasi Papua Barat Daya (SIOPADA) sebagai salah satu prioritas penting dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
- d. Terlaksananya FGD penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang menghasilkan komitmen penguatan koordinasi Dukcapil, KPU, Bawaslu, OPD, dan instansi terkait.
- e. Teridentifikasinya kebutuhan percepatan validasi dan verifikasi data terpilah OAP di seluruh kabupaten/kota serta pengembangan sistem monitoring/dashboard data.

4.2 Permasalahan

Meskipun pelaksanaan SHEK selama bulan Juli 2026 telah menghasilkan berbagai capaian, masih terdapat sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut, yaitu:

- a. Sinkronisasi dan tindak lanjut program pembangunan belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam memastikan rekomendasi hasil SHEK dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program di daerah.
- b. Pelayanan kesehatan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, fasilitas, SDM, pembiayaan, dan manajemen, sebagaimana ditemukan pada Puskesmas Sorong Kota dan RSUD Sele Be Solu.
- c. Kesiapan akreditasi fasilitas kesehatan masih memerlukan penguatan, baik dari sisi pemenuhan standar, sarana prasarana, kalibrasi peralatan, maupun pengawasan agar akreditasi tidak hanya bersifat administratif.
- d. Pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, khususnya dokter dan dokter gigi, masih menjadi persoalan dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Papua Barat Daya.

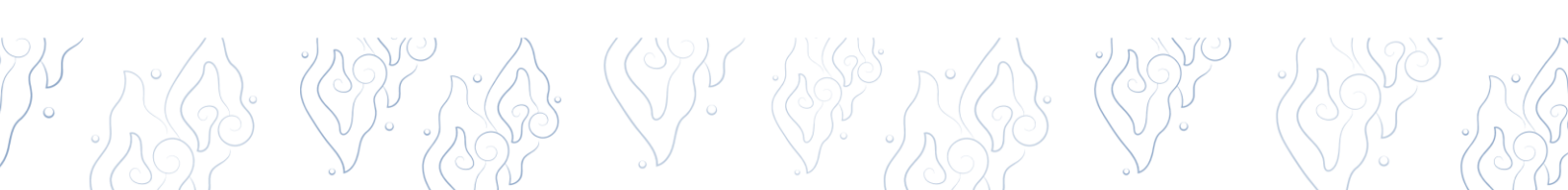


- e. Pengembangan pendidikan vokasi dan Akademi Komunitas masih menghadapi persoalan regulasi dan kewenangan, khususnya dalam implementasi PP Nomor 106 Tahun 2021.
- f. Implementasi Program ADEM dan program afirmasi pendidikan memerlukan monitoring dan pendampingan berkelanjutan agar peserta dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan kembali memberikan kontribusi bagi pembangunan Papua Barat Daya.
- g. Potensi investasi daerah belum seluruhnya siap ditawarkan kepada investor, karena masih diperlukan standardisasi data proyek, Pre-Feasibility Study, dan dokumen IPRO.
- h. Pengembangan komoditas sagu masih menghadapi keterbatasan hilirisasi, teknologi pengolahan, akses pasar, dan integrasi kebijakan meskipun memiliki potensi besar sebagai komoditas strategis daerah.
- i. Pengembangan ekspor hasil perikanan masih menghadapi hambatan logistik dan regulasi, antara lain keterbatasan kargo, biaya angkutan, fasilitas rantai dingin, proses perizinan, serta pembatasan wilayah tangkap.
- j. Pengelolaan data kependudukan dan data terpilah OAP masih membutuhkan penguatan validasi, integrasi, dan koordinasi antarinstansi agar dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan.
- k. Stabilitas keamanan masih dipengaruhi oleh persoalan sosial dan ekonomi, termasuk keterbatasan lapangan kerja, persoalan hak ulayat, kriminalitas, serta kebutuhan penguatan komunikasi antara aparat keamanan dan masyarakat.
- l. Keterbatasan infrastruktur jaringan dan integrasi data antarinstansi masih menjadi kendala dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan penguatan keamanan.

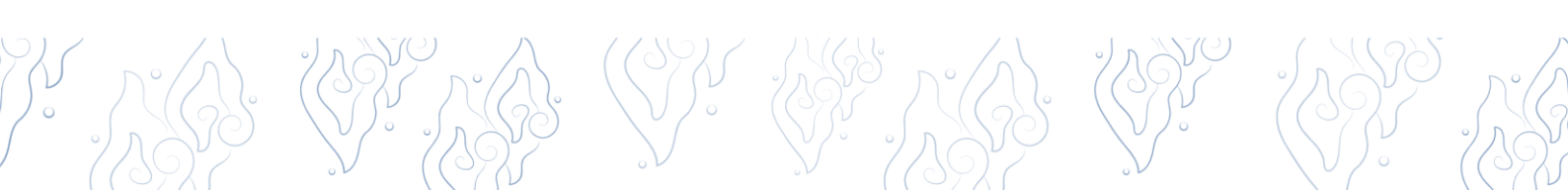
4.3 Tantangan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Papua Barat Daya, tantangan strategis yang perlu menjadi perhatian ke depan meliputi:

- a. Mengoptimalkan fungsi SHEK BPP sebagai penghubung strategis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan seluruh pemangku kepentingan.



- b. Memastikan hasil SHEK dan rekomendasi yang telah dihasilkan dapat ditindaklanjuti secara konkret dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
- c. Memperkuat kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya pada fasilitas kesehatan yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, SDM, fasilitas, dan pembiayaan.
- d. Mendorong pemenuhan standar akreditasi fasilitas kesehatan secara substantif dan berorientasi pada mutu serta keselamatan pasien.
- e. Mempercepat penyelesaian regulasi dan tata kelola pendidikan vokasi serta Akademi Komunitas sesuai amanat PP Nomor 106 Tahun 2021.
- f. Meningkatkan efektivitas program afirmasi pendidikan melalui monitoring, pendampingan, dan evaluasi capaian peserta.
- g. Membangun ekosistem investasi yang lebih siap melalui IPRO, Pre-Feasibility Study, basis data investasi, dan forum business matching.
- h. Mengembangkan sagu sebagai komoditas unggulan melalui pendekatan hulu-hilir, hilirisasi industri, riset, investasi, dan pemberdayaan masyarakat adat.
- i. Meningkatkan kapasitas ekspor hasil perikanan melalui penguatan konektivitas udara dan laut, cold chain, reefer container, fasilitas logistik, dan penyederhanaan perizinan.
- j. Memperkuat sistem pendataan OAP melalui SIOPADA serta integrasi data kependudukan, sosial, dan ekonomi.
- k. Memperkuat pendekatan dialogis dan preventif dalam menjaga keamanan serta menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan.
- l. Memperkuat tata kelola Dana Otsus agar lebih transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
- m. Memperkuat kolaborasi multipihak dalam pengelolaan Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua dengan tetap memperhatikan masyarakat hukum adat, kelestarian lingkungan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- n. Memperkuat mekanisme komunikasi BPP Perwakilan dengan Sekretariat Wakil Presiden dan Pemerintah Pusat untuk mempercepat penyelesaian isu strategis yang membutuhkan intervensi lintas kementerian/lembaga.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

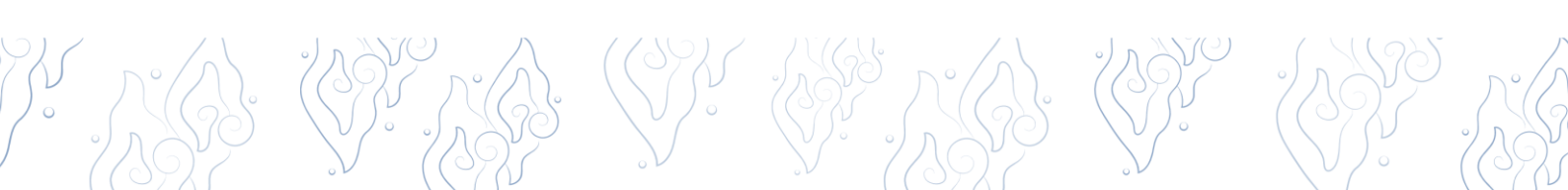
Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya selama bulan Juli 2026, dapat disimpulkan bahwa fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan strategis yang mencakup Misi Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai, serta kegiatan strategis lintas misi.

Pada Misi Papua Sehat, pelaksanaan SHEK telah menghasilkan berbagai identifikasi dan rekomendasi terkait peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan, penguatan akreditasi, pengembangan investasi bidang kesehatan, penguatan organisasi profesi, serta evaluasi pelayanan dan pengelolaan anggaran rumah sakit.

Pada Misi Papua Cerdas, pelaksanaan SHEK diarahkan pada penguatan pendidikan vokasi, reaktivasi PDD-AKNESS, pelaksanaan Program ADEM, penguatan tata kelola pendidikan, serta penyelesaian isu regulasi dan kelembagaan Akademi Komunitas. Berbagai isu strategis tersebut juga telah disampaikan kepada Sekretariat Wakil Presiden untuk memperoleh dukungan dan fasilitasi Pemerintah Pusat.

Pada Misi Papua Produktif, SHEK telah mendorong penguatan investasi melalui IPRO, pengembangan sagu sebagai komoditas unggulan, pengembangan ekspor hasil perikanan, ekonomi kreatif berbasis budaya, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pada Misi Papua Polhukam/Damai, pelaksanaan SHEK telah menghasilkan pemetaan berbagai isu sosial dan keamanan, penguatan koordinasi dengan aparat keamanan, penguatan komunikasi dengan masyarakat, serta identifikasi kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas wilayah.

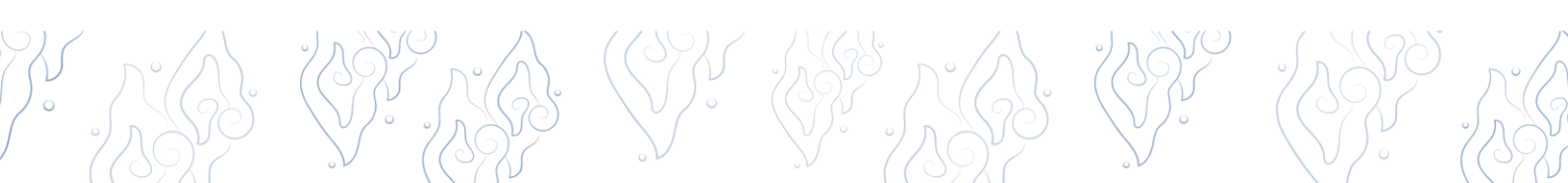


Selain itu, kegiatan strategis lintas misi telah memperkuat pelaksanaan PPSB, pendataan terpilah OAP melalui SIOPADA, pengelolaan data kependudukan, tata kelola Dana Otsus, serta koordinasi dengan Sekretariat Wakil Presiden RI.

Dengan demikian, pelaksanaan SHEK selama bulan Juli 2026 telah memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan, memperkuat koordinasi lintas sektor, menghasilkan rekomendasi, serta menyampaikan isu strategis daerah kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan SHEK ke depan masih sangat bergantung pada konsistensi tindak lanjut, penguatan koordinasi, dukungan regulasi, ketersediaan pembiayaan, serta integrasi perencanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5.2 Rekomendasi

1. Memperkuat tindak lanjut hasil SHEK melalui mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala.
2. Mendorong sinkronisasi program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan RIPPP, RAPPP, dan PPSB.
3. Mempercepat penguatan pelayanan kesehatan melalui perbaikan infrastruktur, pemenuhan SDM, pengadaan fasilitas, penguatan pembiayaan, dan peningkatan mutu akreditasi fasilitas kesehatan.
4. Mendorong tindak lanjut peluang beasiswa pendidikan dokter dan dokter gigi serta program afirmasi pendidikan spesialis bagi putra-putri Papua.
5. Mendorong penyelesaian aspek regulasi dan kelembagaan dalam reaktivasi PDD-AKNESS serta pengembangan pendidikan vokasi.
6. Mendorong Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan pendampingan berkelanjutan terhadap peserta Program ADEM.
7. Mendorong DPMPSTP membentuk dan mengoptimalkan Tim Penyusun IPRO serta menyusun Pre-Feasibility Study untuk proyek investasi prioritas.
8. Mendorong penyusunan Roadmap Pengembangan Sagu Provinsi Papua Barat Daya sebagai acuan pembangunan lintas sektor.
9. Memperkuat dukungan terhadap pengembangan ekspor perikanan melalui peningkatan kapasitas logistik, cold chain, reefer container, insentif kargo, dan penyederhanaan proses perizinan.



10. Mempercepat validasi dan verifikasi data terpilah OAP serta pengembangan SIOPADA sebagai basis data pembangunan yang tepat sasaran.
11. Memperkuat koordinasi antara BPP, Pemerintah Daerah, TNI/Polri, Kesbangpol, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam mendukung Misi Papua Damai.
12. Mendorong penguatan tata kelola Dana Otsus melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.
13. Memperkuat pelaksanaan pengelolaan Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua melalui kolaborasi multipihak dan penguatan peran masyarakat hukum adat.
14. Memperkuat komunikasi dan koordinasi BPP Perwakilan dengan Sekretariat Wakil Presiden RI agar isu strategis yang membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat.

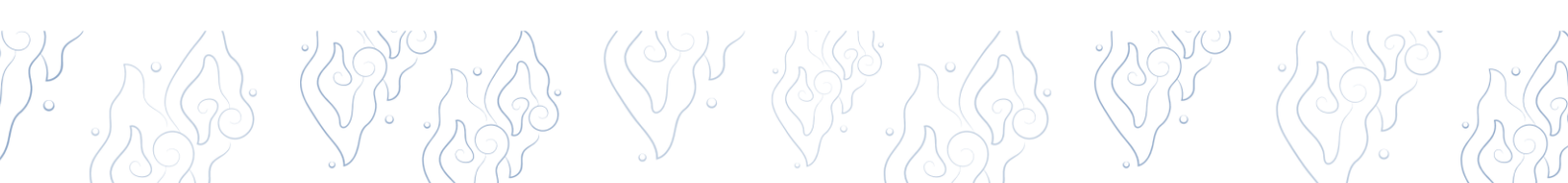
5.3 Penutup

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Periode Juli 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat Daya.

Pelaksanaan kegiatan selama bulan Juli 2026 menunjukkan bahwa BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya telah berperan dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perangkat daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, aparat keamanan, dunia usaha, masyarakat adat, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Berbagai hasil SHEK telah menghasilkan identifikasi permasalahan, pemetaan kebutuhan, rekomendasi kebijakan, serta rencana tindak lanjut pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi produktif, keamanan dan stabilitas sosial, tata kelola data, PPSB, dan koordinasi pembangunan lintas sektor.

Ke depan, hasil pelaksanaan SHEK perlu ditindaklanjuti secara konsisten melalui monitoring dan evaluasi berkala, penguatan koordinasi lintas sektor,



sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta fasilitasi penyelesaian isu strategis yang memerlukan dukungan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi SHEK diharapkan semakin mampu memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan Papua Barat Daya yang sehat, cerdas, produktif, damai, dan berkelanjutan.

DATA BASELINE/INDIKATOR

No	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	69.83	70.02	70.31
2	Prevalensi Stunting (%)	31	21	30.5
3	Eliminasi Malaria (Kab/Kota)	-	1 (Kab. Sorong Selatan)	2 (Kab. Sorong Selatan dan Kab. Maybrat)
4	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8.23	8.39	8.69
5	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.87	13.88	13.89
6	Tingkat Kemiskinan (%)	18.98	18.13	17.95
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.58	6.48	6.85 (Agustus 2025)
8	Realisasi Investasi PMA-PMDN (Rp Triliun/Miliar)	3.08	3.009,5	2.4 (Januari-September 2025)

- *Sumber:**

 - BPS
 - Bappenas (RAPPP)
 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM)
- Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya
 - BKPK Kemenkes
 - SSGI Kemenkes

PAPUA SEHAT





SHEK BPP PBD pada UPTD Puskesmas Sorong Kota — 9 Juli 2026

BPP PBD melaksanakan SHEK pada UPTD Puskesmas Sorong Kota untuk mengevaluasi kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi proses akreditasi sekaligus menilai kualitas layanan kepada masyarakat. Hasil evaluasi menemukan sejumlah persoalan pada infrastruktur dan fasilitas penunjang, antara lain kebocoran atap dan kerusakan plafon, keterbatasan alat medis, belum tersedianya ambulans dan kursi roda, serta belum tersedianya ruang laktasi. Dari sisi pelayanan, keterbatasan tenaga dokter, jadwal pelayanan yang hanya berjalan dua hari per minggu, pengelolaan makanan tambahan yang belum sesuai standar, serta kebutuhan penanganan kasus stunting juga menjadi perhatian.

Hasil SHEK menunjukkan bahwa sebagian persoalan berkaitan dengan **kualitas perencanaan dan keterbatasan pendanaan**, termasuk belum optimalnya dukungan biaya operasional dan distribusi kapitasi JKN. BPP mendorong perbaikan infrastruktur, pemenuhan fasilitas sesuai standar akreditasi, kalibrasi alat kesehatan, penguatan manajemen SDM dan layanan gizi, serta advokasi dukungan pembiayaan kepada pemerintah daerah. Temuan ini sekaligus menjadi catatan penting agar proses perencanaan dan penganggaran fasilitas kesehatan ke depan lebih memperhatikan kebutuhan riil dan kualitas hasil pembangunan.

Penguatan Papua Sehat harus dimulai dari memastikan fasilitas pelayanan dasar benar-benar layak, aman, dan mampu memberikan layanan secara optimal; karena itu, kualitas perencanaan, penganggaran, dan pemeliharaan fasilitas kesehatan perlu menjadi bagian integral dari percepatan pembangunan.

PAPUA CERDAS



Pendampingan BPP PBD dalam Rencana Reaktivasi PDD-AKNESS Kabupaten Sorong Selatan — 16–18 Juli 2026

BPP PBD melaksanakan pendampingan dalam rencana reaktivasi Pendidikan Vokasi/PDD-AKNESS di Kabupaten Sorong Selatan. Di tingkat daerah, **kesiapan reaktivasi pada prinsipnya sudah berjalan**, termasuk rencana pemanfaatan SMAN 1 Teminabuan sebagai lokasi operasional sementara, koordinasi dengan UNIPA, serta penyiapan sarana dan kelembagaan. Namun, hasil SHEK menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi semata kesiapan daerah, **melainkan belum adanya kepastian regulasi yang memungkinkan Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan pengelolaan Akademi Komunitas sebagaimana diamanatkan PP Nomor 106 Tahun 2021**.

Hasil koordinasi BPP dengan LLDIKTI Wilayah XIV menegaskan bahwa **belum tersedia regulasi teknis yang mengatur secara jelas tata kelola Akademi Komunitas yang dikelola Pemerintah Daerah**, termasuk mekanisme pendirian, program studi, kurikulum, pengelolaan dosen, pembinaan akademik, dan pembagian kewenangan

dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta LLDIKTI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan **intervensi kebijakan pada tingkat Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan regulasi turunan sebagai prasyarat pelaksanaan amanat PP Nomor 106 Tahun 2021**. Kejelasan regulasi menjadi penting agar Pemerintah Daerah memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas dalam menjalankan kewenangan pengelolaan Akademi Komunitas, sekaligus memastikan keterhubungan kewenangan antara Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, LLDIKTI, serta kementerian terkait lainnya.

Amanat PP Nomor 106 Tahun 2021 mengenai pengelolaan Akademi Komunitas oleh Pemerintah Daerah belum dapat diimplementasikan secara optimal karena belum tersedia regulasi turunan yang mengatur mekanisme dan pembagian kewenangan. BPP mendorong Kementerian/Lembaga terkait segera menyusun regulasi turunan yang memberikan kepastian kewenangan, tata kelola, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan Akademi Komunitas, sehingga amanat PP Nomor 106 Tahun 2021 dapat benar-benar diimplementasikan di Tanah Papua.

PAPUA PRODUKTIF



SHEK BPP PBD bersama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya — 7 Juli 2026

BPP PBD melaksanakan SHEK bersama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya untuk mengevaluasi pelaksanaan program bantuan modal bagi **Mama-Mama OAP**. Evaluasi menunjukkan bahwa rendahnya akses terhadap pembiayaan formal tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan modal, tetapi juga persyaratan administrasi, ketiadaan agunan, usaha yang masih informal, rendahnya pencatatan keuangan, dan literasi keuangan. Di sisi lain, program bantuan modal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih berjalan dengan sasaran, mekanisme, indikator, dan database yang berbeda sehingga berisiko menimbulkan penerima ganda dan bantuan yang tidak berkelanjutan.

SHEK menghasilkan kesepakatan untuk mendorong **harmonisasi data penerima manfaat** dan pengembangan dashboard secara daring sebagai basis data tunggal pelaku usaha OAP. BPP juga mendorong agar program permodalan Mama-Mama OAP dikembangkan sebagai **Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB)** lintas kabupaten/kota, sehingga bantuan tidak berhenti pada pemberian modal, tetapi diikuti pendampingan, peningkatan kapasitas, akses pasar, dan pemantauan hasil usaha. Penyusunan Indeks Kemandirian Ekonomi Mama-Mama OAP juga diusulkan sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan program secara lebih objektif.

Pemberdayaan ekonomi OAP perlu bergeser dari pendekatan bantuan menjadi pembangunan kemandirian ekonomi yang terukur, melalui satu data, program lintas daerah, pendampingan berkelanjutan, dan indikator keberhasilan yang jelas.

PAPUA POLHUKAM/DAMAI



Forum SHEK Papua Damai: Sinkronisasi dan Evaluasi Dinamika Sosial Kemasyarakatan serta Stabilitas Keamanan di Kabupaten Maybrat — 3 Juli 2026

BPP PBD melaksanakan Forum SHEK untuk mengevaluasi dinamika sosial kemasyarakatan dan stabilitas keamanan di Kabupaten Maybrat, khususnya wilayah

Aifat Timur dan Aifat Selatan. Forum yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga keagamaan, lembaga perwakilan, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat terdampak mengidentifikasi bahwa dinamika keamanan masih berdampak terhadap kehidupan masyarakat, termasuk akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, aktivitas ekonomi, dan pelayanan pemerintahan. Pemulihan masyarakat terdampak dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi bagian penting dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Forum juga menunjukkan bahwa **keamanan dan pembangunan tidak dapat dipisahkan**. Masyarakat mengharapkan pembangunan di wilayah terdampak konflik tetap berjalan, terutama pembangunan jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, pasar, dan fasilitas ekonomi, disertai pendekatan keamanan yang lebih humanis. BPP mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat/agama/masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya agar penanganan wilayah terdampak tidak hanya berorientasi pada stabilitas keamanan, tetapi juga pemulihan sosial dan pembangunan yang nyata.

Papua Damai membutuhkan pendekatan terpadu: keamanan yang kondusif harus berjalan bersama pemulihan masyarakat dan kehadiran pembangunan di wilayah terdampak, sehingga perdamaian menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sorong, 9 Agustus 2026

Nomor : 6/SPny/BPP-PBD/SOQ/VIII/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Laporan Bulanan BPP
Periode Bulan Juli 2026**

Kepada Yth.
Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK (sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi) Badan Pengarah Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022, serta menindaklanjuti Surat Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura Nomor S3/SETBPP/JYP/JYP.02/2025 tanggal 5 Februari 2025 hal Pedoman Penyampaian Laporan Bulanan Percepatan Pembangunan Papua, bersama ini kami sampaikan **Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya periode bulan Juli 2026**.

Laporan tersebut memuat uraian pelaksanaan tugas dan fungsi BPP yang meliputi aspek kelembagaan, pelaksanaan SHEK pada masing-masing misi percepatan pembangunan Papua (Sehat, Cerdas, Produktif, Damai/Polhukam), dokumentasi kegiatan, capaian kinerja, identifikasi permasalahan dan tantangan, serta rekomendasi tindak lanjut sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang solutif.

Adapun dokumen laporan dimaksud dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1GnQ0lj5hv6ge-pbwKAjWenY75qmEeFi0?usp=sharing>

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Atas perhatian dan dukungannya, kami ucapkan terimakasih.


**Anggota Badan Pengarah Papua
Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya,**

DRS. OTTO IHALAUW, MA

Tembusan:

1. Sekretariat Badan Pengarah Papua Manokwari
2. KPPN Sorong selaku Tim Dukungan Administratif Sekretariat Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya

